

Defisit Dagang Membengkak, Uni Eropa Pertimbangkan Langkah Keras kepada China

Jumat, 19 Juni 2026 16:38 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/defisit-dagang-membengkak-uni-eropa-pertimbangkan-langkah-keras-kepada-china>

KONTAN.CO.ID - BRUSSELS. Para pemimpin Uni Eropa (UE) membahas kemungkinan penerapan langkah-langkah baru yang lebih tegas untuk mengatasi membengkaknya defisit perdagangan blok tersebut dengan China serta tingginya ketergantungan terhadap negara ekonomi terbesar kedua di dunia itu dalam pasokan logam tanah jarang (rare earth) dan bahan baku strategis lainnya.

Para diplomat Uni Eropa menyebutkan bahwa mulai muncul kesamaan pandangan di antara 27 negara anggota bahwa defisit perdagangan barang dengan China telah menjadi persoalan serius. Nilainya kini mencapai sekitar 1 miliar euro atau sekitar US\$ 1,15 miliar per hari, sementara situasi semakin rumit karena tarif transatlantik mengurangi akses ke pasar Amerika Serikat.

Perdana Menteri Luksemburg Luc Frieden menyatakan dirinya mendukung dialog dengan China, namun menegaskan hubungan dagang harus berlangsung secara adil dan tidak boleh menjadi "jalan satu arah".

Defisit Perdagangan UE-China Terus Membesar

Surplus perdagangan barang China terhadap Uni Eropa mencapai 360,6 miliar euro sepanjang 2025, meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada empat bulan pertama tahun ini, surplus tersebut kembali bertambah sekitar 10% seiring meningkatnya ekspor perusahaan-perusahaan China ke pasar Eropa dan menurunnya impor dari kawasan tersebut.

Di sisi lain, Beijing juga memanfaatkan dominasinya dalam pemrosesan mineral kritis dengan memberlakukan pembatasan ekspor logam tanah jarang pada April 2025. Kebijakan tersebut merupakan respons terhadap tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan turut memberikan dampak terhadap perusahaan-perusahaan Eropa.

Seorang diplomat Uni Eropa menggambarkan perubahan lanskap global dengan mengatakan: "Kita sekarang hidup di dunia yang penuh dengan serigala. Kita tidak lagi hidup di dunia yang dipenuhi kuda poni merah muda dan pelangi."

Uni Eropa Perlu Diversifikasi Perdagangan

Menyadari pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap satu negara, Uni Eropa dalam setahun terakhir telah menjalin berbagai kemitraan mineral dan perjanjian perdagangan bebas dengan Australia, India, serta Indonesia.

Dalam pertemuan puncak di Brussels, para pemimpin Uni Eropa sepakat bahwa langkah diversifikasi tersebut perlu diperluas.

Mereka meminta Komisi Eropa, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan blok, menghasilkan kemajuan nyata dari dialog dengan para mitra dagang utama sekaligus memastikan Uni Eropa memiliki instrumen yang memadai untuk melindungi kepentingannya.

Perbedaan Pendekatan di Antara Negara Anggota

Meski sepakat mengenai adanya persoalan dengan China, negara-negara anggota masih berbeda pandangan mengenai respons yang harus diambil.

Prancis mendorong pendekatan yang lebih keras terhadap Beijing. Sebaliknya, Jerman sebagai eksportir terbesar di Uni Eropa dan Spanyol yang semakin banyak menerima investasi dari China memilih bersikap lebih hati-hati.

Perbedaan tersebut terlihat bulan lalu ketika Prancis, Italia, Belanda, dan Lithuania mengusulkan agar Uni Eropa mempertimbangkan kebijakan baru untuk membatasi ketergantungan berlebihan terhadap satu negara asing, termasuk kemungkinan penerapan bea tambahan atau kuota guna melindungi produsen domestik.

Spanyol yang semula tercantum sebagai penandatanganan kemudian mengambil jarak dari usulan tersebut.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menegaskan: "Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan hubungan yang seimbang. Kita perlu bersikap pragmatis dan membangun jembatan baik dengan ekonomi-ekonomi besar yang berpotensi menjadi sekutu seperti China maupun dengan sekutu tradisional seperti Amerika Serikat."

Kebijakan Anti-Dumping Dinilai Perlu Diperkuat

Saat ini kebijakan perlindungan perdagangan Uni Eropa sebagian besar memang berfokus pada China. Dari 21 investigasi baru terkait praktik anti-dumping dan subsidi, sebanyak 18 di antaranya menyorot produsen asal China.

Uni Eropa juga telah mengenakan tarif tambahan terhadap kendaraan listrik impor buatan China sejak 2024. Kebijakan tersebut memicu aksi balasan Beijing terhadap produk susu dan minuman brendi asal Eropa.

Namun, sejumlah pengamat menilai mekanisme investigasi perdagangan Uni Eropa masih berjalan terlalu lambat dan perlu diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi, bukan semata-mata berdasarkan urutan masuknya perkara.

Mereka juga menilai cakupan investigasi saat ini terlalu sempit sehingga produsen China masih dapat menghindari dampak tarif melalui penyesuaian strategi ekspor.

Komisi Eropa mengakui impor kendaraan listrik asal China memang sempat turun setelah tarif diberlakukan, tetapi produsen China justru meningkatkan pengiriman kendaraan hibrida. Bahkan, impor kendaraan listrik tersebut kembali meningkat pada kuartal pertama tahun ini.

Tinjauan Kebijakan Akan Dilakukan Tahun Ini

Komisi Eropa dijadwalkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan perdagangan pada kuartal ketiga tahun ini. Dalam kajian tersebut, muncul wacana penerapan instrumen baru untuk mengatasi kelebihan kapasitas produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap pemasok tunggal, terutama China.

Untuk sektor-sektor yang dianggap sensitif, perusahaan-perusahaan di Uni Eropa bahkan dapat diwajibkan memiliki sedikitnya tiga alternatif sumber pasokan guna memperkuat ketahanan rantai pasok dan mengurangi risiko geopolitik di masa depan.

Investor Asing Borong US\$ 103 miliar Surat Berharga AS

Jumat, 19 Juni 2026 11:29 WIB

Reporter: Nina Dwiantika, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/investor-asing-borong-us-103-miliar-surat-berharga-as>

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Di tengah ketidakpastian arah suku bunga Amerika Serikat (AS) dan kekhawatiran pasar terhadap besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah AS, investor asing justru kembali menambah eksposurnya ke aset-aset Negeri Paman Sam. Data terbaru menunjukkan minat global terhadap surat berharga AS masih terjaga, meski tidak sekuat awal tahun.

Mengutip Reuters (19/6), laporan Treasury International Capital (TIC) yang dirilis Departemen Keuangan AS menunjukkan investor asing membeli sekitar US\$ 103 miliar surat berharga jangka panjang AS pada April 2026. Pada saat yang sama, kepemilikan asing atas surat utang pemerintah AS (Treasuries) bertambah US\$ 4 miliar menjadi US\$ 9,353 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Maret, namun masih berada di bawah rekor US\$ 9,49 triliun yang tercatat pada Februari lalu.

Data ini menjadi perhatian pasar karena muncul di tengah perdebatan mengenai daya tarik aset AS. Di satu sisi, bank sentral AS masih mempertahankan kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, reli saham-saham berbasis kecerdasan buatan (AI) terus menarik arus modal ke pasar keuangan AS.

Jepang tetap menjadi pemegang terbesar obligasi pemerintah AS dengan kepemilikan mencapai US\$ 1,21 triliun pada April, naik dari US\$ 1,19 triliun pada bulan sebelumnya. Inggris juga meningkatkan kepemilikannya menjadi US\$ 938 miliar dari US\$ 927 miliar. Sebaliknya, China kembali mengurangi eksposurnya meski tipis, menjadi US\$ 651 miliar dari US\$ 652 miliar.

Meski kenaikannya relatif terbatas, data tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai berkurangnya minat investor asing terhadap utang AS belum sepenuhnya terbukti. Bahkan setelah kepemilikan asing sempat turun pada Maret, posisi April kembali mencatat peningkatan dan secara tahunan masih tumbuh sekitar 4%.

Laporan itu juga mencatat arus masuk bersih modal asing (net TIC inflow) sebesar US\$ 26,1 miliar pada April. Menariknya, investor swasta asing justru membukukan arus keluar bersih US\$ 23,1 miliar, sementara institusi resmi seperti bank sentral dan lembaga pemerintah mencatat arus masuk bersih mencapai US\$ 49,2 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan terhadap pasar surat utang AS masih banyak berasal dari investor institusional resmi.

Di pasar obligasi, permintaan terhadap instrumen lindung inflasi juga tetap kuat. Reuters melaporkan lelang Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) tenor lima tahun pada Kamis mendapat sambutan positif dari investor. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pasar masih melihat obligasi AS sebagai aset aman, meski risiko inflasi dan ketidakpastian kebijakan moneter belum sepenuhnya mereda.

Bagi pasar global, data ini mengirim sinyal penting. Walaupun muncul wacana diversifikasi investasi keluar dari AS dalam beberapa bulan terakhir, arus dana asing yang terus mengalir menunjukkan bahwa pasar keuangan AS masih menjadi tujuan utama investor dunia. Tantangan berikutnya adalah apakah minat tersebut dapat bertahan jika suku bunga AS tetap tinggi lebih lama atau kebutuhan pembiayaan pemerintah AS terus membengkak.

Yen Makin Loyo Terhadap Dolar AS, Dekati Level Terendah dalam 40 Tahun

Jumat, 19 Juni 2026 14:11 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/yen-makin-loyo-terhadap-dolar-as-dekati-level-terendah-dalam-40-tahun>

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menguat dalam perdagangan Asia pada Jumat (19/6/2026). Penguatan dolar AS ini menekan yen Jepang mendekati level terendah dalam empat dekade.

Dolar AS menguat atas yen Jepang karena kesepakatan perdamaian antara AS dan Iran masih belum pasti dan para pedagang berspekulasi bahwa intervensi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk menghentikan penurunan mata uang Jepang.

Mata uang Jepang membalikkan penguatan sebelumnya dan diperdagangkan datar terhadap dolar AS pada ¥ 161,455, mendekati level terlemahnya dalam dua tahun.

Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan dolar AS terhadap sekerajang enam mata uang, naik 0,3% ke level tertinggi satu tahun di 101,07 setelah Wakil Presiden AS JD Vance membatalkan perjalanan yang direncanakan untuk bertemu dengan para negosiator Iran di Swiss pada hari Jumat.

Mereka dijadwalkan untuk memulai pembicaraan kompleks tentang implementasi perjanjian 14 poin yang disepakati antara Teheran dan Washington untuk mengakhiri perang mereka.

"Pasar akan mengamati dengan saksama bagaimana implementasi dan negosiasi lanjutan yang lebih sulit berkembang dalam beberapa hari mendatang," tulis analis Danske Bank dalam sebuah laporan riset yang dikutip Reuters.

Poundsterling Inggris turun 0,2% menjadi US\$ 1,3174, bergerak sejalan dengan pelemahan sebagian besar mata uang lainnya dan sedikit berubah setelah Walikota Greater Manchester Andy Burnham menang dalam pemilihan sela di Makerfield. Hal itu membuka jalan bagi kemungkinan tantangan terhadap Perdana Menteri Keir Starmer untuk kepemimpinan Partai Buruh yang berkuasa.

Namun mata uang Jepang hanya mendapatkan sedikit perlambatan bahkan setelah intervensi penjualan dolar oleh Kementerian Keuangan awal tahun ini dan Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunga ke level tertinggi 31 tahun pada hari Selasa.

Kekhawatiran seputar rencana pengeluaran Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi telah melemahkan kepercayaan investor dan memicu spekulasi bahwa intervensi lebih lanjut dapat terjadi.

"Posisi jual spekulatif yen yang besar belum mereda meskipun BOJ menaikkan suku bunga minggu ini," tulis analis DBS dalam sebuah laporan riset.

Analisis DBS menyebut, toleransi Jepang terhadap pelemahan yen tampaknya mendekati batasnya. "Para pembuat kebijakan mungkin akan menggunakan retorika dan intervensi pasar lebih lanjut untuk mengekang depresiasi yen, dengan penurunan harga minyak juga memberikan dukungan bagi mata uang tersebut."

Inflasi inti tahunan Jepang tetap di bawah target 2% bank sentral untuk bulan keempat berturut-turut pada bulan Mei, data menunjukkan pada hari Jumat, karena subsidi bahan bakar mengimbangi kenaikan biaya bahan baku akibat konflik di Timur Tengah.

"Meskipun pembatasan harga bahan bakar oleh pemerintah sejauh ini telah menahan harga konsumen, kami memperkirakan kenaikan biaya energi yang diteruskan ke tagihan utilitas dan barang serta jasa lainnya akan meningkatkan inflasi hingga sekitar 3,5% pada awal tahun 2027," tulis analis dari Capital Economics dalam catatan riset. Risalah rapat bank sentral pada bulan April yang dirilis pada Jumat pagi dan komentar segera setelahnya dari Wakil Gubernur BOJ Ryozo Himino juga memperingatkan bahwa mungkin akan ada lebih banyak kenaikan suku bunga yang terkait dengan efek inflasi dari perang Iran. Dolar telah menguat minggu ini karena para trader menilai kembali ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat bertindak lebih cepat dari yang diperkirakan untuk mengendalikan inflasi, mungkin paling cepat bulan depan. Kontrak berjangka atau Fed Fund Futures memperkirakan probabilitas tersirat sebesar 39,6% untuk kenaikan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan dua hari berikutnya di bulan Juli, naik tajam dari peluang 8% seminggu yang lalu, menurut alat FedWatch dari CME Group.

Pasar Kerja AS Melambat, Pengangguran Bertahan Lebih Lama

Jumat, 19 Juni 2026 16:30 WIB

Reporter: Nina Dwiantika, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/pasar-kerja-as-melambat-pengangguran-bertahan-lebih-lama>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Jumlah warga Amerika Serikat (AS) yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran turun pada pekan lalu. Namun, level klaim yang masih relatif tinggi mengindikasikan pasar tenaga kerja Negeri Paman Sam mulai kehilangan sebagian momentumnya di tengah ketidakpastian ekonomi dan tekanan inflasi.

Melansir Reuters (19/6), Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim awal tunjangan pengangguran turun 4.000 menjadi 226.000 pada pekan yang berakhir 13 Juni. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan perkiraan ekonom yang disurvei Reuters sebanyak 225.000 klaim.

Meski penurunan tersebut memberi sinyal bahwa pasar tenaga kerja masih cukup tangguh, sejumlah ekonom menilai tren yang lebih luas menunjukkan laju penciptaan lapangan kerja mulai melambat. Klaim pengangguran sempat meningkat selama tiga pekan berturut-turut dan kini berada di kisaran atas rentang pergerakan sepanjang tahun ini.

"Kami tidak memperkirakan klaim pengangguran akan terus meningkat dari level saat ini," kata Nancy Vanden Houten, Kepala Ekonom AS Oxford Economics. Menurutnya, kondisi pasar tenaga kerja masih cukup sehat dan belum menunjukkan tanda-tanda overheating yang dapat memicu tekanan inflasi lebih besar.

Data ini muncul sehari setelah Federal Reserve (The Fed) memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 3,50%-3,75%. Namun, proyeksi terbaru bank sentral menunjukkan para pembuat kebijakan masih membuka peluang kenaikan suku bunga lebih lanjut karena kekhawatiran terhadap inflasi yang tetap tinggi.

Di sisi lain, sejumlah indikator menunjukkan perusahaan mulai lebih berhati-hati dalam merekrut pekerja. Ketidakpastian kebijakan, mulai dari dampak tarif impor hingga konflik geopolitik di Timur Tengah, dinilai menjadi faktor yang menahan ekspansi tenaga kerja.

Sinyal pelemahan juga terlihat dari data continuing claims atau jumlah penerima tunjangan pengangguran berkelanjutan yang naik 24.000 menjadi 1,81 juta orang. Angka ini mencerminkan semakin banyak pencari kerja yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Pemerintah AS juga melaporkan durasi median pengangguran meningkat menjadi 11,6 minggu pada Mei, terlama sejak November 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun angka PHK masih rendah, proses perekrutan tenaga kerja baru belum sepenuhnya pulih.

Di saat yang sama, tekanan inflasi masih menjadi perhatian utama. Survei Federal Reserve Philadelphia menunjukkan aktivitas manufaktur di kawasan Mid-Atlantic kembali tumbuh pada Juni. Namun, harga bahan baku yang dibayar pabrik meningkat dan pelaku usaha memperkirakan harga jual akan terus naik dalam enam bulan ke depan.

Stephen Stanley, Chief US Economist Santander US Capital Markets, menilai ekspektasi harga yang semakin tinggi dapat menjadi tantangan bagi The Fed. Menurutnya, indikator harga yang diterima produsen kini berada di level tertinggi sejak 2021 dan mendekati puncak yang terjadi saat pandemi.

Kombinasi pasar tenaga kerja yang mulai melambat dan inflasi yang masih membandel menempatkan The Fed pada posisi yang tidak mudah. Bank sentral harus menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa kehilangan momentum dalam upaya membawa inflasi kembali ke target 2%.

Ekonom Citigroup, Gisela Young, memperkirakan pertumbuhan lapangan kerja AS akan semakin melemah pada musim panas tahun ini. Sejalan dengan itu, tingkat pengangguran diperkirakan akan bergerak lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

Indeks Wall Street Naik Dipicu Perkembangan Negosiasi AS-Iran

Jumat, 19 Juni 2026 05:20 WIB

Rita Nazareth

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112353/indeks-wall-street-naik-dipicu-perkembangan-negosiasi-as-iran/2>

Bloomberg, Indeks di Bursa Amerika Serikat (AS) Wall Street mengalami pemulihan yang membuat saham dan obligasi naik, setelah kesepakatan damai antara AS dan Iran memicu optimisme bahwa pemulihan Selat Hormuz akan mengurangi risiko inflasi.

Lonjakan ini mendorong Indeks S&P 500 naik sekitar 1%. Indeks produsen cip naik ke rekor tertinggi, dengan Intel Corp. melonjak karena Presiden AS Donald Trump mengatakan perusahaan tersebut akan bekerja sama dengan Apple Inc. untuk merancang dan memproduksi semikonduktor di dalam negeri.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS turun setelah lonjakan yang didorong oleh kekhawatiran bahwa bank sentral AS Federal Reserve perlu menaikkan suku bunga untuk menekan tekanan harga. Minyak AS sedikit turun.

Saat perjanjian perdamaian sementara mulai berlaku, pengiriman barang mulai kembali ke Selat Hormuz, dengan AS menyatakan berakhirnya blokade dan dimulainya periode negosiasi yang kompleks mengenai program nuklir Teheran. Sebelumnya pada hari Kamis, Trump memposting di Truth Social bahwa 'minyak mengalir'.

Wakil Presiden AS JD Vance meremehkan kekhawatiran bahwa Iran pada akhirnya dapat mengenakan biaya tol pada lalu lintas melalui jalur air energi vital tersebut. Penutupan selat di tengah perang telah menaikkan harga bahan bakar, meningkatkan risiko krisis ekonomi global.

Jika kesepakatan tersebut bertahan, analis mengatakan hal itu dapat mengurangi tekanan yang signifikan pada biaya energi dan inflasi.

“Kemajuan menuju pelepasan pasokan minyak dari Teluk Persia telah mendukung harga saham,” kata Ian Lyngen dari BMO Capital Markets. “Biaya energi yang lebih rendah juga telah mengurangi kekhawatiran inflasi ke depan dan menyebabkan penurunan yang signifikan pada imbal hasil obligasi Treasury jangka panjang.”

Gubernur Federal Reserve Kevin Warsh pekan ini berjanji untuk memulihkan stabilitas harga setelah para pejabat mempertahankan suku bunga tidak berubah dan memberi sinyal dukungan yang meningkat untuk kenaikan suku bunga.

Jika penurunan biaya energi terus berdampak pada data inflasi, para pembuat kebijakan pada akhirnya mungkin akan menemukan alasan yang cukup untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah untuk jangka waktu yang lama daripada menaikkannya, menurut Fawad Razaqada di Forex.com.

“Pandangan saya tetap bahwa inflasi akan melambat secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang, dan ini mungkin memungkinkan The Fed untuk mempertahankan pengaturan kebijakan saat ini daripada menerapkan pengetatan baru,” katanya.

Sementara itu, Bank of England mempertahankan suku bunga di 3,75% karena mengatakan penurunan harga minyak baru-baru ini "menggembirakan," meskipun dua dari sembilan pembuat kebijakan memilih untuk menaikkan suku bunga seperempat poin segera karena kekhawatiran akan inflasi yang terus berlanjut.

Dana Asing Kabur dari Indonesia: Thailand Raih Berkah Berlimpah

Jumat, 19 Juni 2026 13:21 WIB

Sumber: Bloomberg, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/dana-asing-kabur-dari-indonesia-thailand-raih-berkah-berlimpah>

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Thailand menjadi salah satu negara yang mendapat berkah dari keluarnya dana asing di pasar keuangan Indonesia. Menteri Keuangan Thailand Ekniti Nitithanprapas mengatakan, negaranya berhasil menarik modal asing yang keluar dari Indonesia.

Hal tersebut terjadi karena investor asing mencari pasar dengan fundamental fiskal yang lebih kuat dan risiko yang lebih rendah.

Mengutip Bloomberg, setidaknya Thailand berhasil menarik dana asing sekitar US\$ 2,7 miliar di pasar obligasi dan pasar saham sepanjang tahun ini. Sebaliknya, dana asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia mencapai US\$ 4,2 miliar.

Asing yang keluar dari pasar Indonesia terjadi lantaran rupiah yang terus merosot ke level terendah sepanjang masa dan meningkatnya kekhawatiran atas kebijakan ekonomi yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo.

Investor asing kini tertarik pada disiplin fiskal dan keberlanjutan kebijakan Thailand karena kekhawatiran atas risiko stabilitas fiskal dan keuangan yang membebani Indonesia,” kata Nitithanprapas kepada wartawan, Kamis (18/6/2026) seperti dikutip dari Bloomberg.

Capital inflow Thailand ini sejalan dengan kenaikan bursa saham Negeri Gajah Putih tersebut. Di mana, indeks saham acuan Thailand sudah menguat 26% sepanjang tahun ini.

Di saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) malah anjlok sekitar 29%. Dan berada di peringkat bawah di antara pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia.

Lebih lanjut, Menkeu Thailand memperkirakan ekonomi Thailand akan tumbuh sekitar 2% di tahun 2026. Di mana, stabilitas politik akan mendukung investasi dan membantu negara untuk mempertahankan momentum ekonomi.

Proyeksi itu sejalan dengan perkiraan dari S&P Global Ratings yang dirilis kemarin. Lembaga pemeringkat itu mengatakan bahwa pemerintahan setelah pemilu bulan Februari lalu menghasilkan dinamika koalisi yang lebih stabil dan berpotensi mendukung lingkungan pembuatan kebijakan.

Sementara itu, Moody's juga mengerek peringkat Thailand menjadi stabil, dari sebelumnya negatif. Alasannya, meredanya risiko dari tarif AS dan memontum investasi domestik yang lebih kuat. Moody's pun kembali menegaskan peringkat Thailand di level Baa1.

Transaksi QRIS Turis Asing di RI Rp4,3 T, Tertinggi Malaysia

Jumat, 19 Juni 2026 09:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112367/transaksi-qr-is-tur-is-asing-di-ri-rp4-3-t-tertinggi-malaysia/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh wisatawan asing (inbound) di Indonesia lebih besar dibanding penggunaan QRIS oleh WNI di luar negeri (outbound).

Transaksi QRIS inbound tembus mencapai Rp4,3 triliun sementara QRIS outbound sebesar Rp1,47 triliun hingga Mei 2026.

“Jadi artinya wisatawan [asing] yang ke Indonesia itu lebih besar mencatatkan inbound Rp2,85 triliun, jadi nominal inbound-nya itu sekitar Rp4,3 triliun,” kata Deputy Gubernur BI, Filianingsih dalam konferensi pers hasil rapat dewan gubernur, Kamis (18/6/2026).

“Sementara outbound-nya, yaitu orang Indonesia yang ke luar negeri menggunakan QRIS itu hanya Rp1,47 triliun,” lanjutnya.

Menurut Filli, angka ini menjadi bukti penggunaan QRIS dari negara-negara mitra semakin meningkat, terutama di Malaysia, China, dan Singapura.

Selain itu, data BI mencatat penggunaan QRIS Tap juga terus meningkat. Hal ini seiring pengadopsian QRIS Tap sebagai metode pembayaran di berbagai macam transportasi mulai dari KRL sampai TransJakarta.

“Adopsi di transportasi itu sekitar 95%, ini dikontribusikan oleh 5 transportasi utama di Jabodetabek yaitu KRL, MRT, LRT dan TransJakarta,” tutur Filianingsih.

Ke depan, dia memproyeksi adopsi QRIS Tap akan terus meningkat dan tak hanya di sektor transportasi. Sejauh ini Filianingsih mencatat sudah ada 3,2 juta merchant yang mengadopsi metode pembayaran dengan QRIS Tap.

"Transaksi QRIS Tap terus meningkat dari sisi volume meningkat secara month to month itu 3,06%, mencapai 634 ribu transaksi dan nominalnya secara month to month juga meningkat 5,1% sebesar Rp 6,3 triliun," ucapnya.

BI Guyur Insentif Likuiditas Rp418 T, Mayoritas pada Bank BUMN

Jumat, 19 Juni 2026 05:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112354/bi-guyur-insentif-likuiditas-rp418-t-mayoritas-pada-bank-bumn/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengaku telah menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank senilai Rp418,1 triliun sampai pekan pertama Juni 2026. Mayoritas penerima ialah bank-bank milik negara.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan optimalisasi kebijakan tersebut dilakukan untuk mendorong kredit perbankan ke sektor prioritas.

"Berdasarkan alokasinya, insentif pada lending channel tercatat sebesar Rp355,6 triliun, sedangkan interest rate channel sebesar Rp62,5 triliun," demikian tertulis dalam laporan hasil Rapat Dewan Gubernur BI periode Juni 2026, dikutip Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan kelompok bank, insentif likuiditas makroprudensial disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp209,6 triliun. Kemudian, bank umum swasta nasional sebesar Rp169,9 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp30,8 triliun, dan kantor cabang bank asing sebesar Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, insentif likuiditas telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor pertanian, industri, dan hilirisasi. Kemudian, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Ke depan, bank sentral terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial, yakni melalui penguatan kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM), insentif likuiditas, dan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk terus mendukung penyaluran kredit perbankan.

Kebijakan juga akan terus diperkuat dengan memberikan insentif bagi bank yang meningkatkan pembiayaan (financing) nonkredit dan pendanaan (funding) non-DPK, serta bagi bank yang menetapkan suku bunga kredit yang sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia.

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tekan Ruang Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 19 Juni 2026 11:10 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112395/ekonom-kenaikan-bi-rate-tekan-ruang-pertumbuhan-ekonomi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom berpandangan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75% memiliki sejumlah konsekuensi. Dalam jangka pendek, kebijakan bank sentral untuk menjaga stabilitas moneter dapat menekan ruang pertumbuhan ekonomi.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurrahman mengatakan kenaikan BI Rate menjadi 5,75% merupakan langkah yang cukup rasional untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

“Namun, kebijakan ini tentu memiliki konsekuensi berupa meningkatnya biaya pembiayaan sehingga berpotensi menahan laju pertumbuhan kredit, investasi, dan konsumsi rumah tangga,” kata Rizal ketika dihubungi, Jumat (19/6/2026).

Di sisi lain, Rizal menilai kenaikan suku bunga dapat memberikan sentimen positif terhadap rupiah karena meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik dan membantu meredam tekanan arus keluar modal.

Meski demikian, penguatan rupiah tidak hanya ditentukan oleh BI Rate, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika global seperti arah kebijakan bank sentral utama, pergerakan dolar Amerika Serikat (AS), dan sentimen investor internasional.

“Karena itu, dampaknya terhadap rupiah kemungkinan lebih bersifat menjaga stabilitas daripada mendorong penguatan yang signifikan,” ujarnya.

Dia berpandangan kebijakan moneter yang lebih ketat perlu diimbangi dengan langkah fiskal dan reformasi struktural yang mampu mendorong sektor riil.

Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat investasi, menjaga daya beli masyarakat, dan meningkatkan produktivitas industri agar stabilitas yang tercipta tidak dibayar dengan perlambatan ekonomi yang terlalu dalam.

“Tantangan terbesar saat ini adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, karena keduanya merupakan prasyarat penting bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan,” ucap dia.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Hal ini ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulanan periode Juni 2026 yang berlangsung pada 17-18 Juni 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan suku bunga deposit facility juga meningkat sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga lending facility juga naik sebesar 25 bps menjadi 6,5%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global," ujar Perry dalam konferensi pers Hasil RDG BI hari ini, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus-minus 1% sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan pro-growth.

Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Rilis Panda Bond, Purbaya Raih Dukungan PBOC & Investor China

Jumat, 19 Juni 2026 06:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112348/rilis-panda-bond-purbaya-raih-dukkungan-pboc-investor-china/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berhasil mengamankan dukungan dari bank sentral China, People's Bank of China (PBOC) terkait rencana penerbitan

Panda Bond di negeri Tirai Bambu tersebut.

Selama dua hari kunjungannya di Beijing, China, Purbaya melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan Kementerian Keuangan China, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), PBOC, dan para investor untuk memperluas akses pembiayaan serta memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

"Hasilnya cukup baik. Kita bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, PBOC, dan para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat," ujar Purbaya di Beijing seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/6/2026).

Dia memaparkan salah satu hasil penting dari kunjungan tersebut adalah dukungan penuh Pemerintah China terhadap rencana penerbitan perdana Panda Bond Indonesia di pasar keuangan domestik China. Menurut Purbaya, baik Kementerian Keuangan China maupun PBOC menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung proses penerbitan surat utang tersebut.

"Kami meminta dukungan untuk penerbitan Panda Bond dan mereka amat mendukung. Bahkan ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat," kata Menkeu.

Menurut Purbaya, penerbitan Panda Bond merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan nasional agar tidak bergantung pada satu mata uang atau satu pasar keuangan tertentu.

"Kita ingin diversifikasi sumber pendanaan pembangunan, sehingga tidak dipengaruhi oleh satu sumber mata uang saja. Ini juga sejalan dengan kerja sama transaksi mata uang lokal yang sudah terjalin antara Indonesia dan China," ujarnya.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, Purbaya juga menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia yang tetap solid di tengah dinamika global. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional berada dalam kondisi yang sehat dan berbagai hambatan investasi yang sempat menjadi perhatian investor terus diperbaiki oleh pemerintah.

"Fundamental ekonomi Indonesia tidak ada masalah. Beberapa isu yang menjadi perhatian investor sudah direspons dan sedang diperbaiki oleh pemerintah sesuai arahan Presiden untuk menciptakan iklim investasi yang semakin baik," ujarnya.

Menkeu menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan dan investasi dari berbagai negara tanpa terikat pada kepentingan geopolitik tertentu.

"Kita menerapkan prinsip non-alignment. Semakin banyak negara yang berinvestasi dan mendukung pembangunan Indonesia tentu semakin baik. China merupakan salah satu mitra penting, tetapi kita juga

terus membuka peluang kerja sama dengan Amerika Serikat, Singapura, Eropa, dan negara-negara lainnya," pungkas Menkeu.

Rupiah Hari Ini Dibuka Rp17.839/US\$

Jumat, 19 Juni 2026 09:20 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112378/rupee-hari-ini-dibuka-rp17-839-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan pagi ini. Rupiah menapak ke jalur merah bersama mayoritas mata uang utama Asia.

Pada Jumat (19/6/2026), US\$ 1 setara dengan Rp 17.839 kala pembukaan perdagangan pasar spot. Mata uang Nusantara terdepresiasi 0,73% dibandingkan penutupan hari sebelumnya.

Seiring perjalanan pasar, depresiasi rupiah kian dalam. Pada pukul 09:03 WIB, rupiah melemah 0,82% ke Rp 17.855/US\$.

Pelemahan tersebut membawa rupiah ke dasar klasemen mata uang Asia pagi ini. Namun rupiah tidak sendiri karena sebagian besar mata uang utama Benua Kuning juga terdepresiasi ke jalur merah.

Keperkasaan dolar AS menjadi penyebab kelesuan rupiah dan mata uang Asia. Pada pukul 09:10 WIB, Dollar Index (yang mengukur posisi greenback di hadapan enam mata uang utama dunia) menguat ke 100,866.

Keperkasaan mata uang Negeri Paman Sam sepertinya ditopang oleh ekspektasi terhadap arah kebijakan bank sentral Federal Reserve. Dalam pertemuan Komite Pengambil Kebijakan (Federal Open Market Committee/FOMC) kemarin, Gubernur Kevin Warsh dan kolega memang sepakat mempertahankan suku bunga acuan di 3,5-3,75%.

Namun dot plot terbaru menunjukkan bahwa para pejabat The Fed cenderung ke arah pengetatan kebijakan moneter. Terlihat dari mayoritas Anggota FOMC yang memperkirakan Federal Funds Rate sepertinya akan naik tahun ini, bisa sekali atau dua kali.

Sinyal dari The Fed mendorong penguatan dolar AS. Kini mata uang Negeri Adikuasa kembali ke level sebelum perang AS-Iran, dan kembali menyandang status sebagai aset aman (safe haven asset).

"Posisi The Fed yang hawkish berpotensi membuat dolar AS lepas dari rem," tegas Lee Hardman, Strategist di MUFG Bank Ltd, seperti diberitakan Bloomberg News.

"Hasil rapat The Fed jelas hawkish, sehingga jelas positif bagi dolar AS," tambah Alex Cohen, FX Strategist di Bank of America Corp, juga dinukil dari Bloomberg News.

BI Rate Naik 100 BPS Sebulan: Dampak ke Ekonomi Bertahap

Jumat, 19 Juni 2026 14:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112413/bi-rate-naik-100-bps-sebulan-dampak-ke-ekonomi-bertahap/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur kemarin (18/6/2026). Praktis, Bank Sentral telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin dalam bulan ini.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, kenaikan ini menjadi langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global.

Meski demikian, implikasi dari kenaikan suku bunga tersebut mengancam. Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menilai bahwa kenaikan suku bunga akan memperlambat perekonomian Indonesia, meski perlambatannya cenderung bertahap.

“Saya memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 lebih realistis berada di sekitar 5,0–5,2%, masih cukup kuat tetapi lebih rendah dari laju kuartal I 2026 yang mencapai 5,61% dan lebih menantang untuk mencapai asumsi APBN 2026 sebesar 5,4%,” kata Josua kepada Bloomberg Technoz, Jumat (19/6/2026).

Sementara itu, BI masih menargetkan proyeksi pertumbuhan 2026 dalam kisaran 4,9–5,7%. Namun menurut Josua, setelah kenaikan suku bunga yang agresif, risiko pertumbuhan kini lebih condong ke batas bawah kisaran tersebut.

Ia menambahkan, dampak kenaikan suku bunga tidak langsung terasa penuh pada bulan yang sama, tetapi biasanya masuk ke ekonomi melalui kenaikan bunga kredit baru, pengetatan seleksi kredit, pelemahan konsumsi barang tahan lama, dan penundaan investasi swasta.

Josua menyebut bahwa hal ini sudah mulai tercermin dari data perbankan. Pada Mei 2026, rata-rata suku bunga kredit rupiah memang masih turun tipis menjadi 8,72% dari 8,73% pada April, tetapi suku bunga kredit baru naik cukup tajam menjadi 9,31% dari 8,95%.

“Artinya, kredit lama belum sepenuhnya terdampak, tetapi debitur baru sudah mulai menghadapi biaya pinjaman yang lebih mahal. Efek ini biasanya lebih terasa pada semester II 2026 dan awal 2027,” kata Josua.

Ekonomi RI Belum Rapuh

Namun demikian, Josua menyebut bahwa ekonomi Indonesia belum masuk fase rapuh. Kredit perbankan pada Mei 2026 masih tumbuh 11,51%, lebih tinggi dari 9,98% pada April. Kredit investasi tumbuh 21,95%, kredit modal kerja 8,09%, dan kredit konsumsi 5,89%.

“Ini menunjukkan dunia usaha masih melakukan ekspansi, terutama pada investasi, dan perbankan masih memiliki ruang menyalurkan pembiayaan. Selain itu, BI tetap memberi insentif likuiditas Rp418,1 triliun untuk mendorong kredit ke sektor prioritas, sehingga kenaikan suku bunga tidak sepenuhnya berubah menjadi pengereman ekonomi.” katanya.

Selain itu, dari sisi konsumsi rumah tangga, tanda-tandanya campuran. Survei Konsumen Mei 2026 menunjukkan keyakinan konsumen masih kuat dengan Indeks Keyakinan Konsumen 120,9, Indeks Ekspektasi Konsumen 129,7, dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini 112,2.

Hal ini menurutnya memang menunjukkan optimisme masyarakat, tetapi angka keyakinan sudah turun dari bulan sebelumnya. Di sisi lain, penjualan eceran Mei 2026 diperkirakan masih berkontraksi 3,2% secara tahunan, meski membaik dari kontraksi 3,7% pada April.

“Jadi, konsumsi masih menjadi penopang utama ekonomi, tetapi daya dorongnya mulai tidak sekuat awal tahun,” kata Josua.

Perkuat Stabilisasi Ekonomi

Josua juga beranggapan kenaikan suku bunga acuan juga perlu dibaca sebagai kebijakan stabilisasi rupiah, bukan semata kebijakan untuk menekan permintaan domestik.

“BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75% untuk memperkuat stabilitas rupiah dan menjaga inflasi 2026–2027 tetap dalam sasaran. Jika rupiah tidak distabilkan, tekanan harga impor, energi, pangan, dan biaya produksi justru bisa lebih merusak daya beli masyarakat,” katanya.

Dengan kata lain, kenaikan suku bunga memang menekan pertumbuhan dari sisi kredit, tetapi dapat menahan pelemahan ekonomi yang lebih besar melalui stabilisasi rupiah dan pengendalian inflasi.

Risiko perlambatan terutama akan muncul pada sektor yang sensitif terhadap bunga, seperti properti, kendaraan bermotor, pembiayaan konsumen, perdagangan barang tahan lama, dan UMKM yang bergantung pada modal kerja.

“Jika bunga kredit baru terus naik, maka permintaan KPR, KKB, dan kredit modal kerja dapat melemah. Ini penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung ekonomi,” katanya.

Karena itu, menurutnya risiko terbesar bukan ekonomi langsung jatuh, tetapi pertumbuhan menjadi lebih sempit, hanya ditopang belanja pemerintah, komoditas, dan investasi tertentu, sementara konsumsi kelas menengah serta sektor padat karya melemah.

Faktor global juga membuat proyeksi pertumbuhan lebih berhati-hati. Bank sentral Amerika Serikat masih menunjukkan sikap ketat karena inflasi 2026 diproyeksikan 3,6% dan suku bunga acuannya diperkirakan berada di sekitar 3,8% pada akhir 2026.

Kondisi ini menjaga dolar AS tetap kuat dan membuat tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, belum sepenuhnya hilang.

Laporan No Pause After the Surprise Hike juga memperkirakan BI-Rate bertahan di 5,75% sepanjang sisa 2026, rupiah akhir tahun di kisaran Rp17.800–18.000 per dolar AS, dan imbal hasil SBN 10 tahun di kisaran 7,2–7,4%.

“Rekomendasi kebijakannya, BI sebaiknya menahan suku bunga di 5,75% sebagai pilihan utama sepanjang rupiah lebih stabil dan inflasi tetap terkendali,” kata Josua.

Menurutnya, sebaiknya kenaikan tambahan hanya dilakukan bila rupiah kembali melemah tajam atau ekspektasi inflasi memburuk.

Pemerintah perlu mengimbangi dampak suku bunga tinggi dengan mempercepat belanja yang berdampak langsung ke daya beli, menjaga harga pangan dan energi, memperkuat program perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta mendorong investasi padat karya.

Josua juga menyebut, perbankan juga perlu diarahkan agar tetap menyalurkan kredit produktif, terutama ke sektor pangan, industri pengolahan, ekspor, perumahan terjangkau, dan UMKM yang sehat.

DPR: Evaluasi Tata Kelola MBG Berpotensi Hasilkan Efisiensi Rp 70 Triliun

Jumat, 19 Juni 2026 22:40 WIB

Reporter: Hervin Jumar, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-evaluasi-tata-kelola-mbg-berpotensi-hasilkan-efisiensi-rp-70-triliun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menemui secara langsung para perwakilan mahasiswa dari sejumlah universitas untuk melakukan audiensi setelah aksi demonstrasi berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, mengatakan telah menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang di hadapan para perwakilan mahasiswa untuk membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saan mengatakan, komunikasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, termasuk terkait pelaksanaan program MBG.

Hasilnya, DPR memperoleh informasi bahwa terdapat potensi efisiensi anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp 70 triliun. Penghematan itu disebut berasal dari evaluasi tata kelola program yang dilakukan oleh pimpinan baru BGN.

"Tadi Pak Dasco komunikasi langsung dengan Kepala BGN, Bu Nanik, dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MBG ini sekitar 70 triliun," kata Saan setelah audiensi bersama mahasiswa di Gedung DPR RI.

Menurut Saan, efisiensi tersebut diperoleh setelah BGN melakukan penyisiran terhadap sejumlah komponen program yang dinilai tidak efektif sehingga alokasi anggaran dapat dioptimalkan.

"Dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya," katanya.

Saan menegaskan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa dengan memfasilitasi dialog bersama kementerian maupun lembaga terkait. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai persoalan yang disorot mahasiswa dapat dibahas secara langsung dengan pihak yang berwenang.

"DPR akan menindaklanjuti dengan pemerintah. Kalau teman-teman merasa belum cukup mendapatkan penjelasan di forum ini, DPR siap memfasilitasi dialog dengan kementerian-kementerian terkait agar berbagai persoalan dapat dibahas secara langsung," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dhenni Ribowo, meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Tetapi harapannya, pemerintah, khususnya mungkin dari Dewan Perwakilan Rakyat, bisa menjadi penyambung lidah kami untuk menyampaikan bahwasanya, soal isu perut itu jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena," tegas Dhenni.

Sebagai informasi, audiensi tersebut digelar setelah sejumlah mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, Universitas Dian Nusantara serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI.

Sejumlah aliansi mahasiswa itu mengusung tema aspirasi "Tritura Kembali" yang berisi tiga tuntutan utama, yakni memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional, memberantas inkompetensi pejabat publik, serta mengembalikan supremasi sipil.

Efek Suku Bunga Tinggi, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Bergerak Melambat

Jumat, 19 Juni 2026 14:46 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/efek-suku-bunga-tinggi-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-bergerak-melambat>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 100 basis poin (bps) sepanjang paruh pertama 2026 diperkirakan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu tumbuh di atas 5% pada tahun ini.

Chief Economist PT Bank Tabungan Negara Tbk, Myrdal Gunarto, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,17%, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 5,22% saat BI Rate masih berada di level 5,5%.

"Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,17% pada tahun 2026 dan inflasi sebesar 3,09%," ujar Myrdal kepada Kontan, Jumat (19/6).

Selain itu, inflasi juga diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran bank sentral. Myrdal memperkirakan tingkat inflasi tahun ini mencapai 3,09%, sehingga stabilitas harga tetap dapat terjaga di tengah pengetatan kebijakan moneter.

Di sektor perbankan, Myrdal memperkirakan pertumbuhan intermediasi akan berlangsung lebih moderat seiring kenaikan biaya dana dan suku bunga kredit. Pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan berada di bawah 9% pada tahun ini.

Meski demikian, sejumlah sektor usaha masih dinilai memiliki prospek pembiayaan yang kuat dan berpotensi menjadi penopang pertumbuhan kredit perbankan.

Sektor-sektor tersebut antara lain ketahanan pangan, transportasi, konstruksi, industri makanan dan minuman, energi, industri besi dan baja, kelapa sawit, serta properti residensial.

Sementara itu, Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan dampak kenaikan suku bunga terutama akan dirasakan melalui meningkatnya biaya dana, penyesuaian bunga kredit, serta sikap rumah tangga dan pelaku usaha yang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan konsumsi maupun investasi.

"Kenaikan BI Rate sebesar 100 bps sepanjang paruh pertama 2026 berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih moderat," kata Banjaran.

Menurutnya, meskipun kebijakan moneter yang lebih ketat berpotensi menahan aktivitas ekonomi, sejumlah faktor domestik masih mampu menjadi penyangga pertumbuhan pada tahun ini.

Konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, belanja pemerintah, serta kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan dinilai akan membantu menjaga momentum ekonomi.

Dengan kondisi tersebut, Banjaran memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berpeluang bertahan di sekitar level 5%. Namun, ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya menjadi semakin terbatas.

"Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia belum mengarah pada perlambatan tajam, tetapi momentum pertumbuhannya cenderung lebih tertahan," katanya.

Meski demikian, Banjaran mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diwaspadai ke depan. Risiko tersebut antara lain apabila suku bunga tinggi bertahan lebih lama dari perkiraan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah belum mereda, serta pertumbuhan kredit mulai melambat.

Menurut Banjaran, kombinasi faktor tersebut dapat berdampak negatif terhadap konsumsi masyarakat, investasi swasta, hingga ekspansi dunia usaha yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Alarm Perlambatan Ekonomi Menyala Setelah BI Rate Tembus 5,75%

Jumat, 19 Juni 2026 14:34 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/alarm-perlambatan-ekonomi-menyala-setelah-bi-rate-tembus-575>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 100 basis poin (bps) sepanjang semester I-2026 diperkirakan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua tahun ini.

Meski demikian, perlambatan yang terjadi diperkirakan berlangsung secara bertahap dan belum mengarah pada pelemahan ekonomi yang tajam.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 lebih realistis berada di kisaran 5,0%-5,2%.

Angka tersebut masih tergolong kuat, namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61% dan lebih sulit untuk memenuhi asumsi pertumbuhan dalam APBN 2026 sebesar 5,4%.

"BI sendiri masih menempatkan proyeksi pertumbuhan 2026 dalam kisaran 4,9%-5,7%, tetapi setelah kenaikan suku bunga yang agresif, risiko pertumbuhan kini lebih condong ke batas bawah kisaran tersebut," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, dampak kenaikan suku bunga tidak langsung terasa dalam waktu singkat. Transmisinya terjadi melalui kenaikan bunga kredit baru, pengetatan seleksi kredit oleh perbankan, pelemahan konsumsi barang tahan lama, hingga penundaan investasi swasta.

Indikasi tersebut mulai terlihat dari data perbankan. Pada Mei 2026, rata-rata suku bunga kredit rupiah tercatat 8,72%, sedikit turun dari 8,73% pada April. Namun, suku bunga kredit baru meningkat cukup signifikan menjadi 9,31% dari sebelumnya 8,95%.

"Artinya, kredit lama belum sepenuhnya terdampak, tetapi debitur baru sudah mulai menghadapi biaya pinjaman yang lebih mahal. Efek ini biasanya lebih terasa pada semester II-2026 dan awal 2027," jelasnya.

Meski demikian, Josua menilai kondisi ekonomi Indonesia belum memasuki fase yang rapuh. Pertumbuhan kredit perbankan pada Mei 2026 masih mencapai 11,51%, meningkat dari 9,98% pada April. Kredit investasi tumbuh 21,95%, kredit modal kerja 8,09%, dan kredit konsumsi 5,89%.

Data tersebut menunjukkan dunia usaha masih melakukan ekspansi, terutama pada sektor investasi. Selain itu, dukungan likuiditas dari BI sebesar Rp 418,1 triliun juga dinilai membantu menjaga penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas.

Dari sisi konsumsi rumah tangga, sinyal yang muncul masih beragam. Survei Konsumen Mei 2026 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level 120,9, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen mencapai 129,7 dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini sebesar 112,2.

Meski masih berada pada zona optimistis, Josua mencatat tingkat keyakinan konsumen mulai menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, penjualan eceran pada Mei 2026 diperkirakan masih terkontraksi 3,2% secara tahunan, meskipun membaik dari kontraksi 3,7% pada April 2026.

"Jadi, konsumsi masih menjadi penopang utama ekonomi, tetapi daya dorongnya mulai tidak sekuat awal tahun," katanya.

Lebih lanjut, Josua menekankan bahwa kenaikan BI-Rate menjadi 5,75% perlu dipahami sebagai langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi, bukan semata-mata untuk menekan permintaan domestik.

Menurutnya, tanpa stabilisasi rupiah, tekanan harga impor, energi, pangan, dan biaya produksi dapat meningkat sehingga berpotensi menggerus daya beli masyarakat lebih dalam.

"Kenaikan suku bunga memang menekan pertumbuhan dari sisi kredit, tetapi dapat menahan pelemahan ekonomi yang lebih besar melalui stabilisasi rupiah dan pengendalian inflasi," imbuh Josua.

Josua mengingatkan risiko perlambatan paling besar akan dirasakan sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, seperti properti, kendaraan bermotor, pembiayaan konsumen, perdagangan barang tahan lama, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada kredit modal kerja.

Apabila bunga kredit baru terus meningkat, permintaan kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit modal kerja berpotensi melemah. Kondisi tersebut dapat mengurangi kontribusi konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

"Karena itu, risiko terbesar bukan ekonomi langsung jatuh, tetapi pertumbuhan menjadi lebih sempit, hanya ditopang belanja pemerintah, komoditas, dan investasi tertentu, sementara konsumsi kelas menengah serta sektor padat karya melemah," katanya.

Di sisi eksternal, Josua menilai prospek pertumbuhan juga dibayangi ketidakpastian global. Bank sentral Amerika Serikat masih mempertahankan sikap moneter ketat dengan proyeksi inflasi 2026 sebesar 3,6% dan suku bunga acuan sekitar 3,8% pada akhir tahun.

Kondisi tersebut membuat dolar AS tetap kuat dan menjaga tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Dalam laporan "No Pause After the Surprise Hike", Bank Permata memperkirakan BI-Rate akan bertahan di level 5,75% hingga akhir 2026.

Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp 17.800-Rp 18.000 per dolar AS dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 7,2%-7,4%.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Josua merekomendasikan agar BI mempertahankan suku bunga di level saat ini selama rupiah tetap stabil dan inflasi terkendali. Kenaikan suku bunga tambahan sebaiknya hanya dilakukan apabila terjadi pelemahan rupiah yang tajam atau ekspektasi inflasi memburuk.

Di sisi fiskal, pemerintah dinilai perlu mempercepat belanja yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memperkuat program perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta mendorong investasi padat karya.

Sementara itu, sektor perbankan diharapkan tetap menyalurkan kredit produktif, khususnya ke sektor pangan, industri pengolahan, ekspor, perumahan terjangkau, dan UMKM yang memiliki prospek usaha yang sehat.

UMKM Jadi Fondasi Ekonomi, Ahmad Luthfi Tekankan Penguatan Pembiayaan

Jumat, 19 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/umkm-jadi-fondasi-ekonomi-ahmad-luthfi-tekanan-penguatan-pembiayaan/>

KARANGANYAR — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada Bank Jateng agar memperkuat permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Sebab, sektor tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi perekonomian daerah.

Hal itu disampaikan acara Rapat Strategi dan Kebijakan Semester II Tahun 2026 Bank Jateng di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jumat (19/6/2026).

Dikatakan, jumlah UMKM di provinsi ini melebihi empat juta pelaku usaha. Karenanya, akses permodalannya perlu dipermudah, antara lain memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.

“Kenapa saya tekankan ekonomi mikro? Karena di Jawa Tengah jumlahnya besar dan berada di kabupaten/kota. Maka akses permodalan harus kita permudah,” tegas dia.

Dengan kemudahan itu, lanjut Luthfi, harapannya pelaku usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil, kemudian berkembang menjadi usaha menengah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko mengatakan, rapat tersebut digelar untuk merumuskan langkah perusahaan menghadapi semester II 2026. Menurutnya, dinamika geopolitik, kondisi fiskal, dan persaingan industri perbankan, menuntut Bank Jateng menyiapkan strategi yang lebih adaptif.

“Kita perlu merumuskan kebijakan baru beserta turunannya, program-program yang harus dituntaskan oleh para kepala cabang. Karena itu strategi yang kita lakukan harus berbeda di semester II Tahun 2026,” kata Bambang.

Dia menjelaskan, Bank Jateng telah menetapkan empat kebijakan utama, yakni penguatan permodalan dan tata kelola, transformasi digital, peningkatan kompetensi dan produktivitas karyawan, serta peningkatan skala bisnis.

Dengan kebijakan itu, harapannya mampu meningkatkan skala bisnis, terutama penurunan Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah, peningkatan kredit berkualitas, dan lainnya.

Hingga Maret 2026, Bank Jateng mencatatkan aset sebesar Rp93,97 triliun, dana pihak ketiga Rp75,80 triliun, dan penyaluran kredit Rp63,66 triliun. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Bank Jateng berada pada level 22 persen.

Peluang ekspansi Bank Jateng juga ditopang kondisi ekonomi Jawa Tengah yang masih tumbuh positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,89 persen, lebih tinggi dibanding nasional sebesar 5,61 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,24 persen.

Dalam rapat tersebut juga dihadiri jajaran Komisaris dan Direksi Bank Jateng, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno selaku Komisaris Bank Jateng, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Jateng Urip Sihabuddin, Kepala Biro BUMD dan BLUD Setda Jateng Agus Prasutio, serta para pimpinan cabang dan kepala divisi Bank Jateng. (Humas Jateng)*ul

49 Pengusaha Nasional Studi Komparatif di Jateng, Jajaki Kolaborasi dan Investasi

Jumat, 19 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/49-pengusaha-nasional-studi-komparatif-di-jateng-jajaki-kolaborasi-dan-investasi/>

SEMARANG — Sebanyak 49 pengusaha dari berbagai daerah di Indonesia, melakukan studi komparatif pada sejumlah perusahaan di Jawa Tengah. Kunjungan itu sekaligus untuk membidik peluang investasi dan kolaborasi.

Para pengusaha yang tergabung dalam kegiatan Disway Explore Business with Dahlan Iskan Central Java Series itu, dijamu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, di Grhadika Bhakti Praja Semarang, Kamis (18/6/2026) malam.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih atas kedatangan para pengusaha tersebut, untuk melakukan studi komparatif. Menurutnya, iklim investasi di Jawa Tengah sangat kondusif, dan didukung berbagai faktor penunjang.

Berdasarkan data 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp110,02 triliun. Pada triwulan I 2026 sudah menembus Rp23 triliun, kemudian ada tambahan sekitar Rp15 triliun untuk pengembangan industri kendaraan listrik terintegrasi di Kendal.

Berbagai faktor tersebut juga didukung keberadaan kawasan industri eksisting, yang tersebar di beberapa daerah. Di antaranya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Kawasan Industri Kendal; Kawasan industri di Semarang, Demak, dan lainnya. Bahkan sudah ada sekitar 12 daerah yang mengajukan kawasan industri maupun kawasan ekonomi baru.

Selain itu, jumlah unit usaha di Jawa Tengah tercatat 4,93 juta unit. Terdiri atas usaha besar dan menengah yang mencapai 56.286 unit, serta UMKM sekitar 4,8 juta. Berbagai usaha tersebut bahkan sudah ada yang melakukan ekspor produk ke berbagai negara.

“Sudah saya paparkan bahwa Jawa Tengah ini menarik hati. Kalau tidak investasi di Jawa Tengah akan rugi,” beber Luthfi.

Sementara itu, pelopor acara sekaligus pendamping 49 pengusaha tersebut, Dahlan Iskan menilai, kondisi Jawa Tengah saat ini sudah jauh berkembang dibandingkan beberapa tahun lalu. Itu ditandai dengan infrastruktur di provinsi ini yang kian bagus. Buktinya, di sepanjang Pantai Utara Jawa Tengah, banyak berdiri kawasan industri. Hal tersebut karena ada upaya optimal yang dilakukan oleh gubernur.

Menurutnya, dukungan infrastruktur dan iklim investasi yang sangat baik di Jawa Tengah itulah, yang membuat banyak investor berdatangan. Juga kondusivitas wilayah dan dukungan pemerintah daerah yang baik. Sehingga, banyak pengusaha menaruh kepercayaan untuk berinvestasi di provinsi ini.

Dengan kondisi tersebut, Dahlan Iskan membawa puluhan pengusaha untuk berkunjung ke beberapa perusahaan besar di Jawa Tengah. Pada Kamis, 18 Juni 2026, sudah ada tiga perusahaan yang dikunjungi, yaitu Halo BCA di Semarang, kemudian pabrik mebel yang seluruh produknya diekspor ke seluruh dunia, dan pabrik Polytron yang memproduksi alat elektronik dan kini mulai meningkatkan produksi sepeda motor listrik.

“Semuanya berkunjung ke Jawa Tengah, besok (Jumat) ke Sido Muncul, agar semakin dapat wawasan dan inspirasi bagaimana mengembangkan bisnis. Menurut pengamatan saya, para pebisnis atau pengusaha ini orang yang paling tangguh, ketika jatuh dan mengalami kesulitan ia akan bangkit lagi,” tandas Dahlan. (Humas Jateng)

Dinilai Kompetitif, Apindo Pusat Dukong Penuh Jateng Jadi Pusat Investasi

Jumat, 19 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/dinilai-kompetitif-apindo-pusat-dukong-penuh-jateng-jadi-pusat-investasi/>

SEMARANG — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pusat mendukung penuh agar Provinsi Jawa Tengah menjadi pusat investasi.

Dukungan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Pusat, Bob Azam, saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kota Semarang, Kamis (18/6/2026).

Menurut Bob, Jateng memiliki iklim yang baik dalam investasi, sebab provinsi ini punya wilayah, infrastruktur, tenaga kerja yang baik. Menurutnya, Jateng sangat mungkin menjadi daerah kompetitif untuk investasi. Bahkan, bisa bersaing dengan Vietnam.

Hal itu didukung oleh beberapa daerah di Jawa Tengah yang sudah memiliki pertumbuhan sangat bagus, misalnya Kendal dan Batang. Bahkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada 2025 sudah mencapai sekitar sembilan persen, jauh di atas rata-rata nasional.

“Jadi untuk kompetisi dengan Vietnam dan negara lain tidak perlu Indonesia, cukup Jawa Tengah saja. Apalagi dipimpin oleh Gubernur Ahmad Luthfi yang luar biasa,” ujar dia.

Selain memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus, beberapa daerah di Jawa Tengah juga memiliki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) cukup rendah.

Dalam kesempatan itu, Bob juga menyampaikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terus mengupayakan untuk peningkatan infrastruktur penunjang kawasan industri. Misalnya, revitalisasi pelabuhan Tanjung Emas, dan rencana pembangunan dry port di Batang dan Kendal.

Menurutnya, lengkapnya infrastruktur penunjang, akan semakin menguatkan Jawa Tengah sebagai daerah kompetitif untuk tujuan investasi.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih kepada Apindo Pusat dan daerah, yang serius mengawal Jawa Tengah untuk menjadi tujuan investasi. Salah satu syarat pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Maka, Jawa Tengah harus memiliki daya dobrak investasi.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD dalam membangun wilayah, tetapi ada juga investasi,” katanya.

Menurut Luthfi, iklim di Jawa Tengah sangat mendukung sekali untuk investasi. Di antaranya, dari segi geografis berada di tengah antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Selain itu juga memiliki tenaga kerja yang kompetitif dan perizinan investasi dipermudah.

Tak hanya itu, kebutuhan infrastruktur pendukung kawasan industri juga terus dikejar. Berkali-kali Ahmad Luthfi berkomunikasi dengan pemerintah pusat, agar ada percepatan terkait revitalisasi pelabuhan Tanjung Emas dan dry port (tempat bongkar muat) di Kawasan Industri Batang dan Kendal.

Maka dari itu, dukungan dari pengusaha yang tergabung dalam Apindo Pusat dan daerah untuk mengembangkan wilayah, sangat penting. Di sisi lain, Ahmad Luthfi dan jajarannya juga terus mempromosikan potensi investasi Jawa Tengah, kepada para calon investor dalam dan luar negeri. (Humas Jateng)

Krisis Bolivia Makin Gawat, Presiden Rodrigo Paz Umumkan Keadaan Darurat

Sabtu, 20 Juni 2026 15:16 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/krisis-bolivia-makin-gawat-presiden-rodrigo-paz-umumkan-keadaan-darurat>

KONTAN.CO.ID - LA PAZ. Krisis di Bolivia semakin menjadi pada Sabtu (20/6/2026), ketika Presiden Rodrigo Paz menyatakan keadaan darurat. Ini memungkinkan pengerahan militer yang lebih luas untuk membersihkan blokade dan memulihkan ketertiban setelah protes menghentikan perekonomian selama 50 hari terakhir.

Langkah tersebut merupakan pesan langsung kepada bangsa hanya beberapa jam setelah Paz mengumumkan kesepakatan yang dicapai pada hari Jumat dengan serikat pekerja utama, Konfederasi Pekerja Bolivia (COB), yang bertujuan untuk meredakan ketegangan.

Seperti dikutip Reuters, konflik awalnya meletus setelah Paz tiba-tiba memangkas subsidi bahan bakar yang telah lama berlaku untuk mengurangi defisit, di tengah memburuknya krisis dolar dan pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Meskipun ada langkah-langkah selanjutnya untuk menstabilkan harga bahan bakar dan membatalkan reformasi agraria yang tidak populer, protes meningkat menjadi ketidakpuasan yang lebih luas, dengan serikat pekerja menuntut kenaikan upah, diakhirinya kekurangan bahan bakar dan dolar, dan pengunduran diri Paz.

Kelompok-kelompok pengunjuk rasa, banyak di antaranya bersekutu dengan mantan Presiden sayap kiri Evo Morales, telah memblokir jalan-jalan utama, menyebabkan truk-truk terhenti dan menghambat pasokan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan ke banyak daerah, termasuk La Paz.

Deklarasi keadaan darurat memberi Paz alat konstitusional yang lebih luas untuk memulihkan ketertiban, seperti mengirim pasukan bersenjata untuk membersihkan blokade.

Fenomena Impor Kedelai China: AS Naik, Brasil Malah Turun

Sabtu, 20 Juni 2026 11:25 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/fenomena-impor-kedelai-china-as-naik-brasil-malah-turun>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Impor kedelai China dari Amerika Serikat (AS) pada Mei 2026 naik 1,8% secara tahunan. Kenaikan ini terjadi karena kargo yang dibeli setelah Beijing melanjutkan pembelian kedelai AS akhir tahun lalu tiba di pelabuhan China.

Sabtu (20/6/2026), berdasarkan data Administrasi Umum Bea Cukai China, Negeri Tirai Bambu itu mengimpor 1,66 juta ton kedelai dari AS pada bulan Mei 2026. Jumlah itu naik dari impor kedelai China dari AS di periode yang sama tahun 2025 sebesar 1,63 juta ton.

Sementara itu, impor kedelai China dari Brasil turun 17,7% secara tahunan menjadi 9,96 juta ton di Mei 2026. Sekedar mengingatkan, impor kedelai dari Brasil di Mei 2025 mencapai 12,1 juta ton.

Total kedatangan kedelai China pun turun 15,3% secara tahunan menjadi 11,79 juta ton pada bulan Mei. Namun, volume tersebut melebihi ekspektasi analis sekitar 11 juta ton, sebagian karena logistik pelabuhan yang lebih lancar yang mendukung impor.

Pada periode Januari-Mei, impor kedelai dari Amerika Serikat masih anjlok 42,5% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 8,38 juta ton. Sementara, pengiriman dari Brasil naik 6,7% menjadi 22,68 juta ton di lima bulan pertama 2026.

Pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump dan Xi Jinping pada 14-15 Mei 2026 tidak mengubah komitmen pembelian kedelai sebesar 25 juta metrik ton per tahun hingga tahun 2028, menurut pejabat senior AS dan pernyataan Gedung Putih.

Pada hari Kamis (18/6/2026), Departemen Pertanian AS mengkonfirmasi penjualan 132.000 ton kedelai AS ke China untuk pengiriman pada tahun pemasaran 2026/27, menandai pembelian pertama yang dilaporkan secara publik oleh China sejak pertemuan puncak Mei tersebut.

Jepang Targetkan Investasi Publik-Swasta Hingga US\$ 2,3 Triliun Hingga 2040

Sabtu, 20 Juni 2026 10:52 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-targetkan-investasi-publik-swasta-hingga-us-23-triliun-hingga-2040>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Jepang menetapkan target sekitar US\$ 2,3 triliun dalam investasi gabungan publik dan swasta pada tahun 2040. Di mana, target tersebut untuk 17 sektor strategis sebagai bagian dari strategi pertumbuhan baru dari Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Berdasarkan laporan Nikkei pada Jumat (19/6/2026), inisiatif investasi senilai 370 triliun yen, yang akan diumumkan paling cepat minggu depan, akan berfokus pada bidang-bidang seperti AI, chip, dan pengembangan ruang angkasa.

Itu dilakukan karena Takaichi berupaya menggunakan pengeluaran pemerintah untuk mendorong investasi sektor swasta, kata harian bisnis tersebut, tanpa menyebutkan sumber informasinya.

Panggilan Reuters ke Kantor Perdana Menteri pada hari Sabtu (20/6/2026) untuk meminta komentar tidak dijawab di luar jam kerja.

Saat ini, Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk membuat kerangka anggaran multi-tahun untuk memastikan pendanaan yang stabil bagi investasi yang dianggap penting bagi keamanan ekonomi, beberapa di antaranya mungkin dibiayai melalui obligasi jangka pendek.

Penerbitan obligasi digunakan untuk menutupi kebutuhan pendanaan sementara dan diterbitkan dengan jaminan atas cara pembayaran tertentu untuk pelunasan, memungkinkan pemerintah yang berutang besar untuk berargumen bahwa mereka memperhatikan disiplin fiskal bahkan ketika mereka meningkatkan pengeluaran.

Harga Minyak Brent Anjlok 7,7% di Pekan Ini, Potensi Kenaikan Tetap Mengintai

Sabtu, 20 Juni 2026 05:51 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/harga-minyak-brent-anjlok-77-di-pekan-ini-potensi-kenaikan-tetap-mengintai>

KONTAN.CO.ID - CALGARY. Minyak mentah Brent bergerak tipis pada hari Jumat, tetapi tetap berada di jalur pelemahan dalam pekan ini, setelah Israel dan Hizbullah sepakat untuk gencatan senjata di Lebanon tetapi Iran menetapkan syarat untuk menggunakan Selat Hormuz yang vital.

Jumat (19/6/2026), harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman Agustus 2026 ditutup menguat 72 sen atau 0,9%, menjadi US\$ 80,57 per barel. Dengan posisi ini, maka Brent sudah melemah 7,7% sepanjang pekan ini.

Sementara, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Juli 2026 tidak melakukan penutupan karena pasar Amerika Serikat (AS) libur. Volume perdagangan relatif rendah karena hari libur federal AS.

Produsen Teluk bersiap untuk meningkatkan ekspor setelah Israel dan Hizbullah menyepakati gencatan senjata yang dimulai pukul 16.00 waktu setempat (1300 GMT) pada hari Jumat.

Setidaknya empat kapal tanker yang membawa minyak mentah, produk minyak, dan gas petroleum cair memasuki Selat Hormuz pada hari Jumat, menuju pelabuhan-pelabuhan Teluk Irak, menurut data MarineTraffic.

Meskipun terjadi peningkatan aktivitas, Iran mengisyaratkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelayaran, dengan televisi pemerintah melaporkan bahwa kapal harus berkoordinasi dengan angkatan laut Garda Revolusi untuk transit.

Dalam sebuah pengumuman tanpa tanggal yang didedarkan kepada industri maritim dalam 24 jam terakhir dan dilihat oleh Reuters, Otoritas Selat Teluk Persia Iran mengatakan "tidak ada kapal yang diizinkan untuk melewati Selat Hormuz tanpa izin pelayaran yang sah yang dikeluarkan oleh PGSA".

Kekhawatiran seputar persyaratan Iran untuk menggunakan selat tersebut membantu mendorong harga minyak lebih tinggi pada hari Jumat, kata Rory Johnston, pendiri buletin Commodity Context.

"Pasar memperkirakan adanya kesepakatan dan eksekusi yang cukup lancar, dan tampaknya bukan itu yang kita dapatkan sejauh ini," kata Johnston.

Terlepas dari kenaikan pada hari Jumat, Brent yang turun sekitar 8% dari minggu sebelumnya, mencerminkan penurunan signifikan kekhawatiran pasokan setelah kesepakatan AS-Iran untuk mengakhiri perang.

"Meskipun (harga minyak) belum mencapai titik seperti sebelum perang dimulai, tampaknya kita menuju ke arah itu," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group, menambahkan bahwa pasokan lebih lanjut diperkirakan akan mengalir dalam beberapa hari mendatang.

"Penundaan pengiriman kapal dapat bergerak lebih cepat daripada yang diperkirakan beberapa orang, dan jika ada kerja sama antara Iran dan AS, prosesnya dapat berjalan cukup cepat," tambah Flynn.

Pertemuan yang direncanakan antara pejabat Iran dan AS di Swiss pada hari Jumat telah ditunda, dengan persiapan sedang dilakukan untuk pembicaraan dalam beberapa hari mendatang, kata Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Jumat.

Kementerian mengatakan pertemuan itu tidak lagi mendesak karena nota kesepahaman tentang pengakhiran perang telah ditandatangani secara digital antara kedua belah pihak.

Analisis memperkirakan kesepakatan tersebut akan melepaskan lebih dari 85 juta barel minyak yang terperangkap di Teluk Timur Tengah ke pasar global. Kesepakatan itu juga mencakup pencabutan sanksi AS terhadap minyak Iran, yang akan menambah pasokan.

Sekitar 20% pasokan minyak dan LNG global melewati Selat Hormuz, tetapi pemulihan arus dan produksi setelah kesepakatan AS-Iran dapat memakan waktu beberapa bulan.

Citi mengatakan skenario dasarnya, dengan probabilitas 60%, memperkirakan normalisasi arus yang berkelanjutan, dengan pasar minyak bergerak menuju surplus dan harga cenderung turun selama enam hingga 12 bulan ke depan menjadi sekitar \$60 hingga \$65 per barel pada kuartal pertama tahun 2027.

Commerzbank mengatakan pasokan minyak akan pulih secara bertahap, menurunkan perkiraan Brent menjadi \$80 per barel pada akhir tahun dari \$85, sementara memperkirakan harga akan tetap di atas level sebelum perang untuk sebagian besar tahun mendatang.

Ladang minyak Irak siap untuk melanjutkan produksi dan output akan secara bertahap kembali normal, memulihkan tingkat sebelumnya, kata Menteri Perminyakan Basim Mohammed.

Dari sisi permintaan, permintaan dunia akan meningkat menjadi 113,3 juta barel per hari pada tahun 2030 dari 105,1 juta barel per hari pada tahun 2025, kata OPEC dalam Laporan Prospek Minyak Dunia 2026.

Kala Bank Indonesia Kerek BI Rate 100 Bps Sebulan

Sabtu, 20 Juni 2026 13:30 WIB

Merinda Faradianti

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112496/kala-bank-indonesia-kerek-bi-rate-100-bps-sebulan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melakukan pengetatan moneter tercepat dalam beberapa tahun terakhir dengan mengerek suku bunga acuan (BI Rate) 100 basis poin (bps) hanya dalam waktu satu bulan.

Kenaikan tersebut dilakukan dalam tiga tahap berturut-turut sejak Mei hingga Juni 2026, sehingga BI Rate melonjak dari 4,75% menjadi 5,75%.

Langkah agresif tersebut diambil di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat bertahan di atas Rp17.000 per dolar AS, meningkatnya ketidakpastian global, serta upaya menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran Bank Indonesia.

Pengetatan dimulai dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 19-20 Mei 2026, saat itu BI secara mengejutkan mengerek BI Rate sebesar 50 bps dari 4,75% menjadi 5,25%.

Bank sentral menilai stabilitas rupiah perlu diperkuat di tengah tekanan pasar keuangan global dan pelemahan mata uang domestik. Pada periode tersebut rupiah sempat berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS.

Belum genap sebulan setelah RDG Mei, BI kembali menggelar RDG pada 9 Juni 2026 dan menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%.

Kenaikan di luar jadwal bulanan normal tersebut mencerminkan tingginya perhatian bank sentral terhadap stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah.

Langkah tersebut membuat total kenaikan suku bunga sejak Mei mencapai 75 bps. Sejumlah ekonom menilai pengetatan moneter sudah berlangsung cukup signifikan dan menyarankan BI menunggu dampak kenaikan sebelumnya terhadap ekonomi domestik.

Menuju 100 Bps

Dalam RDG reguler 17–18 Juni 2026, BI kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Dengan keputusan tersebut, total kenaikan suku bunga acuan sejak Mei mencapai 100 bps atau 1 persen penuh dalam waktu sekitar satu bulan.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan kebijakan tersebut merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi rupiah sekaligus menjaga inflasi 2026–2027 tetap berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1%.

Kenaikan 25 bps pada Juni tersebut menggenapi upaya BI yang dalam sebulan telah mengerek suku bunga acuan sebesar 100 bps.

Menurut penjelasan BI, terdapat tiga faktor utama di balik kenaikan suku bunga tersebut, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global dan kuatnya dolar AS.

Menarik aliran modal asing kembali masuk ke aset keuangan domestik. Lalu, menjaga inflasi 2026–2027 tetap berada dalam target bank sentral.

Langkah BI bukan tanpa alasan. Inflasi Indonesia pada Mei tercatat 3,08% secara tahunan, naik dari 2,42% pada April dan mendekati batas atas target BI sebesar 3,5%.

Kenaikan harga pangan, biaya transportasi, serta risiko imported inflation akibat pelemahan rupiah menjadi faktor utama yang mendorong bank sentral mengambil langkah lebih tegas.

Secara bersamaan, Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve masih mempertahankan nada hawkish seiring inflasi yang belum sepenuhnya baik.

Kondisi tersebut membuat arus modal global cenderung mengalir ke aset berimbal hasil tinggi dan dianggap aman. Dalam situasi seperti ini, menjaga selisih imbal hasil (yield spread) yang kompetitif menjadi krusial bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Dunia Usaha

Kenaikan BI Rate 100 bps dalam waktu singkat mulai memunculkan kekhawatiran di berbagai sektor usaha. Pelaku industri properti memperingatkan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) berpotensi naik.

Sehingga dapat menekan daya beli masyarakat dan penjualan rumah. Pengembang juga menghadapi risiko kenaikan biaya pendanaan dan biaya proyek. Keputusan ini membawa konsekuensi ekonomi dalam bentuk naiknya biaya pembiayaan (cost of fund) di sektor riil.

Sinyal perlambatan mulai muncul pada data Survei Perbankan BI para kuartal pertama tahun ini dengan indikator Saldo Bersih Tertimbang Kredit Baru turun menjadi 38,74% dari posisi kuartal sebelumnya sebesar 88,92%.

Di sisi lain, penyumbang terbesar kredit di kuartal I-2026 datang dari kredit konsumsi sebesar 51,97%, kredit investasi 37,33%, dan kredit modal kerja 36,4%. Dengan rincian, kredit multiguna sebesar 51,9%, Kredit Tanpa Agunan (KTA) 37,2%, kredit kendaraan 13,4%.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai kebaikan suku bunga acuan BI Rate yang terjadi secara cepat akan memberikan pukulan telak bagi sektor properti dan juga konsumen kelas menengah.

Menurut Bambang, dari sisi konsumen, kenaikan BI Rate secara agresif akan membuat konsumen berpikir ulang membeli properti. Bunga acuan tinggi diprediksi membuat bunga KPR menjadi lebih mahal sementara biaya hidup juga meningkat.

Adapun konsumen yang sudah mempunyai kredit pemilikan rumah (KPR) komersial atau non subsidi akan mendapat tekanan dari sisi kewajiban angsuran yang naik sehingga bisa menimbulkan potensi kredit macet.

Dari sisi developer atau pengembang, kenaikan BI Rate agresif bisa berdampak pada kenaikan biaya proyek karena kenaikan biaya bahan baku. Bahkan jika developer memiliki pinjaman ke perbankan bisa berdampak kenaikan biaya dana (cost of fund) sementara di saat yang sama pemasukan dari penjualan drastis.

Bambang menambahkan dengan adanya ancaman ini, developer akan memilih menahan ekspansi dan melakukan aksi menunggu (wait and see) melihat kondisi ekonomi ke depannya.

Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengaku harus mengubah strategi ekspansi bisnis, lantaran kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate yang juga beriringan masih belum pulihnya kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Ketua Umum APJII, Muhammad Arif Angga bercerita bahwa kondisi tersebut membuat biaya investasi makin mahal sehingga perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menyusun rencana ekspansi.

Ia menyebut, kenaikan suku bunga dan rupiah yang masih lemah memberikan tekanan ganda bagi industri yang selama ini dikenal padat modal, seperti penyedia layanan internet (ISP), operator telekomunikasi, penyedia infrastruktur internet, pusat data, hingga perusahaan teknologi.

“Ketika suku bunga naik dan rupiah melemah secara bersamaan, maka biaya investasi menjadi lebih mahal dan proses perencanaan bisnis harus lebih hati-hati,” kata Arif Angga, pada Bloomberg Technoz, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Meski demikian, kondisi yang terjadi tidak serta-merta membuat pelaku industri menghentikan ekspansi. Beberapa perusahaan memilih mulai mengubah pendekatan bisnis dengan lebih selektif dalam mengalokasikan investasi. Pasalnya, kebutuhan konektivitas dan layanan digital di Indonesia masih terus meningkat.

APJII menilai dampak kenaikan BI Rate paling terasa bagi perusahaan yang masih mengandalkan kredit modal kerja maupun pembiayaan dari sektor perbankan.

Sebab, naiknya suku bunga berpotensi meningkatkan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan, terutama bagi perusahaan yang sedang menjalankan proyek ekspansi besar.

BI Rate Naik 100 Bps dalam Sebulan, Ini Artinya Buat Sektor Riil

Sabtu, 20 Juni 2026 07:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112455/bi-rate-naik-100-bps-dalam-sebulan-ini-artinya-buat-sektor-riil/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Era suku bunga tinggi tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan ini membuat suku bunga acuan sudah terdongkrak 100 bps dalam sebulan terakhir.

Langkah pengetatan BI menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi kini menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya tekanan eksternal dan domestik.

Ini menjadi siklus kenaikan suku bunga paling agresif sejak April 2025 dan mencerminkan upaya BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, sekaligus mempertahankan daya tarik aset domestik di tengah perubahan lanskap global.

Langkah BI bukan tanpa alasan. Inflasi Indonesia pada Mei tercatat 3,08% secara tahunan, naik dari 2,42% pada April dan mendekati batas atas target BI sebesar 3,5%.

Kenaikan harga pangan, biaya transportasi, serta risiko imported inflation akibat pelemahan rupiah menjadi faktor utama yang mendorong bank sentral mengambil langkah lebih tegas.

Pada saat yang sama, arah kebijakan moneter global juga belum sepenuhnya bersahabat. Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve masih mempertahankan nada hawkish seiring inflasi yang belum sepenuhnya jinak.

Kondisi tersebut membuat arus modal global cenderung mengalir ke aset berimbal hasil tinggi dan dianggap aman. Dalam situasi seperti ini, menjaga selisih imbal hasil (yield spread) yang kompetitif menjadi krusial bagi negara berkembang seperti Indonesia.

“Dalam kondisi seperti ini, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko arus modal yang mudah keluar, sehingga suku bunga domestik perlu cukup menarik agar aset keuangan Indonesia tetap kompetitif,” sebut Josua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), kepada Bloomberg Technoz.

Namun, Josua menambahkan bahwa efektivitas kenaikan suku bunga tidak boleh dilebih-lebihkan, karena sumber tekanan rupiah lebih banyak berasal dari faktor luar negeri, bukan semata dari ketidakseimbangan domestik.

Memang, kebijakan BI sempat menunjukkan hasil. Rupiah yang hampir menembus Rp18.200/US\$ pada sesi perdagangan intraday berhasil menguat ke kisaran Rp17.730/US\$ pada pertengahan Juni, dan pada sesi perdagangan kemarin ditutup di Rp17.790/US\$.

Meski demikian, apresiasi tersebut masih relatif terbatas. Secara tahun berjalan, rupiah masih tercatat sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terlemah di Asia dengan depresiasi 5,76%. Hanya lebih baik dari won Korea Selatan yang melemah 6,24%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah belum sepenuhnya mereda. Investor asing masih mencermati sejumlah faktor risiko, mulai dari prospek suku bunga AS, ketegangan geopolitik global, hingga persepsi risiko terhadap aset Indonesia.

Tidak mengherankan apabila yield Surat Berharga Negara (SBN) masih bertahan di level tinggi meskipun tekanan terhadap nilai tukar mulai mereda.

Dampak Bagi Sektor Riil

Kenaikan suku bunga acuan sebesar 100 bps pada kuartal kedua tahun ini bukan tanpa biaya. Keputusan ini membawa konsekuensi ekonomi dalam bentuk naiknya biaya pembiayaan (cost of fund) di sektor riil.

Sinyal perlambatan mulai muncul pada data Survei Perbankan BI pada kuartal pertama tahun ini dengan indikator Saldo Bersih Tertimbang Kredit Baru turun menjadi 38,74% dari posisi kuartal sebelumnya sebesar 88,92%.

Di sisi lain, penyumbang terbesar kredit di kuartal I-2026 datang dari kredit konsumsi sebesar 51,97%, kredit investasi 37,33%, dan kredit modal kerja 36,4%.

Dengan rincian, kredit multiguna sebesar 51,9%, Kredit Tanpa Agunan (KTA) 37,2%, kredit kendaraan 13,4%.

Bergesernya mesin pertumbuhan kredit dari investasi menjadi konsumsi menjadi salah satu indikator yang sedikit mengkhawatirkan, di tengah tekanan daya beli akibat inflasi.

Data tersebut menggambarkan sepertinya masyarakat masih meminjam dana untuk kebutuhan sehari-hari, renovasi, kendaraan, dan pembiayaan berbasis konsumsi lainnya.

Ternyata, kondisi pada kuartal pertama berlanjut hingga kuartal kedua dengan hasil Survei Konsumen BI bulan Mei memberi gambaran kondisi masyarakat yang ternyata masih mengalami fenomena 'mantab' alias makan tabungan.

Dalam survei tersebut, rasio tabungan (saving ratio) tercatat turun menjadi 17,5% pada Mei, dari posisi April sebesar 18,2%. Di saat yang sama, rasio cicilan meningkat menjadi 10,2% dari sebelumnya 9,7%. Meski begitu, konsumsi tetap terjaga di level 72,3%, dari posisi sebelumnya 72,1%.

Angka konsumsi yang masih terjaga mengindikasikan bahwa rumah tangga tetap mempertahankan konsumsinya, meski harus mengorbankan tabungan dan menambah beban cicilan. Secara makro, kondisi ini terjadi apabila pendapatan tidak tumbuh secepat kebutuhan pengeluaran.

Meski begitu, dalam Survei Perbankan kuartal pertama, sektor perbankan cukup optimis untuk kuartal kedua tahun ini, dengan perkiraan Saldo Bersih Tertimbang menjadi 96,65%, dari posisi kuartal pertama 38,74%.

Hal ini sejalan dengan paparan BI usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang menyebut kondisi perbankan masih cukup kuat untuk menahan dampak awal kenaikan suku bunga. Kredit perbankan Mei 2026 tercatat tumbuh 11,51%, lebih tinggi dari 9,98% pada April.

Kredit investasi tumbuh 21,95%, kredit modal kerja 8,09%, dan kredit konsumsi 5,89%. Dana pihak ketiga tumbuh tinggi 13,47%, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga sebesar 24,74%, dan kredit yang belum ditarik masih besar sekitar Rp2.576 triliun atau 22,41% dari plafon.

"Pertumbuhan kredit lebih terfokus pada kredit investasi, diikuti kredit modal kerja yang tumbuh sekitar 8%, artinya ada penambahan kredit yang produktif," kata Destry Damayanti, Deputi Gubernur BI.

Dia menambahkan masih banyak sektor yang pertumbuhan kreditnya berada jauh di bawah nilai potensinya. Destry menyebut sektor tersebut terdiri dari pertanian, pengangkutan, dan sektor perdagangan.

"Sehingga ini memberi peluang ke depan untuk perbankan, bisa menyalurkan pada sektor-sektor yang mempunyai potensi besar, tapi saat ini pasokan kreditnya masih di bawah potensi," sebut Destry.

Namun, menurut Josua, suku bunga dana pihak ketiga juga naik menjadi 2,7% dari 2,65%. Kenaikan ini menandakan adanya transmisi pengetatan mulai masuk ke harga kredit baru, terutama karena bank mulai menyesuaikan biaya dana dan persepsi risiko.

"Jika berlanjut, kredit baru untuk konsumsi, modal kerja, UMKM, KPR, KKB, dan sektor padat karya dapat melambat lebih cepat daripada yang diharapkan," kata Josua.

Data Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) juga menunjukkan suku bunga kredit rupiah secara rata-rata masih turun tipis menjadi 8,72% pada Mei 2026 dari 8,73% pada April 2026, tetapi suku bunga kredit baru justru naik cukup tajam menjadi 9,31% dari 8,95%.

Menurut Josua, meski kondisi perbankan masih cukup kuat untuk menahan dampak awal kenaikan suku bunga, kualitas penyaluran harus dijaga karena kenaikan suku bunga biasanya berdampak tertunda terhadap kemampuan bayar debitur.

Insentif jadi Penopang

Di tengah kondisi moneter serba ketat ini, BI tetap melonggarkan kebijakan makroprudensial dengan menggelontorkan insentif sebesar Rp418,1 triliun hingga pekan pertama Juni 2026.

Menurut Josua, langkah kebijakan ini tebat, sebab dapat menjadi penyeimbang agar kenaikan BI-Rate tidak terlalu menekan kredit sektor prioritas.

"Insentif ini harus lebih terarah, sebaiknya diprioritaskan untuk sektor yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekspor, mengurangi impor, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendukung UMKM yang sehat," kata Josua.

Jika tidak, insentif likuiditas yang terlalu longgar tanpa seleksi risiko yang baik, dapat mendorong bank mengejar pertumbuhan kredit secara kuantitas, bukan kualitas.

Selain itu, efektivitas insentif tersebut juga ditentukan oleh kondisi permintaan di sektor riil. Survei Perbankan BI menunjukkan bahwa penyaluran kredit baru pada kuartal sebelumnya melambat cukup tajam. Bahkan perbankan mengakui mulia menerapkan standar penyaluran kredit yang lebih berhati-hati, terutama pada kredit investasi.

Dalam kondisi seperti itu, tambahan likuiditas dari regulator memang dapat membantu, tapi tidak otomatis mendorong perusahaan mengambil kredit baru jika prospek bisnis dipandang masih belum cukup menarik.

Harga Bawang Merah Turun ke Rp53.000/Kg

Sabtu, 20 Juni 2026 09:30 WIB

Merinda Faradianti

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112486/harga-bawang-merah-turun-ke-rp53-000-kg/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Harga sejumlah komoditas pangan menunjukkan pergerakan beragam. Penurunan signifikan terjadi pada kelompok cabai merah dan bawang merah.

Sementara cabai rawit serta beberapa komoditas protein hewani mengalami kenaikan tipis, pada Sabtu (20/6/2026).

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia, bawang merah ukuran sedang turun 3,25% atau Rp1.800 menjadi Rp53.650 per kilogram.

Sementara itu, bawang putih ukuran sedang justru naik 1,89% atau Rp800 menjadi Rp43.100 per kilogram.

Di kelompok cabai, penurunan harga terdalam terjadi pada cabai merah besar yang merosot 5,87% atau Rp3.600 menjadi Rp57.700 per kilogram. Cabai merah keriting juga turun 1,16% atau Rp650 menjadi Rp55.500 per kilogram.

Harga cabai rawit hijau tercatat naik 1,95% atau Rp1.050 menjadi Rp54.950 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah meningkat 2,35% atau Rp1.750 menjadi Rp76.300 per kilogram.

Beras kualitas bawah I bertahan di level Rp14.650 per kilogram, sementara beras kualitas bawah II naik tipis 0,69% menjadi Rp14.600 per kilogram.

Beras kualitas medium I dan medium II masing-masing naik Rp50 menjadi Rp16.300 dan Rp16.100 per kilogram. Adapun beras kualitas super I tetap di Rp17.550 per kilogram, sedangkan beras kualitas super II naik Rp100 menjadi Rp17.100 per kilogram.

Pada komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar turun tipis 0,27% atau Rp100 menjadi Rp37.100 per kilogram. Telur ayam ras segar juga mengalami koreksi 0,5% atau Rp150 menjadi Rp29.950 per kilogram.

Sebaliknya, harga daging sapi kualitas 1 naik 0,47% atau Rp700 menjadi Rp149.300 per kilogram, sementara kualitas 2 meningkat 0,61% atau Rp850 menjadi Rp140.500 per kilogram.

Dari kelompok kebutuhan pokok lainnya, gula pasir kualitas premium naik tipis 0,25% atau Rp50 menjadi Rp20.300 per kilogram. Gula pasir lokal turun 0,26% atau Rp50 menjadi Rp19.100 per kilogram.

Sementara itu, harga minyak goreng curah bertahan di Rp20.600 per kilogram dan minyak goreng kemasan bermerk 1 tetap Rp24.200 per kilogram.

Hanya minyak goreng kemasan bermerk 2 yang naik tipis 0,21% atau Rp50 menjadi Rp23.350 per kilogram.

Ekonom nilai Indonesia tetap jadi magnet investasi global

Sabtu, 20 Juni 2026 18:26 WIB

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan, Editor: Virna P Setyorini

<https://www.antaraneews.com/berita/5616148/ekonom-nilai-indonesia-tetap-jadi-magnet-investasi-global>

Jakarta (ANTARA) - Global Chief Economist Juwai IQI Shan Saeed menilai Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik bagi investor global.

Penilaian tersebut tercermin dalam Global Market Accessibility Review 2026 yang menempatkan Indonesia dalam klasifikasi Emerging Market, meski mendapat catatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait information flow atau arus informasi pasar.

Dalam pernyataan diterima di Jakarta, Sabtu, disampaikan dia, perhatian MSCI terhadap pasar modal Indonesia dapat menjadi katalis positif untuk memperkuat daya saing pasar keuangan nasional.

“Sejarah menunjukkan bahwa pasar modal yang sukses dibangun melalui proses perbaikan berkelanjutan. Korea Selatan dan India memperkuat daya saing pasar mereka melalui modernisasi regulasi, peningkatan tata kelola, dan transparansi yang lebih baik. Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan hal tersebut,” kata Shan,

Menurut dia, prospek ekonomi Indonesia masih sangat menjanjikan. Ia melihat kombinasi pertumbuhan ekonomi yang kuat, struktur demografi yang produktif, disiplin fiskal, kekayaan sumber daya alam, serta berlanjutnya agenda reformasi menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus berkembang.

“Di tengah ekonomi global yang semakin terfragmentasi, negara yang memiliki kombinasi skala, stabilitas, demografi, sumber daya alam, dan momentum reformasi semakin langka. Indonesia tetap menjadi salah satu di antaranya,” ujar dia.

Shan menilai kekuatan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan prospek pertumbuhan paling menarik di kawasan.

“Ekonomi besar tidak ditentukan oleh seberapa besar sorotan yang mereka hadapi, tetapi oleh kemampuan mereka mengubah sorotan tersebut menjadi reformasi, reformasi menjadi kepercayaan, dan kepercayaan menjadi pembentukan modal jangka panjang. Trajektori Indonesia menunjukkan bahwa negara ini sedang melakukan hal tersebut,” katanya.

Optimisme tersebut didukung oleh capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026.

Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, baik di kawasan ASEAN maupun kelompok G20.

Di saat banyak negara maju hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 hingga 2 persen, Indonesia masih mampu mempertahankan laju ekspansi ekonomi di atas 5 persen.

Shan menjelaskan daya tahan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat, arus investasi yang terus masuk, serta kebijakan makroekonomi yang dinilai kredibel.

Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari setengah produk domestik bruto (PDB) tercatat tumbuh 5,52 persen, sementara realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai sekitar Rp498,8 triliun.

Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia yang mencapai sekitar 146 miliar dolar AS pada akhir Mei 2026 dan rasio utang pemerintah yang masih berada di bawah 40 persen terhadap PDB dinilai

memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Investor global mencari tiga hal, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan skala. Indonesia menawarkan ketiganya. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5 persen, stabilitas makroekonomi terjaga, dan pasar domestik berpenduduk sekitar 285 juta jiwa memberikan skala yang sulit ditandingi oleh banyak negara berkembang lainnya,” kata Shan.

Purbaya sebut pertumbuhan ekonomi RI lampau rata-rata negara G20

Sabtu, 20 Juni 2026 21:01 WIB

Pewarta: Bayu Saputra, Editor: Budhi Santoso

<https://www.antaraneews.com/berita/5616321/purbaya-sebut-pertumbuhan-ekonomi-ri-lampau-rata-rata-negara-g20>

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) melampaui rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan ASEAN.

Capaian tersebut didukung oleh stabilitas harga yang tetap terjaga. Per Mei 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,08 persen.

"Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen yoy, mengungguli banyak negara G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen," ujar Purbaya saat menyampaikan kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China, sebagaimana dikutip di Jakarta, Sabtu.

Perkembangan ini, menurut Purbaya, membuktikan bahwa Indonesia memasuki kuartal I 2026 dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

Purbaya juga menyoroti ketahanan Indonesia dalam menghadapi risiko gangguan energi global.

Berdasarkan analisis yang dipaparkannya, Indonesia berada pada kelompok negara dengan tingkat eksposur rendah dan memiliki bantalan (buffer) yang kuat. Skor ketahanan energi Indonesia mencapai 77 persen, sedikit di atas China yang sebesar 76 persen.

Menurut dia, ketahanan tersebut ditopang oleh pengelolaan fiskal yang prudent dengan defisit anggaran yang tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB, sehingga APBN memiliki ruang yang memadai untuk meredam gejolak eksternal.

Selain itu, sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap solid, antara lain PMI manufaktur yang berada pada level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas perekonomian (M0) sebesar 14,8 persen yoy, serta pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11,5 persen yoy.

Dari sisi eksternal, menurut Purbaya, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut dengan cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS atau setara 5,6 bulan impor dan mampu melakukan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Menkeu mengatakan pertumbuhan ekonomi yang kuat juga tercermin pada perbaikan kondisi pasar tenaga kerja. Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,68 persen pada 2026.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan menurun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025, didukung efektivitas program perlindungan sosial pemerintah.

Lebih lanjut, Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah menjalankan 8 klaster program prioritas nasional yang akan menerjemahkan strategi pembangunan ke dalam hasil yang nyata.

"Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana," jelas Menkeu.

Pada saat yang sama, pemerintah sedang mempercepat transformasi struktural melalui hilirisasi dan industrialisasi, memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan pedesaan, serta memperdalam pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial dan lapangan kerja yang terintegrasi.

Program-program ini akan diperkuat oleh sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi, guna memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga bersifat inklusif, tangguh, dan terkoordinasi dengan baik.

"Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata," ujar Purbaya.

Pemerintah: MotoGP Mandalika hasilkan dampak ekonomi Rp4,96 triliun

Sabtu, 20 Juni 2026 13:29 WIB

Pewarta: Bayu Saputra, Editor: Faisal Yunianto

<https://www.antaraneews.com/berita/5615855/pemerintah-motogp-mandalika-hasilkan-dampak-ekonomi-rp496-triliun>

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada 2025 telah menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp4,96 triliun.

Nilai tersebut berasal dari peningkatan kunjungan wisatawan, pergerakan sektor transportasi dan akomodasi, perdagangan, serta berbagai aktivitas usaha yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Capaian ini menunjukkan MotoGP Mandalika telah memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah berbagai ajang internasional.

"Penyelenggaraan event ini menunjukkan kepercayaan dunia internasional. Tidak semua negara yang mampu bayar juga dipercaya menyelenggarakan event, itu kuncinya," kata Susiwijono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Keberlanjutan penyelenggaraan MotoGP selama lima tahun berturut-turut, lanjutnya, mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam menggelar perhelatan berskala global.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan sport tourism dan sport industry merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kita percaya dalam mendorong daripada sport tourism dan sport industry, yang salah satunya bagaimana berbagai pihak, baik pemerintah, private sector, dan juga masyarakat, kita semua spending sama-sama untuk pertumbuhan daripada ekonomi," ujar Erick.

Sementara dari sisi daerah, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri mengatakan MotoGP telah memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat, termasuk melalui keterlibatan lebih dari 600 pelaku UMKM dalam berbagai aktivitas pendukung acara.

Kehadiran gelaran itu turut memperkuat daya tarik Mandalika dan destinasi wisata lainnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), sekaligus membuka peluang investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Senada, Deputy Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yulaswati yang menegaskan wisata olahraga sudah berkembang menjadi industri yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Selain menghasilkan dampak ekonomi hingga triliunan rupiah, penyelenggaraan MotoGP juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta penguatan ekosistem pariwisata dan olahraga yang berkelanjutan.

Adapun Indonesia akan kembali menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9-11 Oktober 2026 di Mandalika International Circuit, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Memasuki tahun kelima penyelenggaraan sejak pertama kali digelar pada 2022, ajang balap motor kelas dunia tersebut terus berkembang menjadi salah satu agenda wisata olahraga terbesar di Indonesia yang memberikan dampak bagi perekonomian dan pariwisata nasional.

Pengamat: Status RI sebagai Emerging Market jaga kepercayaan investor

Sabtu, 20 Juni 2026 14:43 WIB

Pewarta: Bayu Saputra, Editor: Faisal Yuniarto

<https://www.antaranews.com/berita/5615943/pengamat-status-ri-sebagai-emerging-market-jaga-kepercayaan-investor>

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai, keputusan penyedia indeks saham global MSCI mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market menjadi kabar positif bagi pasar modal karena tetap menjaga kepercayaan investor.

Status Emerging Market dinilai penting memastikan Indonesia tetap berada dalam radar investor institusi global dan berbagai dana investasi internasional yang menjadikan indeks MSCI Emerging Markets sebagai acuan penempatan dana.

“Dengan tetap bertahannya status tersebut, risiko keluarnya dana asing secara besar-besaran akibat perubahan klasifikasi pasar dapat dihindari sehingga memberikan stabilitas yang lebih baik bagi pasar saham domestik,” ujar Hendra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Meski demikian, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya positif ("+") menjadi negatif ("-").

Menurut Hendra, catatan itu menunjukkan MSCI masih menaruh perhatian terhadap aspek transparansi pasar, terutama terkait keterbukaan struktur kepemilikan saham, kualitas arus informasi, serta konsentrasi kepemilikan yang dinilai berpotensi memengaruhi pembentukan harga saham yang wajar.

“MSCI secara tegas menyoroti keterbukaan informasi dan aksesibilitas pasar bagi investor global. Catatan ini menjadi pengingat bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan tata kelola, likuiditas, dan kualitas pasar modal agar semakin dipercaya investor internasional,” katanya.

Maka dari itu, keberlanjutan status Emerging Market ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan regulator dan pelaku pasar dalam memperbaiki kualitas tata kelola dan transparansi.

Hendra menuturkan sejumlah aspek yang perlu diperkuat, antara lain peningkatan free float emiten, perlindungan investor, keterbukaan informasi perusahaan tercatat, serta efisiensi mekanisme perdagangan di bursa.

"Jika reformasi berjalan efektif, bukan hanya status Emerging Market yang dapat dipertahankan, tetapi Indonesia juga berpotensi memperoleh peningkatan bobot investasi global di masa mendatang," jelasnya.

Dari sisi pasar, keputusan MSCI diperkirakan memberikan sentimen positif bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek. Kepastian bahwa Indonesia tidak mengalami penurunan klasifikasi dinilai mampu meredakan ketidakpastian yang selama beberapa bulan terakhir membayangi pasar.

“Pelaku pasar sebelumnya cukup khawatir terhadap kemungkinan penurunan klasifikasi yang dapat memicu arus keluar dana asing. Dengan skenario tersebut tidak terjadi, ruang pemulihan kepercayaan investor menjadi lebih terbuka,” kata Hendra.

Secara teknikal, sentimen MSCI berpotensi mendorong IHSG bergerak menguat dalam perdagangan akhir pekan dan menguji area resistensi di kisaran 6.377.

Apabila level tersebut mampu ditembus dengan dukungan volume yang kuat, peluang penguatan lanjutan akan semakin terbuka. Sementara itu, area 6.074 menjadi level support penting yang perlu dijaga untuk mempertahankan momentum pemulihan pasar.

"Dengan demikian, pengumuman MSCI dapat menjadi katalis positif jangka pendek bagi IHSG, meskipun dalam jangka menengah hingga panjang perhatian investor masih akan tertuju pada realisasi reformasi transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia yang menjadi sorotan utama MSCI," tambah Hendra.

Purbaya di China, Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Global

Sabtu, 20 Juni 2026 20:00 WIB

Merinda Faradianti

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112509/purbaya-di-china-ekonomi-ri-tetap-kuat-di-tengah-gejolak-global/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mesin pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia saat ini berada dalam kondisi prima, ditopang oleh pengelolaan fiskal yang sehat dan disiplin.

Dalam kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China, Purbaya menyoroti capaian ekonomi Indonesia yang tetap solid ketika banyak negara menghadapi tekanan akibat ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta risiko gangguan pasokan energi global.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara-negara G20 maupun ASEAN. Pada saat yang sama, inflasi domestik tetap terkendali di level 3,08% pada Mei 2026.

“Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB Kuartal I-2026 sebesar 5,61% yoy, mengungguli banyak negara ekonomi G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08%,” kata Purbaya, Sabtu (20/6/2026).

Kombinasi pertumbuhan yang kuat dan inflasi yang rendah tersebut dinilai menjadi bukti ketahanan ekonomi nasional. Kata Purbaya, hal itu juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap kredibilitas kebijakan makroekonomi Indonesia.

Di tengah kekhawatiran dunia terhadap potensi krisis energi akibat konflik geopolitik, Indonesia juga dinilai memiliki posisi yang relatif aman.

Berdasarkan analisis risiko global, Indonesia berada dalam kategori negara dengan eksposur rendah terhadap gangguan energi dan memiliki kapasitas penyangga yang kuat. Skor ketahanan energi Indonesia mencapai 77%, lebih tinggi dibandingkan Tiongkok yang berada di level 76%.

Purbaya menjelaskan, ketahanan tersebut ditopang oleh kondisi fiskal yang tetap terjaga. Pemerintah secara konsisten menjaga defisit anggaran di bawah batas 3% sesuai amanat undang-undang.

Sehingga APBN memiliki ruang yang cukup untuk berfungsi sebagai shock absorber ketika terjadi gejolak eksternal.

“Perkembangan ini membuktikan bahwa Indonesia memasuki periode ini dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel,” sebutnya.

Dari sisi domestik, sejumlah indikator juga menunjukkan aktivitas ekonomi yang terus bergerak ekspansif. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur berada pada level 50,0.

Sementara likuiditas perekonomian tumbuh 14,8% secara tahunan. Kredit perbankan juga meningkat 11,5% yoy, mencerminkan masih kuatnya permintaan dan aktivitas investasi di dalam negeri.

Kinerja sektor eksternal turut memberikan bantalan tambahan bagi perekonomian nasional. Indonesia berhasil mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut.

Selain itu, cadangan devisa tercatat mencapai USD144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Pemerintah menilai kekuatan ekonomi tersebut mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sepanjang 2026, Indonesia menciptakan sekitar 1,9 juta lapangan kerja baru yang berkontribusi menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,68%.

Sementara itu, efektivitas program perlindungan sosial juga mendorong penurunan angka kemiskinan dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025.

Purbaya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga mulai diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah saat ini tengah mempercepat implementasi delapan klaster prioritas pembangunan nasional yang mencakup ketahanan pangan, energi, air, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, hingga mitigasi bencana.

Di saat yang sama, pemerintah juga mempercepat hilirisasi industri, penguatan ekonomi desa, penciptaan lapangan kerja, serta program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi. Seluruh agenda

tersebut diperkuat melalui digitalisasi, reformasi tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan diplomasi ekonomi.

“Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata,” pungkasnya.

Jasirah Heritage Cycling 2026, Melacak Detak Sejarah, Meniti Jalan Wisata Jawa Tengah

Sabtu, 20 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/jasirah-heritage-cycling-2026-melacak-detak-sejarah-meniti-jalan-wisata-jawa-tengah/>

SEMARANG – Matahari baru beranjak dari peraduannya, menyiramkan semburat keemasan yang hangat, di atas pelataran Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (20/6/2026).

Di bawah langit Kota Semarang, riuh rendah suara kayuhan pedal dan tawa hangat mulai memecah keheningan. Puluhan pesepeda bersiap, bukan sekadar untuk menantang aspal dan jarak, melainkan untuk memulai sebuah perjalanan melintasi lorong waktu.

Perjalanan dengan sepeda Ini bukan tentang adu kecepatan, melainkan sebuah ziarah budaya bertajuk Jasirah Heritage Cycling 2026. Sebuah ajang di mana setiap kayuhan roda adalah langkah untuk menyusuri kembali jejak-jejak sejarah yang adiluhung, sekaligus menyingkap pesona wisata Jawa Tengah yang bersahaja nan memukau.

Tepat pukul 06.10 WIB, keheningan pagi itu sepenuhnya pecah oleh kibaran bendera flag off dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Di balik kayuhan pertama para peserta, ada napas olahraga yang berpadu mesra dengan denyut promosi wisata.

Mereka bergerak, meninggalkan detak Kota Semarang yang mulai terbangun, mengarah ke selatan demi merajut kembali kisah-kisah masa lalu yang berserak di sepanjang jalan, hingga melabuhkan lelah di bawah bayang-bayang megah sang saksi bisu abad ke-8: Kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Rute yang mereka lalui bukanlah sekadar bentangan aspal panjang yang menjemukan, melainkan untaian benang merah cerita masa lalu, yang melekat erat di setiap sudut bumi Jawa Tengah.

Peserta melewati Kota Lama Semarang, Lawang Sewu, Benteng Willem II Ungaran, Benteng Fort Willem I Ambarawa, Museum KAI Ambarawa, hingga sejumlah destinasi wisata di Magelang seperti Museum Diponegoro, Candi Mendut, Candi Pawon, dan kawasan Candi Borobudur.

Sumarno turut mengikuti perjalanan dengan bersepeda dari titik awal hingga Benteng Fort Willem I Ambarawa. Baginya, kegiatan ini menjadi gambaran bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, dapat menghadirkan cara baru dalam mengenalkan potensi Jawa Tengah.

“Terima kasih kepada teman-teman BI yang selalu konsisten membantu dan berkolaborasi dengan program-program yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya kegiatan hari ini, yang mendukung pengembangan spot tourism (pariwisata olahraga),” ujar Sumarno.

Menurutnya, pengembangan pariwisata memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Jawa Tengah memiliki banyak potensi wisata, yang dapat menjadi pintu masuk untuk menarik lebih banyak kunjungan masyarakat dari luar daerah.

“Pertumbuhan ekonomi kita banyak ditopang sektor konsumsi, sehingga mendatangkan masyarakat dari luar Jawa Tengah menjadi penting, dan salah satunya melalui pariwisata,” kata sekda.

Dia berharap sinergi antara Pemprov Jateng dan BI dapat terus berlanjut, terlebih pengembangan pariwisata menjadi salah satu fokus pembangunan Jawa Tengah ke depan.

Sementara itu, Kepala KPw BI Provinsi Jateng, Mohamad Noor Nugroho, mengatakan konsep Jasirah Heritage Cycling dihadirkan untuk memperkenalkan wisata sejarah Jawa Tengah, dengan cara yang lebih menarik.

“Kali ini kita bersepeda untuk melewati beberapa tempat wisata bersejarah. Makanya, tahun ini kita menamakannya Jasirah Heritage Cycling,” jelasnya.

Mohamad Noor menyebut, jalur yang dipilih sengaja menghubungkan berbagai destinasi bersejarah, agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat kekayaan wisata Jawa Tengah.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya membawa pesan olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong ekonomi daerah, terutama pelaku UMKM yang berada di sekitar destinasi wisata.

“Harapannya ini memberi manfaat buat masyarakat sekitar untuk mengembangkan perekonomian daerah, UMKM, dan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.

Mohamad Noor menjelaskan, Jasirah juga merupakan platform digital, yang dikembangkan bersama untuk mempromosikan wisata sejarah Jawa Tengah. Melalui platform tersebut, masyarakat dari berbagai daerah dapat mengenal destinasi wisata, dan terdorong untuk berkunjung langsung.

“Ini platform digital yang kita bangun bersama untuk mempromosikan wisata sejarah yang ada di Jawa Tengah. Dari mana pun bisa mengakses dan mengetahui tempat-tempat wisata tersebut,” ujarnya.

Tak berhenti pada kegiatan bersepeda, rangkaian Jasirah Heritage Cycling 2026 juga akan dilanjutkan dengan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan media sosial bagi peserta dari pemerintah daerah. Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan promosi digital, khususnya dalam mengenalkan potensi wisata dan ekonomi lokal.

Dengan menggabungkan olahraga, sejarah, dan pariwisata, Jasirah Heritage Cycling 2026 menjadi cara berbeda untuk melihat Jawa Tengah, bukan hanya sebagai jalur yang dilalui, tetapi sebagai ruang yang menyimpan cerita, budaya, dan peluang ekonomi. (Humas Jateng)*ul

Ekonomi Masyarakat Jateng Dinilai Tetap Kuat, Keyakinan Konsumen Bertahan di Zona Optimistis

Sabtu, 20 Juni 2026

oleh widya vica

<https://infoplus.id/2026/06/20/ekonomi-masyarakat-jateng-dinilai-tetap-kuat-keyakinan-konsumen-bertahan-di-zona-optimistis/>

SEMARANG, INFOPlus – Kondisi ekonomi masyarakat Jawa Tengah dinilai masih kuat dan terjaga.

Hal ini tercermin dari tingkat keyakinan konsumen yang tetap berada pada zona optimistis pada Mei 2026. Yang menandakan masyarakat masih merasakan kondisi ekonomi yang relatif baik serta memiliki harapan positif terhadap perkembangan ekonomi ke depan.

Berdasarkan hasil Survei Konsumen, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jawa Tengah pada Mei 2026 tercatat sebesar 116,05. Angka tersebut berada di atas level 100 yang menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Andi Reina Sari H dalam keterangan tertulis, Jumat, mengatakan optimisme konsumen masih ditopang oleh persepsi positif terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan saat ini.

“Optimisme konsumen terhadap perekonomian Jawa Tengah pada Mei 2026 tetap terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 116,05 yang berada pada level optimis atau di atas 100,” tuturnya.

Kondisi ekonomi masyarakat yang masih baik juga tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang mencapai 108,75. Capaian tersebut menunjukkan masyarakat masih menilai pendapatan rumah tangga, kesempatan kerja, dan tingkat konsumsi berada dalam kondisi yang cukup baik.

Menurut Andi, persepsi positif tersebut didukung oleh penghasilan masyarakat yang tetap terjaga, ketersediaan lapangan kerja yang masih memadai, serta konsumsi barang tahan lama yang tetap berlangsung.

Selain kondisi saat ini yang dinilai baik, masyarakat juga memiliki keyakinan kuat terhadap prospek ekonomi mendatang. Hal itu terlihat dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang mencapai 123,35 pada Mei 2026.

Angka tersebut menunjukkan masyarakat optimistis kondisi ekonomi dalam enam bulan ke depan akan semakin membaik, terutama dari sisi penghasilan, peluang kerja, dan aktivitas usaha.

Terjaganya optimisme masyarakat tersebut diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga tetap tumbuh dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sepanjang tahun 2026. (kar/ts)

10 Tahun Brexit, Begini Kondisi Ekonomi Inggris

Minggu, 21 Juni 2026 23:56 WIB

Penulis: Martin Bagya Kertiyasa

<https://www.beritasatu.com/internasional/3004411/10-tahun-brexit-begini-kondisi-ekonomi-inggris>

London, Beritasatu.com – Tepat satu dekade setelah Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa (European Union/EU), dampak Brexit masih membentuk lanskap politik dan ekonomi negara tersebut hingga kini.

Brexit, yang diputuskan melalui referendum pada 23 Juni 2016, menghasilkan 52% suara mendukung keluar dari Uni Eropa atau lebih dari 17 juta pemilih. Meski selisih suara tergolong tipis, keputusan itu menjadi salah satu perubahan paling besar bagi ekonomi dan masyarakat Inggris sejak Perang Dunia II.

Proses keluar Inggris dari Uni Eropa sendiri tidak berlangsung cepat. Negosiasi dan tahapan transisi memakan waktu hampir lima tahun sebelum benar-benar selesai.

Brexit lahir dari kombinasi kekecewaan terhadap Uni Eropa serta dampak krisis keuangan global 2008. Pendukungnya meyakini Inggris akan lebih mandiri dan fokus pada kebijakan domestik. Namun, pihak penentang memperingatkan risiko gangguan ekonomi dan turunnya posisi global Inggris.

Satu dekade setelah Brexit, banyak analis menilai ekonomi Inggris tidak mengalami lonjakan seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, aktivitas perdagangan dengan Uni Eropa menghadapi berbagai hambatan baru, meski tanpa tarif resmi.

Hambatan tersebut terutama berupa prosedur kepabeanan, sertifikasi perbatasan, hingga aturan visa yang lebih ketat. Uni Eropa tetap menjadi mitra dagang terbesar Inggris, sehingga dampak administratif tersebut terasa signifikan bagi pelaku usaha.

Sejumlah studi memperkirakan ekonomi Inggris kini 4% hingga 8% lebih kecil dibandingkan jika tetap berada di Uni Eropa. Kondisi ini juga berdampak pada produktivitas dan investasi jangka panjang.

“Brexit telah membuat ekonomi Inggris lebih kecil dibandingkan jika tetap di Uni Eropa,” ujar Jonathan Portes, profesor di King’s College London dilansir dari AP.

Ia menambahkan dampaknya tidak berupa kejatuhan tiba-tiba, melainkan perlambatan bertahap pada perdagangan dan investasi.

Dari sisi lain, pendukung Brexit menilai dampak jangka pendek tersebut adalah konsekuensi wajar dari penyesuaian kebijakan besar, dengan harapan kontrol kebijakan domestik yang lebih kuat dalam jangka panjang.

Salah satu janji utama Brexit adalah pengendalian imigrasi. Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris memang mengakhiri kebebasan mobilitas tenaga kerja dari kawasan tersebut.

Namun, meski migrasi dari Eropa menurun, arus migrasi dari negara non-Uni Eropa justru meningkat. Perubahan ini dipengaruhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan perawatan lansia.

Secara keseluruhan, pemerintah Inggris mencatat penurunan net migrasi dari lebih 900.000 pada 2023 menjadi 171.000 pada tahun lalu. Meski demikian, isu migrasi ilegal melalui jalur Laut Channel tetap menjadi perhatian publik.

Jumlah penyeberangan kapal kecil sempat mencapai 46.000 pada 2022 dan sekitar 41.000 pada tahun lalu. Kondisi ini memicu ketegangan politik dan protes di sejumlah wilayah, terutama terkait penempatan pencari suaka.

Dalam lanskap politik, Brexit turut mengubah peta kekuatan partai di Inggris. Partai Konservatif yang berkuasa selama 14 tahun akhirnya tersingkir pada 2024, sementara Partai Buruh juga menghadapi tekanan politik yang besar.

Partai Reform UK yang dipimpin Nigel Farage, salah satu tokoh utama kampanye Brexit, kini memperoleh peningkatan dukungan signifikan dalam berbagai survei.

Sementara itu, sejumlah survei Ipsos menunjukkan perubahan sikap publik. Sebanyak 52% responden kini menyatakan ingin kembali bergabung dengan Uni Eropa, dibandingkan 33% yang menolak.

Survei yang sama juga menunjukkan 48% responden menilai Brexit berjalan lebih buruk dari perkiraan, sementara hanya 9% yang menilai lebih baik.

Pemerintah Inggris saat ini mencoba menata ulang hubungan dengan Uni Eropa tanpa membatalkan hasil referendum. Perdana Menteri Keir Starmer mendorong pendekatan “reset” untuk memperbaiki kerja sama perdagangan.

Namun, ruang politik untuk kembali ke integrasi penuh seperti sebelumnya sangat terbatas. Sejumlah tokoh politik juga menegaskan tidak ada rencana untuk kembali bergabung ke Uni Eropa atau pasar tunggalnya.

“Keputusan referendum harus dihormati,” ujar Andy Burnham, salah satu figur politik yang disebut-sebut sebagai calon penerus kepemimpinan.

Dengan dinamika tersebut, Brexit masih menjadi isu politik dan ekonomi yang terus membentuk arah masa depan Inggris, satu dekade setelah keputusan bersejarah itu diambil.

IMF Ingatkan Risiko Fiskal meski Konflik Timur Tengah Mereda

Minggu, 21 Juni 2026 23:14 WIB

Penulis: Martin Bagya Kertiyasa

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3004399/imf-ingatan-risiko-fiskal-meski-konflik-timur-tengah-mereda>

Jakarta, Beritasatu.com – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengingatkan pemerintah di berbagai negara untuk tetap berhati-hati dalam mengelola kebijakan fiskal, meski ketegangan di Timur Tengah mulai menunjukkan tanda mereda.

IMF menilai sejumlah kebijakan subsidi dan pengendalian harga energi yang diterapkan selama periode konflik berpotensi membebani anggaran negara jika tidak segera disesuaikan ketika situasi kembali normal.

Dalam catatan terbarunya yang dikutip Minggu (21/6/2026), IMF menyebut banyak negara merespons lonjakan harga energi dan pangan akibat perang dengan kebijakan yang membutuhkan pembiayaan besar.

Konflik yang berlangsung lebih dari tiga bulan itu dinilai telah mempersempit ruang fiskal dan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menghadapi guncangan ekonomi berikutnya.

Lembaga tersebut mencatat berbagai negara berupaya melindungi masyarakat dan dunia usaha dari dampak kenaikan harga. Namun, evaluasi awal IMF menunjukkan banyak kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya tepat sasaran dan berisiko menimbulkan beban fiskal tinggi di tengah keterbatasan anggaran.

IMF juga menyoroti bahwa jika proses perdamaian menghasilkan normalisasi pasokan energi dan harga kembali ke tren historis, maka tantangan utama pemerintah adalah mengakhiri berbagai bentuk dukungan seperti subsidi secara bertahap.

Menurut IMF, hampir 900 kebijakan telah diterapkan di sekitar 170 negara sejak konflik dimulai, baik di negara maju maupun berkembang. Sebagian besar kebijakan tersebut berbentuk intervensi fiskal untuk menahan lonjakan harga energi agar tidak langsung menekan rumah tangga dan pelaku usaha.

Di Indonesia, kebijakan serupa tercermin dari upaya menjaga harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar selama fase awal konflik. Sementara itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamina baru dilakukan sekitar 100 hari setelah perang berlangsung, dengan kenaikan mulai berlaku pada 10 Juni 2026.

IMF menilai pola kebijakan tersebut mirip dengan respons global saat krisis energi 2022. Namun, tingkat risiko dan karakter gangguan energi di setiap negara berbeda, sehingga pendekatan kebijakan tidak selalu bisa diseragamkan.

Dari sisi fiskal, IMF menekankan bahwa kebijakan pengendalian harga memang bertujuan melindungi masyarakat dan pelaku usaha dari lonjakan biaya. Namun, jika terus dipertahankan, kebijakan tersebut dapat berubah menjadi beban jangka panjang bagi anggaran negara.

Subsidi yang awalnya bersifat sementara juga dinilai berisiko menjadi permanen apabila terus diperpanjang. Kondisi ini dapat meningkatkan tekanan fiskal jika harga energi bertahan tinggi dalam jangka waktu lama.

IMF menegaskan pemerintah pada akhirnya akan dihadapkan pada dua pilihan, yakni membiarkan harga mengikuti mekanisme pasar atau menanggung selisih biaya melalui anggaran negara. Banyak negara saat ini masih memilih menahan harga untuk meredam dampak ke masyarakat.

Meski demikian, IMF menilai langkah tersebut memiliki konsekuensi berupa meningkatnya biaya fiskal serta distorsi insentif, terutama jika pada akhirnya harga kembali normal.

Karena itu, lembaga tersebut merekomendasikan agar penyesuaian harga dilakukan secara bertahap dengan perlindungan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan.

IMF juga menekankan pentingnya peralihan menuju kebijakan yang lebih berkelanjutan, meski secara politik tidak selalu mudah diterapkan. Dalam kondisi ketidakpastian global, kesiapan fiskal dinilai sama pentingnya dengan respons cepat pemerintah.

“Prinsip utamanya adalah melindungi masyarakat, bukan mempertahankan harga,” demikian penegasan IMF dalam laporannya.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berpotensi Tertahan, Imbas Suku Bunga Tinggi

Minggu, 21 Juni 2026 06:15 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-berpotensi-tertahan-imbis-suku-bunga-tinggi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 100 basis poin (bps) sepanjang tahun 2026 berjalan diproyeksi akan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, ekonomi Indonesia diperkirakan tetap mampu tumbuh di atas 5% pada tahun ini.

Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Myrdal Gunarto, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,17%, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 5,22% saat BI Rate masih berada di level 5,50%.

"Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,17% pada tahun 2026 dan inflasi sebesar 3,09%," ujar Myrdal kepada Kontan, Jumat (19/6/2026).

Selain itu, inflasi juga diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran bank sentral. Myrdal memperkirakan tingkat inflasi tahun ini mencapai 3,09%, sehingga stabilitas harga tetap dapat terjaga di tengah pengetatan kebijakan moneter.

Di sektor perbankan, Myrdal memperkirakan pertumbuhan intermediasi akan berlangsung lebih moderat seiring kenaikan biaya dana dan suku bunga kredit. Pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan berada di bawah 9% pada tahun ini.

Meski demikian, sejumlah sektor usaha masih dinilai memiliki prospek pembiayaan yang kuat dan berpotensi menjadi penopang pertumbuhan kredit perbankan.

Sektor-sektor tersebut antara lain ketahanan pangan, transportasi, konstruksi, industri makanan dan minuman, energi, industri besi dan baja, kelapa sawit, serta properti residensial.

Sementara itu, Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan dampak kenaikan suku bunga terutama akan dirasakan melalui meningkatnya biaya dana, penyesuaian bunga kredit, serta sikap rumah tangga dan pelaku usaha yang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan konsumsi maupun investasi.

"Kenaikan BI Rate sebesar 100 bps sepanjang paruh pertama 2026 berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih moderat," kata Banjaran.

Menurutnya, meskipun kebijakan moneter yang lebih ketat berpotensi menahan aktivitas ekonomi, sejumlah faktor domestik masih mampu menjadi penyangga pertumbuhan pada tahun ini.

Konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, belanja pemerintah, serta kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan dinilai akan membantu menjaga momentum ekonomi.

Dengan kondisi tersebut, Banjaran memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berpeluang bertahan di sekitar level 5%. Namun, ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya menjadi semakin terbatas.

"Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia belum mengarah pada perlambatan tajam, tetapi momentum pertumbuhannya cenderung lebih tertahan," katanya.

Meski demikian, Banjaran mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diwaspadai ke depan. Risiko tersebut antara lain apabila suku bunga tinggi bertahan lebih lama dari perkiraan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah belum mereda, serta pertumbuhan kredit mulai melambat.

Menurut Banjaran, kombinasi faktor tersebut dapat berdampak negatif terhadap konsumsi masyarakat, investasi swasta, hingga ekspansi dunia usaha yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Hindari para Spekulan, BI Targetkan 98,1% Transaksi Valas Ber-Underlying Mulai Juli

Minggu, 21 Juni 2026 16:01 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-para-spekulan-bi-targetkan-981-transaksi-valas-ber-underlying-mulai-juli>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai kebijakan penurunan batas (threshold) transaksi valuta asing (valas) tanpa underlying efektif memperkuat kualitas pasar valas domestik sekaligus mengurangi ruang gerak spekulasi di pasar.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono mengatakan, kebijakan tersebut terbukti mendorong transaksi valas yang lebih mencerminkan kebutuhan ekonomi riil, sekaligus menekan transaksi yang tidak didukung aktivitas dasar atau nonesensial.

"Di Bank Indonesia kami melihat kebijakan itu baik," ujar Thomas belum lama ini.

Thomas menjelaskan, implementasi kebijakan penurunan threshold secara bertahap menunjukkan hasil yang signifikan.

Pada tahap pertama, saat batas transaksi tanpa underlying diturunkan dari US\$ 100.000 menjadi US\$ 50.000, rata-rata transaksi harian turun sekitar US\$ 16 juta.

Kemudian pada tahap kedua, penurunan dari US\$ 50.000 menjadi US\$ 25.000 kembali menekan rata-rata transaksi harian sebesar US\$ 9 juta.

Menurut Thomas, capaian tersebut menunjukkan bahwa pasar semakin bergerak ke arah transaksi yang berbasis kebutuhan riil, bukan spekulasi.

Untuk memperkuat tren tersebut, BI akan melanjutkan kebijakan dengan menurunkan threshold transaksi valas tanpa underlying menjadi US\$ 10.000 yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026.

“Dengan penurunan menjadi US\$ 10.000 efektif 1 Juli 2026, kami proyeksikan transaksi dengan underlying document akan meningkat menjadi 98,1% dari total transaksi valas,” kata Thomas.

Dengan dominasi transaksi ber-underlying yang semakin tinggi, BI berharap pasar valas domestik menjadi lebih transparan, efisien, dan stabil, sekaligus semakin menekan potensi transaksi spekulatif yang dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar rupiah.

Sebagai informasi, underlying document merupakan dokumen yang menunjukkan adanya kebutuhan riil dalam transaksi valas, seperti kegiatan ekspor-impor, pembayaran utang luar negeri, investasi, maupun transaksi bisnis lainnya.

Dokumen ini menjadi dasar pengawasan untuk memastikan transaksi valas benar-benar mencerminkan aktivitas ekonomi yang sah.

Ke depan, BI akan terus memantau implementasi kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar dan memperkuat ketahanan nilai tukar rupiah.

Kemenkeu Perkuat Pengawasan dan Pengelolaan Transfer ke Daerah Lewat Perdana

Minggu, 21 Juni 2026 15:19 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-perkuat-pengawasan-dan-pengelolaan-transfer-ke-daerah-lewat-perdana>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat pengelolaan dan pengawasan Transfer ke Daerah (TKD) melalui peluncuran fitur Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah (Perdana) pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu, Askolani mengatakan, kehadiran Perdana menjadi bagian dari transformasi tata kelola fiskal yang dilakukan Kemenkeu untuk memastikan penyaluran TKD semakin terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

"Melalui fitur ini, kebutuhan pendanaan, kegiatan prioritas, serta output pembangunan daerah dapat dipetakan secara lebih jelas sejak tahap perencanaan," ujar Askolani dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (21/6/2026).

Perdana merupakan hasil kolaborasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii).

Sistem ini mengintegrasikan proses bisnis, data, dan teknologi informasi guna memperkuat fungsi Kemenkeu dalam mengelola belanja negara, khususnya transfer ke daerah yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam APBN.

Melalui fitur tersebut, pemerintah dapat memetakan kebutuhan pembangunan daerah secara lebih rinci sehingga penggunaan dana transfer tidak hanya dilihat dari sisi penyaluran anggaran, tetapi juga dampak yang dihasilkan terhadap pembangunan.

Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan melalui TKD dapat ditelusuri kontribusinya terhadap output pembangunan, lokasi pelaksanaan program, kebutuhan yang dipenuhi, serta prioritas pembangunan yang didukung.

Peluncuran Perdana sekaligus menandai perubahan pendekatan dalam tata kelola transfer ke daerah.

Jika sebelumnya pengelolaan TKD lebih banyak berfokus pada aspek alokasi, penyaluran, dan kepatuhan administrasi, kini pemerintah juga menekankan kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, menentukan prioritas, serta mengukur hasil yang dicapai.

Selain memperkuat fungsi pengawasan, Perdana juga diharapkan dapat mendukung standardisasi tata kelola TKD.

Melalui penyederhanaan kebijakan dan standardisasi output, Kemenkeu berupaya membangun basis data yang lebih kuat untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan transfer ke daerah.

Askolani menegaskan, data yang dihimpun melalui Perdana tidak dimaksudkan sebagai dasar pengajuan ataupun jaminan alokasi anggaran bagi daerah.

Data tersebut berfungsi sebagai sumber informasi strategis untuk memetakan kebutuhan pendanaan kegiatan prioritas daerah serta mendukung proses perumusan kebijakan transfer ke daerah yang lebih tepat sasaran.

"Kehadiran Perdana menjadi fondasi penting dalam transformasi tata kelola transfer ke daerah yang lebih kredibel, akuntabel, dan berbasis data," ujarnya.

Ke depan, Kementerian Keuangan berharap Perdana dapat meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal sekaligus memastikan dana transfer yang disalurkan kepada daerah semakin efektif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Bank Indonesia Waspadai Risiko Inflasi dari El Nino hingga Imported Inflation

Minggu, 21 Juni 2026 15:16 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-waspadai-risiko-inflasi-dari-el-nino-hingga-imported-inflation>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mewaspadai sejumlah faktor yang berpotensi mendorong inflasi dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari rambatan kenaikan harga global atau imported inflation hingga risiko gangguan cuaca akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua tahun ini.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan, meskipun inflasi saat ini masih berada dalam rentang sasaran, tekanan dari faktor eksternal dan cuaca perlu diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas harga.

"Faktor risiko inflasi yang menjadi perhatian adalah rambatan global, yaitu harga minyak dan komoditas ke dalam negeri atau imported inflation. Yang kedua, ini belum terjadi tetapi kita sudah alert untuk menghadapinya, yaitu gangguan cuaca," ujar Aida dalam konferensi pers, belum lama ini.

Menurut Aida, dampak imported inflation dapat terlihat pada kelompok administered prices atau harga yang diatur pemerintah, terutama setelah adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Ia memperkirakan perubahan harga energi tersebut memberikan kontribusi sekitar 0,25% terhadap inflasi.

Selain itu, tekanan juga dapat muncul pada kelompok volatile food atau komoditas pangan bergejolak. Namun, risiko dari sisi pupuk dinilai masih terbatas karena kapasitas produksi domestik masih mencukupi.

Sementara itu, risiko cuaca menjadi perhatian khusus seiring meningkatnya potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung mulai akhir Juni hingga Oktober atau November 2026. Kendati demikian, Aida menegaskan bahwa berbagai langkah antisipasi telah disiapkan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

"Proyeksi inflasi memang mulai mengalami peningkatan, tetapi seluruhnya masih berada dalam target inflasi 2,5% plus minus 1%. Jadi paling tinggi 3,5% dan itu masih dalam target," katanya.

Senada, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali menyebut inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08% secara tahunan (year on year/yoy), masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia. Namun, inflasi kelompok volatile food mencapai 6,24% yoy dan menjadi perhatian utama karena dampaknya paling dirasakan masyarakat di daerah.

"Kami mencermati sejumlah faktor risiko yang dapat memberikan tekanan inflasi ke depan, yaitu imported inflation dan faktor cuaca," ujar Ricky.

Berdasarkan pemantauan Bank Indonesia, sebanyak 25 provinsi masih mencatat inflasi dalam rentang sasaran pada Mei 2026. Meski demikian, terdapat 13 provinsi yang mulai menunjukkan tren kenaikan inflasi dan mendapat perhatian khusus, antara lain Papua Barat dengan inflasi 5,94%, Aceh 5,12%, dan Kalimantan Tengah 4,55%.

Ricky menjelaskan, tekanan inflasi tersebut telah mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Risiko ini berpotensi meningkat apabila El Nino menekan produktivitas pertanian, terutama di wilayah Indonesia Timur.

"Intensitas El Nino diperkirakan meningkat dan dapat menurunkan produktivitas hortikultura di beberapa wilayah, khususnya kawasan Indonesia Timur," jelasnya.

Untuk meredam dampak tersebut, Bank Indonesia bersama 46 kantor perwakilan di daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ricky menyebut upaya tersebut dilakukan antara lain melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) guna menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan menstabilkan harga pangan.

Di sisi kebijakan, BI juga menegaskan akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi melalui bauran kebijakan moneter yang konsisten. Sementara itu, kebijakan makroprudensial, sistem

pembayaran, dan dukungan terhadap sektor riil akan terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Aida menambahkan, BI telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain menjaga likuiditas perekonomian, memberikan berbagai insentif likuiditas makroprudensial (KLM), melonggarkan instrumen makroprudensial, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, serta memperkuat pengembangan UMKM dan ekonomi inklusif.

Dengan berbagai langkah tersebut, BI optimistis risiko inflasi akibat gejolak global maupun El Nino dapat dikelola sehingga inflasi tetap terjaga dalam kisaran target sepanjang tahun ini.

Waspadai Dampak El Nino, Inflasi Berpotensi Tembus Level 4,5% di 2026

Minggu, 21 Juni 2026 15:45 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/waspadai-dampak-el-nino-inflasi-berpotensi-tembus-level-45-di-2026>

KONTAN.CO.OID-JAKARTA. Fenomena cuaca ekstrem el nino dikhawatirkan dapat mengerek inflasi perlu jadi perhatian pemerintah.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan dampak el nino dapat mendorong laju inflasi domestik meningkat di kisaran 4% hingga 4,5% pada akhir 2026.

"Inflasi diperkirakan akan mengarah ke 4%-4,5% di akhir tahun 2026," ujar David kepada Kontan, Minggu (21/6/2026).

Sebagai informasi, el nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mengubah pola cuaca global.

Bagi Indonesia, el nino umumnya menyebabkan curah hujan berkurang, musim kemarau menjadi lebih panjang, serta meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah sentra pertanian.

Sejumlah lembaga meteorologi internasional memperkirakan El Nino mulai berkembang pada akhir Juni hingga Juli 2026 dan berpotensi berlangsung hingga Oktober atau November.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu produksi pertanian dan pasokan pangan domestik.

Menurut David, dampak el nino terhadap sektor pangan berpotensi menjadi sumber utama tekanan inflasi pada paruh kedua tahun ini.

Produksi sejumlah komoditas pangan diperkirakan menurun akibat berkurangnya pasokan air dan meningkatnya risiko gagal panen.

Ia menilai kenaikan harga dapat terjadi pada berbagai komoditas strategis, mulai dari beras, gula, hingga produk peternakan seperti ayam dan telur.

Selain itu, komoditas hortikultura dan perkebunan seperti cabai, bawang merah, dan jagung juga berpotensi mengalami lonjakan harga.

"Dampak El Nino akan mengerek harga bahan pokok seperti beras, gula, ternak seperti ayam dan telur, serta hasil perkebunan seperti cabai, bawang, dan jagung," kata David.

Untuk memitigasi risiko tersebut, David meminta pemerintah memastikan kelancaran distribusi bahan pangan serta menjaga kecukupan pasokan di pasar. Langkah antisipatif dinilai penting agar kenaikan harga tidak semakin menekan daya beli masyarakat.

"Pemerintah harus memastikan distribusi barang dan jika diperlukan melakukan impor bahan-bahan pokok tersebut agar dapat dipastikan pasokannya," ujarnya.

Peringatan tersebut sejalan dengan kekhawatiran Bank Indonesia yang sebelumnya menyebut fenomena El Nino sebagai salah satu faktor risiko inflasi pada semester II-2026.

Selain gangguan cuaca, tekanan inflasi juga berpotensi berasal dari imported inflation atau rambatan kenaikan harga energi dan komoditas global ke dalam negeri.

"Faktor risiko inflasi yang menjadi perhatian adalah rambatan global, yaitu harga minyak dan komoditas ke dalam negeri atau imported inflation. Yang kedua, ini belum terjadi tetapi kita sudah alert untuk menghadapinya, yaitu gangguan cuaca," ujar Deputy Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman belum lama ini.

Dengan potensi tekanan dari sisi pasokan pangan dan gejolak harga global, inflasi pada akhir tahun diperkirakan akan bergerak lebih tinggi dibandingkan level saat ini per Mei yang sebesar 3,08% yoy.

Karena itu, koordinasi pemerintah, Bank Indonesia, serta pemerintah daerah menjadi krusial untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang puncak dampak El Nino.

Ekonom Celios Wanti-Wanti Patriot-Merah Putih Bond Jadi Surga Dana Bermasalah

Minggu, 21 Juni 2026 19:35 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-celios-wanti-wanti-patriot-merah-putih-bond-jadi-surga-dana-bermasalah>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mewanti-wanti potensi penyalahgunaan patriot bond dan merah putih bond yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurutnya, perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pembeli instrumen tersebut berisiko menjadikannya sebagai tempat berlindung bagi dana yang berasal dari sumber bermasalah.

Bhima menilai ketentuan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) berpotensi menciptakan insentif yang keliru di pasar.

Ia khawatir minat investor terhadap patriot-merah Putih bond tidak lagi didorong oleh tingkat imbal hasil atau prospek investasi, melainkan oleh jaminan perlindungan hukum yang melekat pada instrumen tersebut.

"Khawatir karena tidak ada yang bisa menelusuri sumber harta untuk pembelian obligasi ini, maka daya tawar dari obligasi ini bukan pada imbal hasilnya, tetapi dari asal-usul hartanya," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (21/6/2026).

Bhima menilai kondisi tersebut dapat memicu lonjakan minat investasi dari pihak-pihak yang ingin memperoleh perlindungan atas dana yang dimilikinya. Bahkan, menurutnya, tidak tertutup kemungkinan dana hasil tindak pidana masuk ke dalam instrumen tersebut.

"Kalau uang dari hasil korupsi ataupun cuci uang untuk beli bond, ya bisa saja terjadi kalau begini," katanya.

Bhima berpandangan bahwa aturan tersebut pada praktiknya lebih banyak melindungi pembeli surat utang dibandingkan instrumen investasinya.

Oleh karena itu, ia menilai risiko yang muncul bukan hanya terkait tata kelola investasi, tetapi juga kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

"Saya kira ini bukan memberikan perlindungan terhadap obligasi Patriot Bond atau payung hukumnya, tetapi lebih ke arah memberikan perlindungan kepada si pembelinya yang dikhawatirkan uangnya berasal dari sumber kejahatan," imbuh Bhima.

Selain berpotensi membuka celah pencucian uang, Bhima mengingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di mata investor global.

Menurutnya, berbagai standar internasional terkait anti pencucian uang dan transparansi sumber dana bisa dipertanyakan apabila perlindungan hukum diberikan terlalu luas.

"Ini bisa menurunkan kepercayaan bagi investor luar negeri untuk berinvestasi atau bertransaksi dengan Danantara, karena banyak aturan soal anti money laundry dan lain-lain jadi tersingkirkan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi investor yang membeli surat utang khusus berupa patriot bond dan merah putih bond yang diterbitkan Danantara.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, pemerintah menambahkan Pasal 50A yang mengatur penerbitan surat utang oleh Danantara, termasuk surat utang khusus berupa patriot bond dan merah putih bond.

Pasal 50A ayat (5) menyebut negara menjamin dan melindungi pembelian surat utang khusus dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata.

Selanjutnya, Pasal 50A ayat (6) mengatur bahwa data dan informasi dari kegiatan pembelian surat utang khusus tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti hukum di pengadilan. Perlindungan tersebut berlaku untuk transaksi di pasar primer sebagaimana diatur dalam Pasal 50A ayat (7).

Aturan baru itu juga memperluas cakupan investor. Pasal 50A ayat (9) menyebut pembeli patriot bond dan merah putih bond dapat berasal dari wajib pajak yang pernah mengikuti program tax amnesty maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

PT Pakerin Berpotensi PHK 2.500 Pekerja, Said Iqbal Minta Pemerintah Turun Tangan

Minggu, 21 Juni 2026 15:24 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/pt-pakerin-berpotensi-phk-2500-pekerja-said-iqbal-minta-pemerintah-turun-tangan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) disebut tengah mengalami kesulitan operasional hingga berpotensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 2.500 pekerjanya.

Hal itu ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasehat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

"Saya bertemu langsung dengan para pekerja PT Pakerin, melakukan tanya jawab, dialog dan ditemukan ada ancaman ada potensi 2.500 pekerja akan di PHK," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (21/6/2026).

Said mengatakan pabrik PT Pakerin saat ini mengalami kesulitan operasional karena modal yang dimiliki perusahaan ini tersimpan di Bank Prima di Jawa Timur.

Sementara, bank ini tengah dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Uang Pakerin itu Rp 800 miliar sampai 1 triliun yang di bank dan otomatis sekarang berada pada pengawasan OJK dan tidak bisa digunakan. Akibatnya produksi tidak bisa jalan," jelas Said.

Imbas masalah ini, menurut Iqbal saat ini pabrik PT Pakerin tutup sebesar 80% dengan jumlah pekerja yang tersisa hanya 500 orang.

Menurut Said, perusahaan sudah meminta keringanan kepada LPS untuk menurunkan modal sebesar Rp 250 miliar agar operasional tetap berjalan dan menyelamatkan para pekerja.

Opsi lain, uang ini digunakan untuk memberikan pesangon kepada pekerja yang sudah dirumahkan.

Hanya saja, kedua opsi itu mendapatkan penolakan dari LPS.

Untuk itu, Said meminta kepada pemerintah untuk ikut turut turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini.

Pihaknya juga akan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI agar bisa berdiskusi bersama dengan LPS agar hak-hak pekerja bisa terbayarkan jika ada PHK

"Atau pilihan yang pertama nanti ada suntikan modalnya ke PT Pakerin untuk operasional dan tidak ada PHK bagi pekerja," tutup Said.

UMKM jadi fondasi ekonomi, Ahmad Luthfi tekankan penguatan pembiayaan

Minggu, 21 Juni 2026 14:48 WIB

Pewarta: Aris Wasita, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/635831/umkm-jadi-fondasi-ekonomi-ahmad-luthfi-tekankan-penguatan-pembiayaan>

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada Bank Jateng memperkuat permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya mengingat sektor tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi perekonomian daerah.

Hal itu disampaikan acara Rapat Strategi dan Kebijakan Semester II Tahun 2026 Bank Jateng di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (19/6).

Apalagi, kata dia, jumlah UMKM di provinsi ini lebih dari empat juta pelaku usaha. Karenanya, akses permodalannya perlu dipermudah. Caranya dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.

“Kenapa saya tekankan ekonomi mikro? Karena di Jawa Tengah jumlahnya besar dan berada di kabupaten/kota. Maka akses permodalan harus kita permudah,” kata dia.

Dengan kemudahan itu, lanjut Luthfi, harapannya pelaku usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil, kemudian berkembang menjadi usaha menengah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko mengatakan rapat tersebut digelar untuk merumuskan langkah perusahaan menghadapi Semester II Tahun 2026. Menurutnya, dinamika geopolitik, kondisi fiskal, dan persaingan industri perbankan menuntut Bank Jateng menyiapkan strategi yang lebih adaptif.

“Kita perlu merumuskan kebijakan baru beserta turunannya, program-program yang harus dituntaskan oleh para kepala cabang. Karena itu strategi yang kita lakukan harus berbeda di Semester II Tahun 2026,” kata Bambang.

Ia menjelaskan Bank Jateng telah menetapkan empat kebijakan utama, yakni penguatan permodalan dan tata kelola, transformasi digital, peningkatan kompetensi dan produktivitas karyawan, serta peningkatan skala bisnis.

Dengan kebijakan itu, harapannya mampu meningkatkan skala bisnis, terutama penurunan non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah, peningkatan kredit berkualitas, dan lainnya.

Hingga Maret 2026, Bank Jateng mencatatkan aset sebesar Rp93,97 triliun, dana pihak ketiga Rp75,80 triliun, dan penyaluran kredit Rp63,66 triliun. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Bank Jateng berada pada level 22 persen.

Peluang ekspansi Bank Jateng juga ditopang kondisi ekonomi Jawa Tengah yang masih tumbuh positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,89 persen, lebih tinggi dibanding nasional sebesar 5,61 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,24 persen.

Dalam rapat tersebut juga dihadiri jajaran Komisaris dan Direksi Bank Jateng, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno selaku Komisaris Bank Jateng, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Jateng Urip Sihabuddin, Kepala Biro BUMD dan BLUD Setda Jateng Agus Prasutio, serta para pimpinan cabang dan kepala divisi Bank Jateng.

Merti Pasar Cawas 2026 Meriah, Dorong Pelestarian Budaya dan Penguatan Ekonomi Rakyat

Minggu, 21 Juni 2026

Sino

<https://interestnews.or.id/2026/06/merti-pasar-cawas-2026-meriah-dorong-pelestarian-budaya-dan-penguatan-ekonomi-rakyat/>

INTERESTNEWS, — KLATEN – Tradisi Merti Pasar kembali digelar di Pasar Cawas, Kabupaten Klaten, Sabtu (20/06/2026) sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus upaya menggerakkan perekonomian masyarakat. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari pedagang maupun masyarakat sekitar.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Fraksi PDI Perjuangan, Kadarwati, mengapresiasi penyelenggaraan Merti Pasar yang dinilai mampu menghadirkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana yang efektif untuk menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, mulai anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, sekaligus menjaga eksistensi pasar tradisional di tengah perkembangan zaman.

“Kegiatan ini sangat luar biasa dan positif karena mampu menarik perhatian masyarakat. Kegiatan seperti ini patut terus dilanjutkan karena berkaitan dengan pelestarian pasar tradisional yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Kadarwati menegaskan, pasar tradisional memiliki peran penting sebagai pusat perputaran ekonomi rakyat sehingga keberadaannya perlu terus didukung dan dikembangkan.

“Pasar tradisional perlu terus didorong agar tetap hidup dan berkembang. Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami berharap rezeki para pedagang semakin lancar, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, dan pasar tradisional tetap menjadi pusat perputaran ekonomi rakyat,” katanya.

Selain berdampak pada sektor ekonomi, Merti Pasar juga dinilai mampu memperkuat nilai-nilai budaya dan gotong royong yang telah menjadi karakter masyarakat Indonesia.

“Ini juga menjadi sarana melestarikan budaya gotong royong. Karena itu diperlukan dukungan bersama dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, serta seluruh elemen masyarakat agar pasar tradisional tetap eksis dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Warung Wengi (Wangi), Riyanto, menjelaskan bahwa Merti Pasar 2026 merupakan kelanjutan dari tradisi yang telah dilaksanakan secara rutin pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kecamatan Cawas, para pedagang pasar, serta masyarakat sekitar.

“Kegiatan Merti Pasar tahun 2026 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kecamatan Cawas, keluarga besar pedagang pasar, serta masyarakat sekitar,” ujarnya.

Riyanto berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga mampu mempererat hubungan sosial antara pedagang dan masyarakat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini hubungan antara pedagang dan masyarakat semakin erat, kebersamaan semakin kuat, serta pasar tradisional semakin ramai dikunjungi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang dan masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Melalui penyelenggaraan Merti Pasar 2026, masyarakat berharap pasar tradisional tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus ruang pelestarian budaya lokal yang terus hidup dan berkembang di tengah modernisasi.

Hong Kong Berupaya Perluas Investasi dan Akses IPO Bagi Investor China

Senin, 22 Juni 2026 10:25 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/hong-kong-berupaya-perluas-investasi-dan-akses-ipo-bagi-investor-china>

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Hong Kong sedang berdiskusi dengan otoritas China untuk memperluas saluran investasi lintas batas dan memberikan akses kepada investor China untuk penawaran umum perdana (IPO) lokal,

Menurut pernyataan Menteri Keuangan Paul Chan dalam wawancara dengan China Daily yang dilansir Reuters, Senin (22/6/2026), proposal yang sedang dibahas dengan China daratan termasuk menurunkan ambang batas masuk bagi investor yang memenuhi syarat, meningkatkan kuota investasi ke selatan di bawah program perdagangan lintas batas, dan memperluas jangkauan produk yang memenuhi syarat.

Regulator juga sedang mengevaluasi rencana untuk mengizinkan investor ritel China untuk berlangganan IPO Hong Kong, kata Chan kepada surat kabar Wen Wei Po dalam wawancara terpisah, yang dikutip oleh Bloomberg News.

Diskusi ini muncul ketika Beijing memperketat pengawasan terhadap aliran modal ilegal di luar negeri, mengalihkan aktivitas ke saluran yang diatur, sebuah langkah yang diperkirakan akan membebani bisnis menguntungkan bank, perusahaan asuransi, dan pengelola kekayaan di Hong Kong yang bergantung pada klien dari China daratan.

Analisis dan eksekutif keuangan mengatakan langkah ini dalam jangka pendek dapat membebani aliran uang ke Hong Kong, tempat investasi luar negeri pilihan bagi individu China, dan melemahkan posisi kota tersebut sebagai pusat keuangan luar negeri.

Won Korea Selatan dan Baht Thailand Pimpin Pelemahan Mata Uang Asia Senin (22/6)

Senin, 22 Juni 2026 09:36 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/won-korea-selatan-dan-baht-thailand-pimpin-pelemahan-mata-uang-asia-senin-226>

KONTAN.CO.ID - Mata uang Asia melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (22/6/2026), dengan won Korea Selatan dan baht Thailand menjadi yang paling tertekan di tengah penguatan dolar dan meningkatnya ketidakpastian global terkait pembicaraan damai Amerika Serikat-Iran.

Won Korea Selatan tercatat melemah 0,41% menjadi 1.537,3 per dolar, sementara baht Thailand turun 0,30% ke level 32,925 per dolar.

Tekanan juga terjadi pada sebagian besar mata uang kawasan lain, termasuk yen Jepang yang melemah 0,17% ke 161,55, serta dolar Singapura yang turun 0,12%.

Rupiah Indonesia juga ikut melemah 0,17% ke level 17.805 per dolar, sementara peso Filipina turun 0,28% menjadi 60,835.

Ringggit Malaysia tercatat melemah 0,24% ke 4,144 per dolar. Yuan China relatif stabil dengan pelemahan tipis 0,02% ke 6,772.

Di Asia Selatan, rupee India tercatat stagnan di level 94,32 per dolar.

Secara keseluruhan, tekanan pada mata uang Asia terjadi di tengah dominasi dolar AS yang masih kuat, didorong ekspektasi kebijakan moneter ketat Federal Reserve serta ketidakpastian geopolitik yang terus membayangi pasar keuangan global.

Dalam periode tahun berjalan 2026, sebagian besar mata uang Asia masih berada di bawah tekanan terhadap dolar.

Won Korea mencatat pelemahan terdalam sebesar 6,36%, diikuti rupiah Indonesia yang turun 6,37% dan baht Thailand yang melemah 4,48%. Yen Jepang juga terkoreksi 3,03% sepanjang tahun berjalan.

Sementara itu, yuan China justru mencatat penguatan 3,19% terhadap dolar, menjadi satu-satunya mata uang utama Asia yang masih berada di zona positif pada periode tersebut.

China Tahan Suku Bunga Acuan Pinjaman, LPR Tetap di Level Terendah

Senin, 22 Juni 2026 08:36 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-tahan-suku-bunga-acuan-pinjaman-lpr-tetap-di-level-terendah>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral China mempertahankan suku bunga acuan pinjaman atau Loan Prime Rate (LPR) pada Juni 2026, sesuai dengan ekspektasi pasar.

Mengutip Reuters, Senin (22/6), suku bunga LPR tenor satu tahun tetap dipertahankan di level 3,00%, sementara LPR tenor lima tahun juga tidak berubah di level 3,50%.

Keputusan tersebut menandai bulan ke-13 berturut-turut China mempertahankan suku bunga acuan pinjaman tanpa perubahan.

Dalam survei Reuters terhadap 30 pelaku pasar yang dilakukan pekan lalu, seluruh responden memperkirakan tidak akan ada perubahan pada kedua tenor LPR tersebut.

Sebagai informasi, LPR tenor satu tahun menjadi acuan utama bagi sebagian besar pinjaman baru maupun pinjaman yang masih berjalan di China.

Sementara itu, LPR tenor lima tahun menjadi referensi utama dalam penentuan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR).

Langkah mempertahankan LPR mencerminkan sikap hati-hati otoritas moneter China dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan, termasuk perlambatan sektor properti, tekanan deflasi, dan ketidakpastian ekonomi global.

Pasar sebelumnya telah memperkirakan bank sentral China akan menahan suku bunga acuan setelah serangkaian kebijakan pelonggaran moneter yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Dengan tidak adanya perubahan pada LPR bulan ini, pelaku pasar akan mencermati langkah kebijakan berikutnya dari otoritas China guna mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

Inggris Akan Kucurkan Investasi US\$ 66 Juta untuk Mineral Penting, Demi Kurangi Impor

Senin, 22 Juni 2026 06:45 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/inggris-akan-kucurkan-investasi-us-66-juta-untuk-mineral-penting-demi-kurangi-impor>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Inggris akan menginvestasikan £50 juta (US\$ 66 juta) untuk meningkatkan produksi mineral penting dalam negeri.

Mengutip Reuters, Senin (22/6/2026), Pemerintah Inggris mengatakan, upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan global yang terkonsentrasi dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Pendanaan tersebut akan mendukung proyek-proyek di bidang ekstraksi, pengolahan, dan daur ulang, yang bertujuan untuk mengamankan bahan-bahan yang digunakan dalam produk mulai dari ponsel pintar dan lemari es hingga baterai kendaraan listrik.

Langkah ini didasarkan pada lebih dari £200 juta yang telah dikucurkan ke sektor tersebut.

Menteri Perindustrian Chris McDonald dijadwalkan meluncurkan program tersebut selama kunjungannya ke pusat penelitian industri di timur laut Inggris, tempat perusahaan-perusahaan mengembangkan teknologi untuk pemulihan dan pengolahan logam.

Inggris meningkatkan upaya untuk mengamankan pasokan mineral penting karena permintaan meningkat dan Tiongkok mempertahankan posisi dominan, yang menyumbang sekitar 70% penambangan logam tanah jarang dan 90% pemurnian.

"Mineral penting sangat vital bagi keamanan nasional kita," kata McDonald.

Kemajuan terbaru termasuk pembukaan pabrik magnet logam tanah jarang komersial pertama di Inggris dalam 25 tahun, yang dioperasikan oleh unit HyProMag milik Mkango Resources di Birmingham, yang menggunakan bahan daur ulang untuk menghasilkan magnet untuk motor listrik dan teknologi lainnya.

Inggris juga berupaya mendiversifikasi akses melalui kemitraan dengan sekutu termasuk Amerika Serikat dan Korea Selatan, dengan fokus pada kolaborasi dalam rantai pasokan, kapasitas pengolahan, dan aliran investasi.

Pendanaan baru ini akan dibagi menjadi tiga pilar, termasuk 20 juta poundsterling untuk pusat magnet tanah jarang, 25 juta poundsterling untuk program akselerator guna membantu meningkatkan skala proyek, dan hingga 5 juta poundsterling untuk platform guna mengumpulkan permintaan industri dan membuka investasi swasta.

(\$1 = 0,7564 poundsterling)

Jepang Ubah Strategi Komunikasi, Pasar Waspadai Intervensi Yen Mendadak

Senin, 22 Juni 2026 14:23 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-ubah-strategi-komunikasi-pasar-waspadai-intervensi-yen-mendadak>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Otoritas keuangan Jepang membuat pasar terus menebak-nebak kemungkinan intervensi di pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar yen yang terus melemah.

Berbeda dari biasanya, pemerintah kini dinilai sengaja mengurangi sinyal-sinyal tegas kepada pasar agar intervensi berikutnya bisa memberikan dampak yang lebih besar.

Pada Senin (22/6/2026), Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama hanya menyatakan pemerintah akan merespons secara tepat setiap saat terhadap pergerakan nilai tukar.

Pernyataan tersebut tergolong normatif dan jauh lebih lunak dibandingkan sejumlah komentar sebelumnya yang secara terbuka mengisyaratkan kesiapan pemerintah untuk melakukan intervensi.

Yen pada perdagangan Senin melemah ke level 161,7 per dolar Amerika Serikat (AS), mendekati titik terendah dalam dua tahun yang tercapai pekan lalu.

Jika menembus level 161,96 per dolar AS, mata uang Jepang itu akan menyentuh posisi terlemahnya sejak 1986.

Pelaku pasar kini menunggu apakah diplomat mata uang utama Jepang, Atsushi Mimura, akan memberikan komentar.

Tidak seperti Menteri Keuangan yang rutin menggelar konferensi pers, pernyataan Mimura relatif jarang sehingga sering dianggap sebagai sinyal kebijakan yang lebih kuat.

Mimura sendiri belum berbicara kepada publik sejak awal Mei, tak lama setelah Jepang melakukan intervensi dengan menjual dolar AS untuk mendukung yen, yang menjadi aksi pertama dalam hampir dua tahun terakhir.

Beberapa jam sebelum intervensi tersebut, Mimura sempat memperingatkan bahwa waktu untuk mengambil tindakan tegas sudah semakin dekat dan menyebutnya sebagai peringatan terakhir bagi pasar.

Dua sumber pemerintah Jepang mengatakan peringatan yang disampaikan Mimura pada akhir April lalu masih berlaku hingga saat ini. Artinya, peluang intervensi mendadak tetap terbuka meskipun pejabat pemerintah tidak lagi memberikan peringatan keras kepada pasar.

Analisis menilai perubahan pola komunikasi ini bukan tanpa alasan.

Pada intervensi sebelumnya, sinyal yang terlalu jelas memberi kesempatan bagi spekulasi untuk mengurangi posisi jual yen sebelum pemerintah bertindak, sehingga efektivitas intervensi menjadi berkurang.

"Sebagian pelaku spekulatif kemungkinan berhasil keluar tanpa mengalami kerugian. Karena itu, intervensi berikutnya kemungkinan akan dilakukan semaksimal mungkin secara mengejutkan," kata Shota Ryu, strategist valuta asing di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Menurutnya, meski komentar pejabat pemerintah saat ini tidak menunjukkan urgensi tinggi, pasar tetap berhati-hati karena risiko intervensi sewaktu-waktu masih sangat besar.

Data Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menunjukkan posisi spekulatif net short terhadap yen meningkat menjadi 145.818 kontrak pada pekan lalu, tertinggi sejak Juli 2024. Kondisi ini mencerminkan semakin banyak investor yang bertaruh yen akan terus melemah.

Yuji Saito, Executive Advisor SBI FX Trade, mengatakan ekspektasi kenaikan suku bunga AS serta meningkatnya ketidakpastian di Timur Tengah yang mendorong harga minyak naik membuat investor semakin enggan melepas kepemilikan dolar AS.

Menurutnya, kondisi tersebut justru dapat memperbesar dampak intervensi pemerintah Jepang jika dilakukan dalam waktu dekat, karena posisi pasar saat ini sudah sangat condong terhadap penguatan dolar.

Pekan lalu, yen sempat jatuh hingga 161,8 per dolar AS, level terendah sejak Juli 2024 dan menghapus seluruh penguatan yang sempat tercipta setelah intervensi pemerintah pada akhir April dan awal Mei.

Dalam periode tersebut, Tokyo menggelontorkan dana rekor sebesar 11,7 triliun yen atau sekitar US\$72,4 miliar untuk menstabilkan mata uangnya.

Pelemahan yen yang berkepanjangan kini menjadi masalah serius bagi Jepang karena meningkatkan biaya impor dan memperkuat tekanan inflasi. Kenaikan harga energi akibat ketegangan di Timur Tengah juga memperburuk situasi.

Wakil Gubernur Ryozi Himino mengatakan inflasi berpotensi melampaui target 2% yang ditetapkan Bank of Japan. Ia kembali mengingatkan risiko jika bank sentral terlambat menaikkan suku bunga di tengah tekanan harga yang terus meningkat.

Kondisi tersebut membuat pasar kini tidak hanya memperhatikan arah kebijakan suku bunga Jepang, tetapi juga semakin waspada terhadap kemungkinan intervensi mendadak yang dapat mengguncang pasar valuta asing kapan saja.

PM Bangladesh Minta Malaysia Buka Kembali Pasar Tenaga Kerja Bagi Pekerja Bangladesh

Senin, 22 Juni 2026 11:46 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/pm-bangladesh-minta-malaysia-buka-kembali-pasar-tenaga-kerja-bagi-pekerja-bangladesh>

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Perdana Menteri Bangladesh Tarique Rahman meminta rekan sejawatnya dari Malaysia untuk mempertimbangkan pembukaan kembali pasar tenaga kerja bagi pekerja migran Bangladesh, karena para pemimpin menyatakan keprihatinan atas masalah eksploitasi pekerja asing yang telah berlangsung lama.

Mengutip Reuters, Senin (22/6/2026), Malaysia telah menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Bangladesh, yang kiriman uangnya merupakan sumber devisa yang sangat penting bagi negara Asia Selatan tersebut.

Namun, Kuala Lumpur telah membatasi perekrutan pekerja dari Bangladesh sejak tahun 2024 di tengah laporan tentang perbudakan utang dan kerja paksa, dengan para pekerja menanggung utang besar untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia.

Ratusan pekerja terlantar pada tahun 2023, setelah tiba di Malaysia karena menemukan bahwa pekerjaan yang dijanjikan kepada mereka oleh agen perekrutan tidak ada, sehingga mereka terpaksa mencari pekerjaan secara ilegal dan membuat mereka berisiko ditahan dan dideportasi.

"Saya juga mengangkat isu-isu terkait regularisasi pekerja ilegal dan repatriasi warga Bangladesh yang ditahan jika memungkinkan," kata Rahman kepada wartawan selama kunjungannya ke Malaysia di mana ia bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Anwar mengatakan kedua negara sepakat untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan transparansi dalam perekrutan pekerja dan melindungi kesejahteraan mereka.

"Penggunaan terus-menerus pekerja yang dieksploitasi dan diperlakukan buruk... semata-mata untuk keuntungan pribadi perusahaan tidak dapat ditoleransi," katanya.

Anwar dan Rahman juga menyaksikan pertukaran beberapa perjanjian, termasuk kerja sama dalam promosi investasi, kerja sama budaya, dan kontra-terorisme, dan kedua negara juga berjanji untuk melanjutkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas.

Rahman sedang melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sejak menjabat, karena Bangladesh berupaya menarik investasi, meningkatkan lapangan kerja di luar negeri, dan memperkuat hubungan dengan mitra Asia.

Ia dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke China selanjutnya untuk kunjungan tiga hari atas undangan Perdana Menteri China Li Qiang.

Strategi Investasi Jepang hingga 2040, Peluang Ada di AI, Chip, dan Robotika

Senin, 22 Juni 2026 07:44 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

<https://internasional.kontan.co.id/news/strategi-investasi-jepang-hingga-2040-peluang-ada-di-ai-chip-dan-robotika>

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Jepang dikabarkan tengah menyiapkan target investasi publik dan swasta senilai 370 triliun yen atau sekitar Rp 40.811 triliun hingga tahun 2040.

Menurut laporan Nikkei, dana tersebut akan diarahkan ke 17 sektor strategis yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional.

Selama ini, dukungan pemerintah terhadap industri strategis sering kali menjadi pendorong pertumbuhan investasi dan ekspansi bisnis di berbagai negara.

Meski rincian lengkap 17 sektor tersebut belum diumumkan, laporan awal menyebutkan bahwa kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan pengembangan teknologi luar angkasa akan menjadi bagian dari fokus utama pemerintah Jepang.

AI dan Semikonduktor Diperkirakan Jadi Penerima Manfaat Terbesar

Kecerdasan buatan dan semikonduktor diperkirakan menjadi dua sektor yang paling diuntungkan dari strategi investasi baru Jepang.

Pertumbuhan penggunaan AI juga meningkatkan kebutuhan terhadap pusat data, infrastruktur komputasi, dan perangkat keras berperforma tinggi.

Sementara itu, semikonduktor semakin dipandang sebagai industri strategis di tengah persaingan teknologi global. Berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, China, dan Korea Selatan, telah menggelontorkan miliaran dolar untuk memperkuat industri chip domestik.

Selain itu, sektor pendukung seperti pusat data, komputasi awan, keamanan siber, dan infrastruktur digital juga berpeluang menikmati efek lanjutan dari meningkatnya investasi di bidang AI dan semikonduktor.

Robotika hingga Antariksa Juga Menarik Dicermati

Jepang merupakan salah satu negara terdepan dalam pengembangan robot industri, sementara kebutuhan otomatisasi diperkirakan terus meningkat seiring berkurangnya jumlah tenaga kerja akibat penuaan populasi.

Sektor antariksa juga semakin menarik karena tidak lagi didominasi lembaga pemerintah. Perusahaan swasta kini berperan besar dalam pengembangan satelit, komunikasi berbasis ruang angkasa, hingga layanan observasi bumi.

Di luar sektor teknologi, investasi jangka panjang pemerintah Jepang juga berpotensi mengalir ke berbagai proyek yang berkaitan dengan transformasi energi dan ketahanan ekonomi nasional.

Bagi investor, target investasi 370 triliun yen hingga 2040 memberikan gambaran mengenai sektor yang dipandang Jepang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi pada dekade mendatang.

Meskipun realisasinya akan berlangsung bertahap, arah kebijakan tersebut dapat menjadi petunjuk awal untuk mengidentifikasi peluang investasi jangka panjang di industri yang sedang sangat berkembang tersebut.

China Balas AS, Perketat Kontrol Ekspor dan Masukkan 10 Entitas ke Daftar Sanksi

Senin, 22 Juni 2026 09:29 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-balas-as-perketat-kontrol-ekspor-dan-masukkan-10-entitas-ke-daftar-sanksi>

KONTAN.CO.ID - Pemerintah China memasukkan 10 entitas asal Amerika Serikat (AS) ke dalam daftar kontrol ekspor sebagai bentuk balasan atas langkah Washington yang lebih dulu menjatuhkan pembatasan terhadap sejumlah perusahaan China.

Langkah tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan China pada Senin (22/6/2026), dengan menyebut bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk daftar diduga memiliki keterkaitan dengan militer AS.

Di antara perusahaan yang terdampak adalah Aveox, produsen motor khusus untuk aplikasi misi kritis, serta perusahaan rare earth MP Materials dan USA Rare Earth.

Dengan masuknya dalam daftar tersebut, perusahaan China dilarang mengekspor barang dual-use (barang yang dapat digunakan untuk keperluan sipil maupun militer) kepada entitas tersebut.

Pemerintah China menyebut kebijakan ini sebagai respons atas “praktik berbahaya” pemerintah AS yang dinilai merugikan kepentingan nasional Beijing.

Beijing juga menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menjaga keamanan nasional serta memenuhi kewajiban internasional, termasuk terkait non-proliferasi.

“Seluruh aktivitas ekspor yang masih berjalan dengan perusahaan-perusahaan tersebut harus dihentikan segera,” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan China.

Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Keuangan China juga mengumumkan sanksi terhadap 46 perusahaan AS lainnya.

Perusahaan-perusahaan tersebut dilarang membeli produk yang diproduksi oleh entitas yang masuk daftar hitam, meskipun perusahaan dengan kepemilikan AS yang beroperasi di China masih diperbolehkan melakukan transaksi.

Ketegangan ini terjadi di tengah meningkatnya rivalitas teknologi dan industri strategis antara dua ekonomi terbesar dunia, khususnya pada sektor mineral penting seperti rare earth yang menjadi komponen vital dalam industri kendaraan listrik, semikonduktor, dan pertahanan.

Sebelumnya, AS juga memasukkan sejumlah perusahaan besar China seperti Alibaba, Baidu, BYD, dan NIO ke dalam daftar entitas yang dianggap mendukung aktivitas militer Beijing. Langkah saling balas ini semakin memperpanjang daftar konflik dagang dan teknologi antara Washington dan Beijing.

Penyebab Pasar Surat Utang Dunia Dilanda Aksi Jual

Senin, 22 Juni 2026 11:50 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112575/penyebab-pasar-surat-utang-dunia-dilanda-aksi-jual/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Tekanan jual kembali mendominasi pasar Surat Utang Negara (SUN), pada sesi perdagangan Senin (22/6/2026). Di tengah negosiasi damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, pasar obligasi terlihat belum meyakini bahwa risiko inflasi global akan berlalu begitu saja meski AS dan Iran berdamai.

Melansir data Bloomberg pada 10:14 WIB, kenaikan imbal hasil (yield) yang terjadi hampir di seluruh tenor menggambarkan aksi jual (sell-off).

Kenaikan tajam terjadi pada tenor 6 tahun yang melonjak 15,9 basis poin (bps) ke level 7,15%, disusul tenor 30 tahun naik 14,4 bps menjadi 7,39%. Yield tenor 9 tahun juga terkerek naik 7,7 bps, sementara tenor 5 tahun naik 5,7 bps.

Kenaikan tak cuma terjadi pada tenor pendek, yang umumnya sangat sensitif terhadap kebijakan suku bunga, tetapi juga terjadi pada tenor menengah hingga panjang.

Agaknya, pelaku pasar sedang melakukan repricing terhadap prospek ekonomi dan inflasi dalam jangka panjang. Kekhawatiran pasar pada risiko inflasi yang belum kunjung mereda, akibat ekspektasi inflasi dapat menggerus nilai kupon riil yang akan diterima investor.

Di sisi lain, tekanan inflasi global juga menjadi salah satu alasan yang dapat memaksa bank-bank sentral menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Pasar Obligasi Global

Kondisi ini tak cuma terjadi di Indonesia. Tekanan inflasi global diperkirakan melanjutkan tren bear flattening (yield jangka pendek naik lebih cepat daripada tenor panjang) di pasar surat utang global.

Kondisi ini juga dipicu oleh bank sentral yang mengirim sinyal bahwa dampak perang terhadap tekanan biaya dan ekspektasi inflasi masih membutuhkan waktu untuk terserap ke dalam perekonomian.

Yield obligasi pemerintah AS (US Treasury) naik 4,3 bps ke 4,21%, disusul tenor 2 tahun 4 bps ke 4,23%, dan tenor 5 tahun naik 3,6 bps ke 4,26%. Tenor acuan 10 tahun juga naik 3 bps ke 4,48%.

Kenaikan yield hari ini melanjutkan tren yang terjadi pada pekan lalu, kala pasar mulai mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed. Dengan sikap hawkish yang diambil The Fed menahan suku bunga di rentang 3,5%-3,75%, kenaikan yield US Treasury tak terhindarkan.

Pekan ini, pelaku AS akan mencermati rilisnya data Personal Consumption Expenditure (PCE) AS yang akan menggambarkan tingkat inflasi domestiknya, dan diperkirakan meningkat menjadi 4,1%, berdasarkan estimasi ekonom yang disurvei Bloomberg.

Selain AS, investor asing juga menjual bersih obligasi domestik Korea Selatan senilai US\$91,2 juta pada 19 Juni lalu, seperti dihimpun Bloomberg. Angka ini menjadi aksi jual terbesar sejak 16 April 2026.

Sementara di Indonesia, investor asing melepas kepemilikan obligasi senilai US\$90,9 juta pada 18 Juni, serta melepas kepemilikan saham senilai US\$179,5 juta.

Begitu juga dengan pasar obligasi Thailand yang ditinggalkan investor dengan melepas kepemilikan senilai US\$345,4 juta pada 19 Juni lalu. Tak hanya itu, investor juga melepas saham Thailand senilai US\$114,7 juta. Thailand jadi negara dengan arus keluar dana asing terbesar di pasar obligasi Asia, setidaknya pada periode tersebut.

Setali tiga uang, investor juga melepas kepemilikan di pasar obligasi Filipina, dengan penjualan bersih sebesar US\$7,45 juta pada 19 Juni.

Sepertinya, sebagian investor global mengalihkan uang mereka ke negara lain di kawasan ini yang memiliki prospek ekonomi lebih baik. Sebab, investor asing justru mencatat aksi beli di pasar obligasi Malaysia senilai US\$493 juta per 15 Juni lalu, serta pasar obligasi India US\$6,4 juta.

Data Bloomberg siang ini menunjukkan obligasi pemerintah India tenor 10 tahun menyusut tipis 0,2 bps ke 6,88%, dan yield tenor 5 tahun turun 1,5 bps menjadi 6,48%.

Ekspektasi Inflasi dan Suku Bunga

Sikap defensif investor dan cenderung berhati-hati terhadap aset negara berkembang di Asia, terutama di pasar obligasi dipicu oleh beberapa faktor.

Pertama, ekspektasi suku bunga AS yang bertahan tinggi lebih lama (higher for longer) membuat investor mengalihkan investasi mereka menuju aset yang lebih aman, dalam hal ini dolar AS dan US Treasury.

Kedua, ketidakpastian harga minyak mentah akibat perkembangan negosiasi antara AS dan Iran, sempat diwarnai ancaman Presiden AS, Donald Trump. Selain itu, pelaku pasar sepertinya melihat gangguan pasokan energi global belum sepenuhnya sirna.

Ketiga, adanya kekhawatiran inflasi global, seperti sudah disebut, dipicu oleh harga minyak yang kembali naik di tengah negosiasi AS-Iran. IMF memperkirakan inflasi global berada di kisaran 4%.

Bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia, lonjakan harga minyak mentah dunia berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, memperlebar defisit transaksi fiskal, serta menekan rupiah

Di Indonesia, sinyal inflasi sebenarnya sudah nyaring dari data Mei 2026 yang mencatat inflasi sebesar 3,08% dari posisi sebelumnya. Peningkatan inflasi terutama didorong oleh lonjakan inflasi pangan, yang naik menjadi 4,94% secara tahunan dari 3,06% secara tahunan pada bulan sebelumnya, sekaligus menjadi level tertinggi dalam delapan bulan terakhir.

Selama tekanan eksternal masih tinggi dan inflasi belum kembali ke jalur target yang dipatok bank sentral, pasar sepertinya akan terus memperkirakan bahwa suku bunga harus bertahan tinggi lebih lama.

Hal ini pada akhirnya memicu investor menjual obligasi dengan nilai yield atau imbal hasil yang berlaku, sambil berekspektasi terhadap kenaikan yield pada penerbitan obligasi selanjutnya, di tengah premi risiko yang meningkat.

Dubes China Serukan ASEAN Tolak Intervensi Asing

Senin, 22 Juni 2026 14:27 WIB

Penulis: Martin Bagya Kertiyasa

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3004567/dubes-china-serukan-asean-tolak-intervensi-asing>

Jakarta, Beritasatu.com – Duta Besar China untuk ASEAN Wang Qing menyerukan agar ASEAN dan China terus bersolidaritas serta menolak eksklusivitas di tengah upaya bersama menghadapi tantangan global.

“Kita harus memastikan sikap saling percaya, solidaritas, dan kerja sama tetap menjadi dasar bersama, serta memastikan masa depan kawasan tetap di tangan kita sendiri,” kata Wang dilansir dari Antara, Senin (22/6/2026).

“Kita harus menolak interferensi asing, upaya membentuk lingkaran eksklusif atau memicu konfrontasi, serta upaya apa pun untuk menghidupkan kembali militerisme yang mengacaukan stabilitas kawasan,” tambah dia.

Ia menyampaikan bahwa unilateralisme, proteksionisme, serta krisis energi dan pangan menjadi tantangan besar saat ASEAN dan China meraup peluang dari bergesernya episentrum ekonomi ke Asia.

Sebagai “tetangga dekat dengan masa depan bersama”, China dan ASEAN perlu meningkatkan kerja sama demi mendorong pertumbuhan yang mantap dan stabil, ujar Dubes Wang.

China dan ASEAN telah mencatat berbagai pencapaian sejak terjalinnya dialog pada 1991. Seiring ditetapkannya pembaruan Protokol Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN–China 3.0, perdagangan bilateral pada 2025 telah mencapai US\$ 1 miliar.

Di samping itu, hampir dua miliar penduduk di Asia Tenggara dan China mendapat manfaat dari eratnya kerja sama ASEAN–China. Ia menyoroti Kereta Api China–Laos dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung sebagai simbol eratnya kolaborasi kedua pihak.

Dengan capaian tersebut, Dubes China untuk ASEAN itu menyerukan agar kedua pihak terus meningkatkan kerja sama di sektor prioritas, antara lain ketahanan pangan dan energi, jalinan ekonomi, dan stabilitas rantai pasok.

Ia juga mendorong percepatan implementasi FTA ASEAN–China 3.0 dan mewujudkan pasar bersama kawasan yang semakin terbuka.

Namun demikian, di tengah upaya tersebut, Wang mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC), yang selaras dengan Lima Prinsip Koeksistensi Damai milik China, demi perdamaian dan stabilitas kawasan.

Dubes Wang juga menegaskan kembali dukungannya terhadap arsitektur kerja sama kawasan yang berorientasi ASEAN, terbuka, dan inklusif, serta komitmen pihaknya untuk memastikan kerja sama ASEAN-China yang stabil demi kepastian bersama.

Perkuat UMKM, BI Siapkan 4 Program Unggulan

Senin, 22 Juni 2026 15:10 WIB

Penulis: Addin Anugrah Siwi

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3004579/perkuat-umkm-bi-siapkan-4-program-unggulan>

Jakarta, Beritasatu.com — Bank Indonesia (BI) menyiapkan empat program unggulan dalam Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu. Program ini diarahkan untuk memperkuat kewirausahaan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong ekonomi kerakyatan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, empat program unggulan tersebut dipilih dari berbagai model bisnis yang telah berjalan dalam pembinaan BI. Program yang dipilih dinilai memiliki dampak luas, cepat, serta sudah memiliki contoh keberhasilan di lapangan.

“Bedanya, yang kedua kita pilih empat program yang betul-betul dampaknya sangat luas dan Insyaallah dijamin sukses. Karena ini kami pilih dari beratus model bisnis yang sudah ada di BI,” kata Perry dalam acara Kick Off Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Perry menjelaskan, program transformasi kewirausahaan UMKM tersebut tidak hanya berisi pelatihan di kelas. Peserta akan melalui tahapan pendidikan kewirausahaan, sertifikasi, praktik atau magang, evaluasi, hingga pendirian bisnis bagi peserta yang dinilai siap.

“Makanya bedanya program ini adalah akan ada tiga tahap. Satu adalah pendidikan kewirausahaan, dan kita lakukan sertifikasi,” ujar Perry.

Program unggulan pertama adalah Cangkir Barista. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi barista Indonesia melalui pelatihan dan sertifikasi, sekaligus memperkuat rantai nilai kopi dari petani hingga kedai kopi.

“Nah kenapa Cangkir Barista kita pilih? Kopi Indonesia luar biasa potensinya untuk menembus pasar global,” kata Perry.

Perry menyebut potensi pendapatan dari sektor kopi dapat mencapai US\$ 12,5 miliar. Pertumbuhan gerai kopi juga mencapai 23,9% per tahun, sehingga kebutuhan barista terlatih dan tersertifikasi semakin meningkat.

Namun, ia menilai jumlah barista Indonesia yang memiliki sertifikasi internasional masih terbatas. Dari sekitar 923.000 barista di Indonesia, hanya sekitar 100 orang yang telah memiliki sertifikasi internasional. “Melalui program ini, setiap tahun kita targetkan 400 barista yang tersertifikasi internasional,” ujar Perry.

Program kedua adalah Citra Nusantara. Program ini berfokus pada pengembangan UMKM wastra, seperti batik, tenun, sulam, dan ecoprint, agar mampu menghasilkan produk yang lebih inovatif dan

sesuai kebutuhan pasar. “Karena wastra Indonesia tidak akan habis. Itu warisan budaya Indonesia,” kata Perry.

Sektor wastra tercatat memiliki 47.700 unit usaha dan menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja. Melalui Citra Nusantara, BI menargetkan 50 inovasi wastra dari 500 peserta yang telah dipilih.

Dalam pengembangannya, BI melibatkan asosiasi desainer, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), serta mentor dari pusat dan daerah agar produk UMKM memiliki nilai tambah dan daya saing.

Program ketiga adalah Air Berkah Indonesia. Program ini mendorong pondok pesantren mengembangkan unit usaha air minum dalam kemasan berbasis sumber daya lokal.

Perry mengatakan, sejumlah pesantren telah berhasil mengembangkan usaha tersebut. Dalam program ini, pesantren didorong mengolah sumber air lokal menjadi produk bernilai ekonomi. “Kami menargetkan 200 pesantren sudah selesai. Kalau lima tahun berarti 1.000 pesantren,” kata Perry.

Program keempat adalah Tani Berkah. Program ini berfokus pada pengembangan pertanian ramah lingkungan atau green farming di lingkungan pondok pesantren, termasuk melalui sistem hidroponik. “Yang keempat adalah Tani Berkah. Ini juga sudah berhasil, banyak pesantren sudah mengembangkan green farming,” ujar Perry.

Pengembangan Tani Berkah membutuhkan lahan sekitar 200 hingga 500 meter persegi. BI menargetkan jumlah peserta meningkat bertahap dari 10 pesantren tahun ini menjadi 50 pesantren tahun depan, lalu 100 pesantren pada tahun berikutnya.

Perry mengatakan, seluruh program unggulan ini akan didukung mentor dari pelaku usaha yang telah berhasil, sehingga peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung. “UMKM yang berhasil di BI sudah banyak. Desainer, barista, air minum kemasan, hingga green farming di pesantren juga sudah banyak,” ujar Perry.

Perry berharap empat program unggulan tersebut dapat memperluas dampak pembinaan UMKM secara nasional. Dengan penguatan kompetensi, praktik usaha, pendampingan, dan akses modal bertahap, pelaku UMKM diharapkan memiliki fondasi bisnis yang lebih kuat.

Purbaya Buka Peluang Transfer ke Daerah 2027 Bisa Naik Rp90 T

Senin, 22 Juni 2026 13:28 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112599/purbaya-buka-peluang-transfer-ke-daerah-2027-bisa-naik-rp90-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mencapai Rp90 triliun.

“Untuk daerah tahun depan TKD, jadi kira-kira untuk sekarang itu sementara ada peningkatan sekitar Rp40 triliun untuk daerah, tapi kisarannya bisa naik sampai Rp90 triliun, tergantung nanti diskusi di APBN-nya seperti apa ya. Jadi ruang itu terbuka,” kata Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (22/6/2026).

Diketahui, pemerintah merencanakan anggaran TKD berada dalam kisaran Rp710 triliun sampai Rp810 triliun pada 2027. Angka ini lebih tinggi dari alokasi TKD pada 2026 yang sebesar Rp693 triliun. Artinya, anggaran TKD 2027 berpotensi meningkat hingga Rp900 triliun.

Bagaimanapun, Purbaya menyebut ruang peningkatan anggaran TKD sejatinya perlu mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, dia menegaskan Kepala Negara cukup fleksibel mengenai penyesuaian anggaran.

“Jadi ruang kita ada sebetulnya. Tapi itu semua tergantung Bapak Presiden. Bapak Presiden cukup fleksibel,” tuturnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan alokasi anggaran TKD memang akan naik namun tetap memerhatikan RAPBN 2027 lantaran defisit APBN akan di jaga di bawah 3%. Dia juga menyebut pengelolaan anggaran RI diawasi oleh lembaga internasional.

“Jangan sampai kita lewat 3%, karena kita diawasi oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak. Begitu tidak prudent, mereka akan menghukum kita. Jadi saya hati-hati sekali di situ,” ungkap Purbaya.

Pinjaman ke SMI

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani menambahkan pemerintah daerah (Pemda) dapat mengajukan pinjaman pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pembiayaan tersebut nantinya dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, hingga jalan dengan maturitas hingga lima tahun.

“Dengan bunga yang relatif rendah, banyak proyek yang bisa dilakukan Pemda mulai dari bangun sekolah, bangun rumah sakit, PDAM, bangun jalan, yang tentunya ini kita juga dukung ke depan,” ujarnya.

Merespons hal itu, Purbaya menyebut Pemda tetap bisa membangun wilayahnya meskipun mendapatkan anggaran yang minim. Harapannya, kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, TKD diarahkan untuk mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah serta menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

“Pagu indikatif TKD pada tahun 2027 direncanakan sebesar Rp710 Triliun sampai Rp810 triliun, dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap kebijakan strategis Pemerintah, outlook pendapatan negara yang dibagihasilkan tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar publik daerah, serta kemampuan keuangan negara,” dikutip dari dokumen KEM PPKF 2027.

Sekadar catatan, sebelumnya beberapa Pemda sempat protes mengenai pemotongan anggaran belanja TKD dalam APBN 2026. Salah satunya diutarakan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan pemotongan anggaran. Menurut dia, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap rencana pembangunan infrastruktur dan menghambat percepatan pembangunan di daerah.

Dia berharap pada 2027 pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan anggaran daerah. Sherly menegaskan, meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan kewenangan pemerintah pusat, dana bagi hasil (DBH) sebaiknya tidak dipotong.

Stimulus Ekonomi Semester II 2026 Capai Rp 26,34 Triliun

Senin, 22 Juni 2026 19:02 WIB

Penulis: Addin Anugrah Siwi

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3004666/stimulus-ekonomi-semester-ii-2026-capai-rp-2634-triliun>

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong mobilitas, memperkuat pasar tenaga kerja, serta mengantisipasi dampak ketidakpastian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan stimulus tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai ekonomi domestik tetap perlu dijaga di tengah dinamika geo-ekonomi, termasuk perkembangan konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan geo-ekonomi masih dinamis, walaupun berharap sudah mulai ada titik di Timur Tengah di Selat Hormuz, tetapi sampai saat sekarang kita terus monitor terkait dengan perkembangan di Timur Tengah,” kata Airlangga dalam konferensi pers Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Semester II 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Airlangga menyebut pemerintah perlu mengambil langkah proaktif agar tekanan eksternal tidak terlalu besar memukul ekonomi dalam negeri. Karena itu, stimulus semester II 2026 disiapkan melalui sejumlah program, mulai dari insentif pajak, transportasi, bantuan pangan, program magang dan vokasi, hingga stabilisasi harga pangan.

“Di lain situasi Indonesia, kita perlu terus untuk menjaga domestik ekonomi dan kita juga harus jaga dengan langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul,” ujar Airlangga.

Secara rinci, total stimulus Rp 26,34 triliun terdiri dari insentif transportasi sekitar Rp 2,04 triliun, program magang dan vokasi sekitar Rp 6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp 18,04 triliun.

“Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp 26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp 2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp 18,04 triliun,” kata Airlangga.

Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah insentif pajak bagi penulis. Pemerintah menetapkan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis, lebih rendah dibandingkan ketentuan yang selama ini berlaku.

“Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama, terkait dengan Pajak Penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5 sampai 35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga memberikan insentif bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia dan bahan baku plastik. Airlangga mengatakan, kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya produksi industri dan membantu menjaga inflasi, terutama karena banyak produk makanan menggunakan kemasan plastik.

“Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp 2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan multiplier effect yang bisa didorong,” kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan bea masuk impor suku cadang pesawat menjadi 0%. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung industri penerbangan dan meningkatkan daya saing industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri.

Untuk mendorong mobilitas masyarakat, pemerintah menyiapkan diskon transportasi pada periode libur sekolah dan libur Natal-Tahun Baru atau Nataru 2026/2027.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, diskon libur sekolah diberikan untuk kereta api, kapal Pelni, dan layanan ASDP, serta insentif tiket pesawat ekonomi domestik.

“Diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk Kereta Api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Kemudian 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus. Serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli,” kata Dudy.

Untuk periode libur sekolah, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 190,5 miliar dengan target 3 juta penumpang. Selain itu, ada subsidi PPN ditanggung pemerintah (DTP) 100% untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran Rp 472,7 miliar dan target 2,3 juta penumpang.

Pemerintah juga menyiapkan diskon transportasi untuk periode Nataru 2026/2027. Diskon 30% diberikan untuk tiket kereta api pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027, diskon 30% tarif dasar kapal Pelni pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Dudy mengatakan, insentif transportasi udara juga kembali diberikan pada periode Nataru melalui subsidi PPN DTP 100% untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang.

“Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama dua momentum besar baik libur sekolah dan Nataru adalah sebesar Rp 1,54 triliun,” ujar Dudy.

Dari sisi ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub angkatan kedua tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, program pemagangan tersebut menargetkan 150.000 peserta, sementara Pelatihan Vokasi Nasional menargetkan 220.000 orang, termasuk 50.000 orang korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Alhamdulillah tentu kita tadi sudah sama-sama mendengar arahan dari Pak Presiden dan juga hasil rapat dari Rakortas dengan disetujuinya Program Pemagangan Nasional untuk angkatan kedua tahun 2026 sesuai dengan yang diusulkan itu adalah 150.000 orang,” kata Yassierli.

Yassierli menjelaskan, peserta magang akan mendapatkan uang saku setara upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan berupa JKK dan JKM, pendampingan mentor dari perusahaan, serta sertifikasi kompetensi dari BNSP. Pada angkatan kedua, sertifikasi akan dipaketkan langsung dengan pelaksanaan program magang.

Pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan berupa beras selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Airlangga mengatakan, bantuan pangan tersebut menysasar 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran Rp 17,54 triliun.

“Bantuan Pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 17,54 triliun,” ujar Airlangga.

Selain bantuan beras, pemerintah menyiapkan program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) untuk kedelai. Program ini memberikan subsidi kepada perajin tahu dan tempe sebesar Rp 2.000 per kilogram dengan kuota tahap pertama 250.000 ton dan anggaran Rp 500 miliar.

“Nah, ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp 2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton. Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, tetapi kita siapkan 250.000 dengan subsidi Rp 2.000 per kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, bantuan pangan dan program stabilisasi harga pangan sudah dibahas lintas kementerian. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga konsumsi masyarakat dan menahan tekanan harga pangan pada paruh kedua tahun ini.

BI Rate Naik, Yield SRBI Ikut Terungkit

Senin, 22 Juni 2026 15:24 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112621/bi-rate-naik-yield-srbi-ikut-terungkit/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Imbal hasil (yield) instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) kembali melonjak, menyusul kenaikan BI Rate jadi 5,75% sebagai upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

Melansir data lelang Bank Indonesia (BI), Jumat (19/6/2026), yield SRBI tenor 12 bulan naik 15 basis poin (bps) ke level tertinggi 7,74%, dari posisi lelang sebelumnya Rabu (17/6/2026), di level 7,12%.

Ini menjadi level yield tertinggi sejak instrumen ini diterbitkan pada 2023 lalu.

Yield tenor 9 bulan juga naik 22 bps menjadi 7,55%, dari sebelumnya 7,33%, dan tenor 6 bulan yang naik cukup tajam sebesar 30 bps jadi 7,42% dari sebelumnya 7,12%.

Kenaikan yield ini cukup konsisten dengan kondisi pasar yang masih premi risiko lebih tinggi, setelah rupiah sempat kembali tergelincir sebelum BI Rate kembali dinaikkan 25 bps pada 18 Juni lalu.

Selain itu, pasar juga masih mencermati arah klasifikasi saham yang diumumkan MSCI pada Rabu (24/6/2026) mendatang, waktu Indonesia.

Permintaan dan Penyerapan Menurun

Pada lelang SRBI hari Jumat terlihat adanya pergeseran preferensi investor. Permintaan investor juga tercatat turun tajam, 28,1%, menjadi Rp42,8 triliun, dari posisi sebelumnya Rp59,49 triliun.

Penurunan terbesar terjadi di tenor 12 bulan, menjadi Rp37,19 triliun dari sebelumnya Rp47,78 triliun. Sepertinya minat investor pada tenor 12 bulan mulai berkurang, setelah BI menaikkan suku bunga dan rupiah mulai pulih dari tekanan, sebelum BI Rate naik pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan.

Pulihnya tekanan terhadap rupiah juga membuat BI menjadi lebih selektif dan hanya menyerap 13% dari total penawaran masuk, senilai Rp5,5 triliun. Padahal, BI menyerap 72% pada lelang sebelumnya, dengan total Rp43 triliun.

Tenor	Lelang 17 Juni	Lelang 19 Juni
6 bulan	Rp350 miliar	Rp3,7 triliun
9 bulan	Rp100 miliar	Rp521 miliar
12 bulan	Rp42,55 triliun	Rp1,28 triliun

Nampaknya BI menganggap stabilisasi rupiah mulai tercapai. Rupiah siang ini masih berada dekat area Rp17.750-17.850/US\$. Selain itu, BI juga sepertinya tidak ingin membayar yield terlalu tinggi lebih lama.

Di sisi lain, sentimen global yang sempat membaik pekan lalu ikut meredakan harga minyak mentah, meski siang ini kembali naik karena ketegangan baru yang dipicu oleh ancaman Presiden AS Donald Trump.

Turunnya angka penyerapan ini juga menunjukkan bahwa urgensi intervensi likuiditas mulai sedikit berkurang.

Sebagai catatan, pada RDG pekan lalu, BI menyampaikan bahwa posisi SRBI sudah menyentuh Rp1.021,1 triliun, per 15 Juni 2026 dengan kepemilikan non-residen (asing) mencapai Rp238,1 triliun atau 23,3% dari total outstanding. Outstanding ini menjadi rekor tertinggi sejak instrumen SRBI diluncurkan.

Awali Pekan, Rupiah Finis di Rp17.832/US\$

Senin, 22 Juni 2026 15:27 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112630/awali-pekan-rupiah-finis-di-rp17-832-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Senin (22/6/2026) dengan pelemahan 0,24% ke posisi Rp17.832/US\$, seiring ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran meningkat yang melemahkan sebagian besar mata uang Asia.

Dari kawasan, ketegangan baru dipicu oleh komentar Presiden AS Donald Trump yang menyebut akan menyerang Iran jika Hizbullah kembali menyasar Israel.

Kondisi ini kembali memangkas optimisme pasar yang sebelumnya sudah terbangun bahwa Selat Hormuz akan kembali dibuka dan distribusi energi dapat kembali berangsur pulih.

Namun, sore ini 15:05 WIB meski harga minyak jenis Brent sudah sedikit terpankaskan 1,14% ke level US\$79,65 per barel, sentimen dan kekhawatiran pelaku pasar masih meliputi pergerakan mata uang kawasan.

Selain itu, aset keuangan di negara berkembang juga tertekan oleh nada hawkish yang dikirim oleh bank sentral AS Federal Reserve yang diperkirakan akan kembali mengerek suku bunga acuan, terlebih jika angka inflasi berada di atas target 2%.

Nanti malam waktu Indonesia, AS akan mengumumkan angka Personal Consumption Expenditure (PCE) yang menggambarkan tingkat inflasi yang menjadi preferensi The Fed. Berdasarkan konsensus Bloomberg, PCE AS diperkirakan melonjak ke 4,1% akibat tekanan harga minyak dunia.

Dari kawasan, inflasi Singapura diperkirakan meningkat pada Mei, dipicu oleh kenaikan biaya energi akibat perang Iran. Bloomberg Economics memperkirakan inflasi naik menjadi 1,9% secara tahunan dari 1,8% pada April.

Meski begitu, penguatan dolar Singapura yang menjadi instrumen kebijakan moneter utama negara itu membantu meredakan tekanan harga.

Begitu juga dengan Jepang, yang diperkirakan mengalami percepatan tekanan harga. Bloomberg Economics memperkirakan inflasi inti (di luar makanan segar) naik menjadi 1,7% dari 1,3% pada Mei.

Kondisi ini memperkuat ekspektasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga menjadi 1,25%, pada Desember 2026, dari level saat ini sebesar 1%, berdasarkan skenario Bloomberg Economics.

Di tengah lingkungan moneter global yang kian ketat, tekanan terhadap rupiah berpotensi kembali berlanjut apabila investor asing kembali mengurangi eksposur pada aset domestik.

Kondisi ini dapat terjadi seiring tingginya imbal hasil aset negara maju, terutama US Treasury, yang membuat selisih yield Indonesia jadi kurang menarik dibandingkan risiko yang harus ditanggung investor.

Di sisi lain, Indonesia juga nampaknya harus bersaing dengan negara di kawasan Asia dalam menarik aliran modal asing. Sebab, di tengah rezim moneter ketat, investor global pun cenderung lebih selektif, dengan mempertimbangkan kombinasi antara prospek pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, serta risiko nilai tukar, dan tingkat imbal hasil yang ditawarkan.

Pemerintah Umumkan Stimulus Semester II-2026, Kucurkan Rp26,34 T

Senin, 22 Juni 2026 18:02 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112656/pemerintah-umumkan-stimulus-semester-ii-2026-kucurkan-rp26-34-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartanto mengumumkan stimulus ekonomi yang akan dikucurkan oleh pemerintah pada semester II-2026 mendatang.

“Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun, stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (22/6/2026).

Dalam pemaparannya, Airlangga menyebut bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan yang akan dimulai lagi pada bulan Juli, Agustus, September

“Untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp17,54 triliun,” sebut Airlangga.

Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah juga akan melakukan satu program baru yakni program stabilisasi harga pasokan pangan, khususnya untuk pengusaha tahu dan tempe.

“Nah ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2 ribu per kilogram dengan target kuota 250 ribu ton,” katanya.

Airlangga mengatakan, pemberian subsidi tersebut dilakukan apabila harga kedelai, sebagai bahan bakunya, mengalami kenaikan dari harga acuan yang ditentukan oleh pemerintah. Saat ini, kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai sekitar 2,5 juta ton yang seluruhnya masih diimpor.

Airlangga bilang, bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan dan Menko Pangan sudah bersurat ke Menko Perekonomian dan

Stimulus Lainnya

Selain itu, Airlangga juga membeberkan beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif tersebut, salah satunya adalah terkait dengan pajak penulis.

“Ini berupa tarif khusus PPH Final royalti, sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden,” katanya.

Sementara itu, untuk mendorong mobilitas masyarakat, Airlangga juga mengumumkan adanya diskon transportasi untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru.

Selanjutnya pemerintah juga menetapkan bea masuk 0% untuk import LPG bagi industri petrokimia.

“Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa di dorong,” katanya.

Ia bilang, adanya bea masuk 0% untuk bahan baku plastik ini dapat membantu menahan inflasi terutama karena seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.

“Dan selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk import suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0% ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan,” kata Airlangga.

Selanjutnya terkait program magang dan vokasi juga akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua di semester kedua dan diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian di masyarakat.

Perputaran uang di Dieng Caldera Race 2026 Wonosobo capai Rp20 M

Senin, 22 Juni 2026 10:39 WIB

Pewartu: Heru Suyitno, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaraneews.com/berita/635913/perputaran-uang-di-dieng-caldera-race-2026-wonosobo-capai-rp20-m>

Wonosobo (ANTARA) - Ajang Dieng Caldera Race (DCR) 2026 pada Minggu (21/6) di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, diperkirakan menghasilkan perputaran uang hingga Rp20 miliar yang berasal dari penginapan maupun kegiatan bisnis lainnya.

Direktur Dieng Caldera Race 2026 Ade Hendrik Saputra saat dihubungi di Wonosobo, Senin mengatakan, perubahan rute menjadi salah satu daya tarik utama DCR tahun ini. Khusus kategori 25K, peserta diajak melewati jalur Gunung Sindoro yang sebelumnya belum menjadi bagian dari lintasan.

“Untuk kategori 25K tahun ini 100 persen berubah. Kita naik Sindoro. Ini yang menjadi daya tarik DCR 2026, karena peserta terbanyak tahun ini ada di kategori 25K,” jelasnya.

Ia menuturkan, secara keseluruhan DCR 2026 diikuti sekitar 2.000 peserta dengan peningkatan jumlah peserta asing yang cukup signifikan. Tahun ini tercatat lebih dari 150 peserta asing ambil bagian, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 44 orang.

Ia menyebut, tingginya minat peserta memberikan dampak langsung terhadap sektor pariwisata. Sejumlah penginapan di sekitar kawasan Tambi hingga Dieng mengalami peningkatan okupansi selama pelaksanaan kegiatan.

“Dari sisi penginapan radius sekitar 15 Km dari Tambi sampai Wonosobo maupun ke arah Dieng penuh. Perputarannya mungkin di atas Rp20 miliar dengan adanya Dieng Caldera Race 2026 ini,” katanya.

Sementara Sekda Jawa Tengah Sumarno menambahkan, DCR yang digelar di kawasan Dieng ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah melalui konsep wisata olahraga.

“Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, trail run ini adalah salah satu pintu kita untuk pengembangan wisata. Olahraga bisa dikaitkan dengan pariwisata, menjadi sport tourism,” katanya.

Menurut dia, kehadiran para peserta tidak hanya memberikan dampak saat mengikuti perlombaan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Para peserta dan pendamping diharapkan turut menikmati berbagai potensi wisata, menggunakan jasa penginapan, membeli produk lokal, hingga menikmati kuliner khas daerah.

“Kami berharap yang hadir di sini tidak hanya lari, tetapi juga bisa menikmati pariwisatanya, bisa berbelanja, makan, dan minimal menginap di sini. Ini menjadi bagian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Wonosobo khususnya, dan Jawa Tengah pada umumnya,” katanya.

Ia mengapresiasi konsistensi penyelenggara yang terus menghadirkan DCR dengan konsep dan tantangan berbeda setiap tahun.

Menurutnya, perubahan rute pada tahun ini memberikan pengalaman baru bagi para peserta. Para pelari harus menghadapi rute baru dengan tantangan lebih berat karena melewati kawasan Gunung Sindoro.

“Rutenya berbeda dengan tahun lalu. Hari ini kita naik sampai puncak Sindoro. Cukup menantang, naiknya berat, turunnya lebih berat lagi,” tutur Sumarno yang berhasil menyelesaikan kategori 25K dengan catatan waktu 9 jam 25 menit.

16 juta keluarga di Jateng menjadi target Sensus Ekonomi 2026

Senin, 22 Juni 2026 09:04 WIB

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/635887/16-juta-keluarga-di-jateng-menjadi-target-sensus-ekonomi-2026>

Semarang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat sekitar 16 juta keluarga di provinsi setempat menjadi target pendataan dalam Sensus Ekonomi 2025

"Terdapat sekitar 4,9 juta unit usaha yang sudah teridentifikasi serta sekitar 16 juta keluarga yang akan disensus," kata Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said di Semarang, Minggu.

Menurut dia, Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah akan didukung oleh 36.891 Petugas. Setiap petugas rata-rata memperoleh tugas untuk melakukan pendataan di enam satuan lingkungan setempat.

Ia mengatakan untuk memudahkan pendataan, petugas ditugaskan di wilayah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya

"Sehingga petugas bisa mengetahui karakteristik wilayah tempatnya bertugas," katanya.

Ia mengatakan salah satu tantangan para petugas yakni yang berada di wilayah perkotaan

"Untuk wilayah perkotaan tentu objek yang akan disensus jumlahnya lebih banyak, sehingga perlu menyesuaikan waktu saat pendataan," katanya.

Sensus Ekonomi 2026, kata dia, dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026

Ia menyebut pendataan sensus di wilayah Jawa Tengah harus mencapai 100 persen hingga batas waktu yang ditentukan.

Jateng Gencar Bidik Investor Hijau, Potensi Energi Capai 13 Gigawatt

Senin, 22 April 2026

https://jatengprov.go.id/publik/jateng-gencar-bidik-investor-hijau-potensi-energi-capai-13-gigawatt/?utm_source=chatgpt.com

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus bergerilya menggaet investor sektor energi terbarukan untuk menanamkan modal. Terbaru, pabrik perakitan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Kabupaten Magelang telah diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada awal April 2026.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Sakina Rosellasari, mengatakan, nilai investasi sektor energi terbarukan di Jawa Tengah pada 2024–2025 mencapai Rp7,1 triliun. Rinciannya, penanaman modal pada 2024 sebesar Rp5,7 triliun, sementara pada 2025 sebesar Rp1,4 triliun.

“Nilai investasi 2025 dibanding 2024 terlihat menurun. Hal ini karena pada 2024 masih dalam tahap pembangunan, pembelian lahan, dan belanja modal. Sementara pada 2025 pabrik sudah mulai beroperasi,” ungkapnya, Rabu (22/4/2026).

Sakina menjelaskan, sektor industri yang telah menanamkan modal di Jawa Tengah, antara lain pabrik solar cell dan baterai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan KEK Kendal.

“Kemudian, yang baru diresmikan Presiden di Kabupaten Magelang adalah pabrik perakitan kendaraan listrik, terutama bus, truk, dan forklift,” imbuhnya.

Untuk menarik calon investor, pihaknya melakukan sejumlah langkah, di antaranya menginventarisasi potensi energi baru terbarukan (EBT) di 35 kabupaten/kota. Potensi tersebut kemudian dirangkum dalam Investment Project Ready to Offer (IPRO), dan ditawarkan kepada calon investor melalui forum seperti Central Java Investment Business Forum (CJIBF).

Sakina menyebutkan, peluang investasi hijau yang masih dapat dikembangkan antara lain potensi panas bumi di Banjarnegara dan Wonosobo, energi bayu, serta pengelolaan sampah di 35 kabupaten/kota.

Hal itu menurutnya selaras dengan arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, untuk memajukan sektor energi hijau di Jateng.

Analisis Institute for Essential Services Reform (IESR), Zakki Muwafiq mengatakan, ada tiga potensi EBT yang layak dikembangkan dari sisi profitabilitas, yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

“Potensi terbesar di Jawa Tengah adalah PLTS di 12 lokasi yang tersebar di 10 kabupaten, dengan potensi energi mencapai 13 gigawatt,” ujarnya.

Hal tersebut sejalan dengan proyeksi kebutuhan listrik di Jawa Tengah yang terus meningkat. Berdasarkan data RUPTL PLN, konsumsi listrik di Jateng meningkat 4,5 persen dalam 10 tahun terakhir.

“Dalam empat tahun terakhir bahkan terjadi peningkatan signifikan hingga 5,3 persen. Artinya, ada kebutuhan yang perlu disuplai oleh EBT, sehingga ini menjadi peluang besar,” pungkasnya. (Pd/UI, Diskomdigi Jateng)

Potret Ekonomi : Kendal Melejit! Ekonomi Tumbuh 7,99%, Tertinggi di Jawa Tengah

Senin, 22 April 2026

https://kendalkab.bps.go.id/id/news/2026/04/22/510/potret-ekonomi-kendal-melejit-ekonomi-tumbuh-7-99-tertinggi-di-jawa-tengah.html?utm_source=chatgpt.com

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2025 yang melesat hingga 7,99 persen bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata keberhasilan transformasi ekonomi daerah yang ditopang oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal sebagai bagian dari program prioritas nasional. KEK telah menjadi episentrum pertumbuhan baru, mendorong industrialisasi berbasis manufaktur yang kini tampil sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Sektor industri manufaktur yang berkontribusi dominan sebesar 42,03 persen tidak hanya menjadi penyumbang terbesar, tetapi juga menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang melampaui rata-rata PDRB. Ini menegaskan bahwa geliat industri di Kendal bukan lagi potensi, melainkan kekuatan riil yang menggerakkan ekonomi secara masif dan berkelanjutan. Dominasi industri manufaktur jauh melampaui sektor lain seperti pertanian (17,27 persen) dan perdagangan (12,04 persen). Tak hanya dominan, sektor ini juga tumbuh signifikan dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Ini menegaskan bahwa industrialisasi di Kendal bukan sekadar berkembang, tetapi sedang “berlari kencang”.

Akselerasi ini tidak lepas dari derasnya arus investasi yang masuk melalui KEK Kendal. Nilai investasi yang mencapai Rp14,21 triliun pada 2024 dan meningkat menjadi Rp15,86 triliun pada 2025 menjadikan Kendal sebagai daerah dengan realisasi investasi terbesar di Jawa Tengah selama dua tahun berturut-turut. Investasi tersebut langsung terkonversi menjadi aktivitas riil: pembangunan pabrik, ekspansi industri, hingga penciptaan lapangan kerja baru.

Dampaknya terasa luas. Sektor konstruksi tumbuh paling tinggi sebesar 17,60 persen, mencerminkan masifnya pembangunan kawasan industri. Sektor akomodasi ikut terdorong dengan pertumbuhan 11,86 persen, sementara industri pengolahan tetap solid di 8,92 persen. Ini menunjukkan efek berganda (multiplier effect) dari KEK yang tidak hanya menggerakkan satu sektor, tetapi menghidupkan ekosistem ekonomi secara menyeluruh.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 54,49 persen. Namun yang paling mencolok adalah lonjakan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 20,35 persen dengan kontribusi 30,18 persen—indikasi kuat bahwa investasi yang masuk benar-benar dieksekusi dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi 2025. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh moderat sebesar 3,63 persen.

Kepala BPS Kendal, Ade Sandi, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang dirilis secara triwulanan dan tahunan. Ia juga menekankan bahwa KEK Kendal telah memberikan dampak nyata, tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.

“Industri manufaktur menjadi tulang punggung ekonomi Kendal. KEK bukan hanya kawasan industri, tetapi pusat pertumbuhan baru yang mendorong transformasi ekonomi daerah,” ujarnya dalam kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan bincang santai potret ekonomi bersama media di BPS Kendal pada Rabu, 22 April 2026, kolaborasi antara BPS Kendal, Pemerintah Daerah Kendal melalui Dinas Kominfo, Forum Wartawan Kendal (Forwaken), dan BSI Kendal Weleri. Hadir dalam kegiatan itu Kadis Kominfo Kendal Ardhi Prasetyo, Ketua Forwaken Wahyudi, serta Pimpinan BSI Weleri Kendal Ibu Dian.

Dalam forum tersebut, Ade Sandi juga mendorong media untuk meningkatkan literasi data, agar mampu menerjemahkan angka-angka statistik menjadi informasi yang utuh dan mudah dipahami publik sebagai bagian dari proses pembangunan ekonomi dan sosial.

Diskusi yang berlangsung dinamis turut mengangkat isu strategis, mulai dari kaitan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran, dampak KEK terhadap masyarakat sekitar, hingga peran industri padat karya dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan media menjadi kunci dalam mengawal pembangunan berbasis data. Kegiatan ditutup dengan pembagian doorprize, foto bersama, serta penguatan pesan kolaboratif: "Dari berita jadi makna, dari data jadi gerakan"—sebuah ajakan agar data tidak berhenti sebagai angka, tetapi menjadi energi perubahan bagi masyarakat Kendal.

Sebanyak 850 pekerja di Kabupaten Jepara terima distribusi kartu mebel

Senin, 22 Juni 2026 19:30 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Heru Suyitno

<https://jateng.antaraneews.com/berita/635985/sebanyak-850-pekerja-di-kabupaten-jepara-terima-distribusi-kartu-mebel>

Jepara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mendistribusikan sebanyak 850 kartu mebel Jepara kepada para pekerja sektor mebel dari total 1.500 kartu yang disiapkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan industri mebel dan ukir.

"Kegunaan kartu mebel Jepara ini untuk memastikan para pekerja tercover BPJS, baik BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan maupun jaminan hari tua. Dengan begitu mereka tidak kesulitan dan mendapatkan hak yang sama," kata Bupati Jepara Witiarso Utomo di Jepara, Senin.

Selain perlindungan sosial, kata dia, Pemkab Jepara juga mengintegrasikan kartu tersebut dengan berbagai program pendidikan. Pemegang kartu beserta keluarganya diprioritaskan mengakses bantuan pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Untuk keluarga pekerja mebel yang masuk kategori desil 1 dan 2, kata Witiarso, pemerintah daerah akan memprioritaskan anak-anak mereka untuk masuk Sekolah Rakyat, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Di sisi lain, Pemkab Jepara juga terus memperkuat daya saing industri mebel dan ukir melalui pelatihan inovasi produk berbasis ornamen ukir serta pelatihan pemanfaatan limbah kayu. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri unggulan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelakunya.

Menurut Witiarso kegiatan tersebut bukan sekadar agenda pelatihan biasa, melainkan memiliki nilai strategis bagi masa depan industri mebel Jepara yang selama ini dikenal dunia sebagai pusat ukir atau The World Carving Center.

"Jepara dikenal berbagai penjuru dunia sebagai the world carving center. Tapi jangan kemudian terlena hanya dengan menjaganya. Kita juga harus terus mengembangkannya agar mampu menjawab tantangan zaman," katanya.

Ia menegaskan industri mebel dan ukir tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga warisan budaya yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Perubahan pasar yang berlangsung cepat

menuntut pelaku usaha menghadirkan produk yang berkualitas, inovatif, ramah lingkungan, dan memiliki nilai budaya yang kuat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar perekonomian Jepara dengan sumbangan 33,61 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2025. Pertumbuhan ekonomi Jepara juga mencapai 5,41 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,26 persen.

Sektor industri di Jepara menyerap sekitar 338.799 tenaga kerja dan menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di daerah tersebut. Khusus sektor furnitur, terdapat 892 perusahaan dengan nilai investasi lebih dari Rp1,17 triliun dan mampu menyerap sedikitnya 8.259 tenaga kerja.

Komoditas furnitur kayu juga menjadi andalan ekspor Jepara dengan nilai mencapai sekitar 197 juta dolar AS atau setara Rp3,29 triliun pada 2025, yang dipasarkan ke 114 negara tujuan ekspor. Nilai tersebut menyumbang 34,5 persen dari total ekspor Jepara.

Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor tersebut, Pemkab Jepara menyiapkan sejumlah program unggulan dalam visi Jepara Mulus, di antaranya Festival Ukir Internasional, pengembangan Museum Ukir Nusantara, Pasar Mebel Jepara, UMKM Naik Kelas, hingga program Kartu Mebel Jepara.

Witiarso menambahkan pemerintah daerah juga tengah memperkuat kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, baik di Jepara maupun di luar daerah, seperti universitas di Semarang dan Yogyakarta, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor mebel dan ukir.

"Bagi saya, kemajuan industri mebel tidak hanya diukur dari nilai ekspor, tetapi juga dari kesejahteraan para pekerja yang berada di belakang setiap produk yang dihasilkan," ujarnya.

Melalui pelatihan dan berbagai program pendukung tersebut, Pemkab Jepara berharap industri mebel dan ukir mampu terus berinovasi, menjaga kualitas produk, serta memperkuat posisi Jepara sebagai pusat industri furnitur dan ukir berkelas dunia yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kemantapan Jalan Jateng Ditarget Rampung 2026, Dorong Ekonomi Daerah Tumbuh

Senin, 22 Juni 2026

<https://www.portaljateng.id/2026/06/22/kemantapan-jalan-jateng-ditarget-rampung-2026-dorong-ekonomi-daerah-tumbuh/>

TEGAL – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi duet Wagub Taj Yasin, menargetkan penyelesaian kemantapan jalan di seluruh wilayah Jawa Tengah pada 2026. Setelah berhasil mencatatkan tingkat kemantapan jalan sebesar 94 persen dan meraih peringkat kedua nasional pada 2025, Pemprov Jateng kini fokus memperbaiki ruas-ruas jalan yang mengalami penurunan kualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran mobilitas masyarakat.

Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat memberikan paparan dalam Rembug Pembangunan di Pendapa Ki Gede Sebayu, Kota Tegal, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah dari wilayah pengembangan Bregasmalang (Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Pemalang) serta Petanglong (Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan).

Menurut Luthfi, hasil evaluasi menunjukkan sejumlah wilayah mengalami penurunan tingkat kemantapan jalan. Di antaranya Kabupaten Brebes turun 18 kilometer atau 12 persen, Kabupaten

Pekalongan turun 8 kilometer atau 8 persen, Kabupaten Tegal turun 3 kilometer atau 9 persen, Kabupaten Pemalang turun 14 kilometer atau 15 persen, serta Kabupaten Batang turun 4 kilometer atau 6 persen. Adapun Kota Tegal dan Kota Pekalongan tidak dilalui ruas jalan provinsi.

“Kita lakukan review dan ini hasilnya, yang harus kita lakukan di seluruh kabupaten kota,” kata Luthfi. Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan peningkatan jalan di sejumlah daerah.

Kabupaten Brebes memperoleh anggaran pemeliharaan rutin sebesar Rp 9,345 miliar untuk ruas sepanjang 143 kilometer. Selain itu, dialokasikan Rp 14,23 miliar untuk peningkatan jalan sepanjang 1,8 kilometer pada ruas Bumiayu-Salem dan Sirampog-Bumiayu.

Brebes juga mendapatkan anggaran rehabilitasi jalan sebesar Rp 9,39 miliar untuk penanganan ruas Kersana-Bandungsari, Bandungsari-Pananggapan, dan Bandungsari-Salem dengan total panjang empat kilometer.

Sementara itu, Kabupaten Pemalang memperoleh alokasi pemeliharaan rutin sebesar Rp 6,1 miliar. Kabupaten Pekalongan mendapat anggaran pemeliharaan rutin Rp 5,67 miliar serta peningkatan jalan Rp 5,27 miliar untuk ruas Wiradesa-Kajen sepanjang satu kilometer.

Adapun Kabupaten Batang memperoleh anggaran Rp 5,06 miliar untuk penanganan ruas jalan sepanjang 76,99 kilometer.

Luthfi menjelaskan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.

Infrastruktur yang baik akan memperlancar pergerakan orang dan distribusi barang sehingga aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang.

Selain itu, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah utama yang menjadi jalur perlintasan pemudik setiap tahun. Karena itu, kondisi jalan yang mantap menjadi kebutuhan penting untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

“Harapannya persoalan jalan dapat dituntaskan sehingga kemantapan jalan bisa tercapai sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro untuk memastikan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Menurut Henggar, alokasi anggaran untuk seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi telah disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan rutin.

“Secara keseluruhan untuk alokasi ruas jalan sudah kita plotting,” kata Henggar.

Luthfi menegaskan, informasi mengenai ruas jalan yang sedang diperbaiki perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Informasi tersebut mencakup lokasi pekerjaan, proses lelang, hingga tahapan penyelesaian proyek agar masyarakat dapat memantau progres pembangunan secara jelas.

Pejabat The Fed: Tekanan Inflasi AS Makin Mengkhawatirkan

Selasa, 23 Juni 2026 06:00 WIB

Catarina Saraiva - Bloomberg News

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112674/pejabat-the-fed-tekanan-inflasi-as-makin-mengkhawatirkan/2>

Bloomberg, Gubernur Bank Central atau Federal Reserve (The Fed) Chicago, Austan Goolsbee, mengatakan ia masih khawatir terhadap inflasi dan mempertanyakan apakah semua faktor yang mendorong kenaikan harga benar-benar bersifat sementara.

“Kita telah menghadapi masalah inflasi yang jauh di atas target dan arahnya justru bergerak ke arah yang salah,” kata Goolsbee pada Senin dalam wawancara dengan program radio Marketplace milik American Public Media.

Para pembuat kebijakan mempertahankan suku bunga tidak berubah pekan lalu, tetapi proyeksi yang dirilis setelah pertemuan menunjukkan hampir separuh dari mereka memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga masih diperlukan tahun ini. Inflasi, yang belum mencapai target 2% The Fed selama lebih dari lima tahun, meningkat dalam beberapa bulan terakhir, memicu kekhawatiran di kalangan pejabat bank sentral bahwa mempertahankan suku bunga pada level saat ini tidak akan sepenuhnya meredakan tekanan harga.

Inflasi pada Mei meningkat ke laju tercepat dalam lebih dari tiga tahun karena perang di Iran mendorong kenaikan biaya energi dan menggerus kenaikan pendapatan riil masyarakat Amerika.

Goolsbee mengatakan sangat penting bagi The Fed untuk menilai apakah guncangan sementara, seperti tarif atau lonjakan harga energi akibat perang di Iran, merupakan satu-satunya faktor yang mendorong inflasi. Ia menyebut kenaikan harga jasa, yang tidak terkait dengan guncangan-guncangan tersebut, sebagai hal yang “mengkhawatirkan” dan mengatakan tekanan di sektor itu sering kali lebih persisten.

Pertemuan pekan lalu dari Federal Open Market Committee merupakan yang pertama bagi Kevin Warsh, yang dilantik sebagai ketua pada Mei. Kepala The Fed tersebut mengatakan ingin mereformasi institusi itu dan telah mengumumkan lima gugus tugas di bidang-bidang utama kebijakan moneter, termasuk komunikasi dan neraca bank sentral.

Goolsbee mengatakan ia bersimpati dengan pandangan Warsh bahwa bank sentral tidak seharusnya memberikan terlalu banyak panduan mengenai kemungkinan langkah para pembuat kebijakan terhadap suku bunga di masa depan. Menurutnya, prediksi yang keliru mengenai arah perekonomian dapat merusak kredibilitas bank sentral.

Menteri Keuangan Jepang Gelar Pembicaraan dengan Menkeu AS, Bahas Fluktuasi Mata Uang

Selasa, 23 Juni 2026 07:07 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/menteri-keuangan-jepang-gelar-pembicaraan-dengan-menkeu-as-bahas-fluktuasi-mata-uang>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengadakan pertemuan daring dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin malam, menurut sebuah sumber yang dekat dengan diskusi tersebut, seiring meningkatnya kekhawatiran atas fluktuasi mata uang yang tajam.

Mengutip Reuters, Selasa (23/6/2026), pertemuan tersebut berfokus pada respons kebijakan terhadap yen yang secara historis lemah, yang berpotensi termasuk intervensi mata uang, demikian dilaporkan oleh stasiun televisi Jepang TBS sebelumnya, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Yen sempat melemah hingga sekitar 161,9 pada Senin malam, sedikit di bawah level terendah dua tahun yang dicapai pekan lalu. Jika menembus di atas 161,96, yen akan mencapai level terlemahnya sejak 1986.

Tokyo menghabiskan rekor 11,7 triliun yen (\$72,44 miliar) untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing antara akhir April dan awal Mei.

Diskusi antara Katayama dan Bessent berlangsung saat otoritas keuangan Jepang terus membuat pasar menebak-nebak tentang kemungkinan intervensi mata uang, dengan kurangnya sinyal yang jelas menunjukkan potensi perubahan taktik komunikasi.

Pada hari Senin, Katayama mengatakan Tokyo "akan menanggapi pergerakan mata uang dengan tepat kapan pun," mengulangi frasa yang biasa digunakan otoritas terlepas dari level yen.

Aktivitas Bisnis Jerman Terpuruk, Sentuh Titik Terendah 18 Bulan

Selasa, 23 Juni 2026 14:51 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/aktivitas-bisnis-jerman-terpuruk-sentuh-titik-terendah-18-bulan>

KONTAN.CO.ID - BERLIN. Aktivitas sektor swasta Jerman kembali melemah tajam pada Juni 2026 dan menyentuh level terendah dalam 18 bulan terakhir.

Penurunan ini terutama dipicu oleh semakin dalamnya kontraksi di sektor jasa, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi terbesar di Eropa tersebut.

Berdasarkan survei flash Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P Global pada Selasa (23/6/2026), indeks komposit Jerman turun menjadi 48,0 pada Juni, dari 48,8 pada Mei.

Angka tersebut juga berada di bawah perkiraan analis Reuters yang memproyeksikan 49,6. Dalam skala PMI, angka di bawah 50 menandakan kontraksi ekonomi.

"Kabar buruknya, aktivitas bisnis telah menurun selama tiga bulan berturut-turut dengan laju tercepat dalam periode ini. Ini meningkatkan kemungkinan ekonomi kembali berkontraksi pada kuartal kedua," ujar Phil Smith, Associate Director Ekonomi di S&P Global Market Intelligence.

Penurunan paling dalam terjadi di sektor jasa. PMI jasa anjlok ke 46,8 dari 48,1 pada Mei, sekaligus menjadi level terendah sejak November 2022.

Kondisi ini menunjukkan pelemahan yang semakin luas, tidak hanya pada aktivitas bisnis tetapi juga pada permintaan tenaga kerja.

"Sektor jasa terus menjadi penghambat utama ekonomi, dengan penurunan aktivitas dan pesanan baru yang semakin cepat pada Juni," kata Smith.

Berbeda dengan sektor jasa, manufaktur Jerman masih berada di batas stagnasi. PMI manufaktur tercatat 50,0, sedikit turun dari 50,1 pada bulan sebelumnya.

Angka ini menunjukkan sektor industri belum tumbuh, tetapi juga belum masuk ke fase kontraksi.

Meski demikian, tekanan tetap terlihat dari sisi permintaan. Pesanan baru tercatat turun untuk bulan keempat berturut-turut, bahkan dengan laju penurunan tercepat sejak Desember 2024.

Di sisi lain, ada sedikit kabar positif dari sisi harga. Tekanan inflasi mulai menunjukkan pelemahan.

Biaya input tercatat naik pada laju terendah dalam empat bulan terakhir, sementara inflasi harga output perusahaan juga melambat ke level paling rendah dalam tiga bulan.

Namun, prospek jangka panjang masih belum sepenuhnya pulih. Ekspektasi pelaku usaha untuk 12 bulan ke depan tercatat sedikit melemah dan masih berada di bawah tren historis jangka panjang.

Dengan kombinasi melemahnya sektor jasa dan stagnasi manufaktur, ekonomi Jerman kini menghadapi tekanan berlapis yang meningkatkan risiko perlambatan lebih dalam pada paruh kedua 2026.

Tertekan Prospek Suku Bunga AS dan Penguatan Dolar, Harga Tembaga Melemah

Selasa, 23 Juni 2026 15:15 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/tertekan-prospek-suku-bunga-as-dan-penguatan-dolar-harga-tembaga-melemah>

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Harga tembaga melemah pada perdagangan Selasa (23/6/2026) di tengah kekhawatiran pasar terhadap prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan masih berlanjut, serta penguatan dolar AS yang menekan harga komoditas berbasis greenback.

Di pasar London Metal Exchange (LME), harga tembaga acuan tiga bulan turun 1,36% menjadi US\$ 13.463 per ton pada pukul 07.01 GMT.

Sementara itu, kontrak tembaga paling aktif di Shanghai Futures Exchange (SHFE) juga terkoreksi 1,07% ke level 103.580 yuan (sekitar US\$15.277) per ton.

Sentimen negatif datang dari meningkatnya ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve masih akan menaikkan suku bunga tahun ini, seiring inflasi yang tetap persisten dan sikap kebijakan moneter yang cenderung lebih ketat dari kepemimpinan baru The Fed.

Kenaikan suku bunga dinilai dapat menekan prospek pertumbuhan global, sekaligus mengurangi permintaan terhadap logam industri seperti tembaga karena biaya pinjaman yang lebih tinggi memperlambat aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, penguatan dolar AS turut menambah tekanan. Mata uang yang lebih kuat membuat komoditas yang dihargakan dalam dolar menjadi lebih mahal bagi pembeli dengan mata uang lain, sehingga menekan permintaan.

Dari sisi fundamental, data Biro Statistik Nasional China menunjukkan produksi tembaga olahan di negara tersebut naik 2,2% secara tahunan menjadi 1,26 juta ton.

Kenaikan produksi ini menambah kekhawatiran pasar terhadap potensi pasokan yang lebih longgar di tengah permintaan yang belum solid.

Tekanan di pasar logam tidak hanya terjadi pada tembaga. Aluminium mencatat penurunan tajam sebesar 3,54% di LME dan 2,23% di SHFE.

Pasar masih menimbang gangguan pasokan dari kawasan Teluk akibat ketegangan geopolitik yang menghambat pengiriman melalui Selat Hormuz, di tengah produksi yang belum kembali ke level pra-konflik.

Namun, data International Aluminium Institute menunjukkan produksi aluminium primer global tetap naik 3,5% secara tahunan pada Mei menjadi 6,2 juta ton, didorong peningkatan output dari China.

Di saat yang sama, ekspor aluminium China melalui jalur kawat aluminium yang mendapat keuntungan pajak juga melonjak tajam, lebih dari tiga kali lipat dibanding April menjadi 50.224 ton pada Mei.

Meski demikian, sejumlah analis menilai pasar aluminium masih berpotensi mengalami defisit tahun ini.

Komoditas logam dasar lainnya juga bergerak melemah. Di LME, harga seng turun 2,16%, timbal 1,04%, nikel 2,25%, dan timah anjlok 3,87%.

Di SHFE, penurunan juga terjadi pada seng 0,63%, timbal 0,15%, nikel 1,68%, dan timah yang terkoreksi paling dalam sebesar 4,1%.

Dolar Tembus Level Tertinggi Setahun, Yen Jepang Nyaris ke Titik Terendah 40 Tahun

Selasa, 23 Juni 2026 15:23 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-tembus-level-tertinggi-setahun-yen-jepang-nyaris-ke-titik-terendah-40-tahun>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Nilai tukar dolar Amerika Serikat menguat ke level tertinggi dalam lebih dari satu tahun pada perdagangan Selasa, didorong meningkatnya spekulasi bahwa The Federal Reserve (The Fed) masih akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.

Di sisi lain, yen Jepang kembali tertekan hingga mendekati level terlemah dalam hampir empat dekade, memicu kekhawatiran intervensi pasar oleh otoritas Jepang.

Indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sejumlah mata uang utama seperti euro dan yen naik ke 101,13, level tertinggi sejak Mei 2025.

Penguatan ini ditopang ekspektasi pasar bahwa kebijakan moneter AS akan tetap ketat lebih lama dari perkiraan sebelumnya.

Saat ini, pasar berjangka suku bunga The Fed (fed funds futures) memperkirakan peluang lebih dari 80% adanya kenaikan suku bunga pada September.

Sejumlah lembaga besar seperti BofA Global Research dan Deutsche Bank bahkan merevisi proyeksi mereka, dari sebelumnya memperkirakan suku bunga stabil menjadi kini memprediksi The Fed masih akan menaikkan suku bunga tahun ini, seiring ketahanan ekonomi AS.

“Dolar saat ini mencerminkan ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi dan terus menguat karenanya,” ujar Tommy von Bromsen, analis valuta asing di Handelsbanken. Ia menambahkan bahwa ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah, turut memberi dukungan tambahan bagi dolar.

Di pasar Eropa, euro melemah ke US\$1,1414, level terendah sejak Maret, setelah Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde meredam kekhawatiran inflasi lanjutan.

Sementara itu, pound sterling bergerak melemah tipis ke US\$1,3234 setelah sempat menguat sehari sebelumnya.

Pergerakan pound juga dipengaruhi dinamika politik di Inggris, termasuk isu pergantian kepemimpinan setelah mundurnya Perdana Menteri Keir Starmer. Meski demikian, sebagian analis menilai kepastian suksesi mulai meredakan tekanan di pasar.

“Ketidakpastian soal kepemimpinan sebelumnya membebani pound. Namun dengan dukungan politik yang mulai terbentuk, tekanan itu kini berkurang,” kata analis Commerzbank Michael Pfister.

Mata uang berisiko seperti dolar Australia dan dolar Selandia Baru juga ikut tertekan, masing-masing turun 0,8% ke US\$0,6945 dan sekitar 0,5% ke US\$0,5684, seiring penguatan dolar AS secara luas.

Yen Jepang di Ambang Level Terlemah Sejak 1986

Sorotan utama pasar tetap tertuju pada yen Jepang yang kembali melemah ke 161,48 per dolar AS, setelah sempat menyentuh 161,93 pada perdagangan sebelumnya. Jika menembus 161,96, yen akan berada pada posisi terlemah sejak 1986.

Kondisi ini meningkatkan spekulasi bahwa pemerintah Jepang akan turun tangan menahan pelemahan mata uangnya. Pelaku pasar kini waspada terhadap potensi intervensi mendadak dari otoritas Jepang.

“Volatilitas akan meningkat saat yen mendekati level ini karena pasar memperkirakan Jepang bisa memberi sinyal atau bahkan melakukan intervensi,” ujar von Bromsen.

Di tengah tekanan tersebut, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Pertemuan itu membahas langkah kebijakan atas pelemahan yen yang dinilai sudah berada di level historis, termasuk opsi intervensi pasar.

Meski demikian, otoritas Jepang masih belum memberikan sinyal jelas terkait langkah yang akan diambil, membuat pasar tetap berada dalam mode waspada terhadap potensi gejolak lanjutan di pasar valuta asing global.

Kemenkeu Usul Relaksasi Batas Belanja Pegawai di APBD Lebih 30%

Selasa, 23 Juni 2026 17:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112772/kemenkeu-usul-relaksasi-batas-belanja-pegawai-di-apbd-lebih-30/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan berencana mengusulkan relaksasi untuk alokasi belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi lebih dari 30%, melebihi batas atas yang diatur oleh Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Sebagai informasi, dalam Pasal 146 UU ini disebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

“Bahwa dalam 2027 porsi belanja pegawai hanya 30% maksimal, tetapi kemudian kita ketahui kebijakan TKD [Transfer ke Daerah] dalam setahun dua tahun ini mengalami perubahan yang signifikan sehingga kita harus juga dinamis menyikapi itu,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani dalam rapat Panja dengan Banggar DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Askolani menyebut bahwa saat ini Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah sepakat untuk mencari solusi terkait dengan hal ini, salah satunya dengan melakukan relaksasi batas 30% tersebut.

“Kami mengusulkan untuk 30% itu kita relaksasi pak, jadi itu solusi yang diusulkan pemerintah dan mohon dukungan dari bapak ibu sekalian di banggar kita lakukan relaksasi di undang-undang APBN sehingga Pemda bisa tetap tenang,” katanya.

Selain itu Askolani menyebut usulan relaksasi HKPD tersebut tak hanya terkait dengan batas atas 30% untuk pegawai saja, namun juga terkait dengan porsi pengeluaran untuk infrastruktur di APBD.

“Di UU HKPD selain 30% belanja pegawai maksimal mengamankan belanja infrastruktur minimal 40% dan itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan sehingga dua kebijakan itu bapak/ ibu sekalian kami usulkan di 2027 untuk di relaksasi sehingga itu akan membuat stabilitas dan juga ketenangan pelaksanaan APBN dan APBD 2027 ke depan,” kata Askolani.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf meminta agar pemerintah memberikan relaksasi kepada daerah terkait dengan belanja pegawai.

“Kami mendorong ada beberapa poin terutama relaksasi [belanja] pegawai ini sampai 2027 itu masih boleh diperpanjang, artinya 30% lebih harus diberikan relaksasi,” kata Dede dalam rapat yang sama.

Alasannya, saat ini sekitar 75% daerah di Indonesia sedang berada dalam keadaan sulit dan meminta adanya relaksasi untuk belanja pegawai.

Rupiah Hari Ini Ditutup Rp17.845/US\$

Selasa, 23 Juni 2026 15:37 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112773/rupiah-hari-ini-ditutup-rp17-845-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Selasa (23/6/2026) dengan pelemahan terbatas, 0,07% di posisi Rp17.845/US\$, menyusul tingginya indeks dolar Amerika Serikat (AS) di 101,14.

Penguatan yang terjadi pada dolar AS memukul mata uang Asia pada sesi perdagangan hari ini. Baht Thailand melemah paling tajam, disusul peso Filipina, yuan offshore, yuan China, rupee India, dolar Singapura, rupiah, dan won Korea Selatan.

Sebaliknya, hanya yen Jepang, ringgit Malaysia yang tercatat menguat terbatas.

Pelemahan baht terjadi disebabkan kinerja bursa saham Thailand yang anjlok. Di sisi lain, selisih suku bunga antara AS dan Thailand diproyeksikan makin melebar karena pelaku pasar memprediksi Bank of Thailand akan mempertahankan suku bunga acuan pada rapat besok.

Pasar obligasi kawasan masih tertekan oleh ekspektasi pasar terkait inflasi. Tak cuma di Thailand, hari ini pasar obligasi Indonesia juga mengalami aksi jual dan menyebabkan imbal hasil (yield) tenor acuan 10 tahun naik 6,7 basis poin (bps) menjadi 7,17%.

Kemarin, pemerintah resmi menggulirkan paket stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik di semester kedua tahun ini. Berdasarkan laporan Bloomberg News, para analis menilai paket stimulus pemerintah senilai Rp26,24 triliun kemungkinan belum akan memberikan dampak signifikan terhadap belanja negara maupun pasar obligasi.

Memang nilai stimulus tersebut relatif terbatas jika dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional maupun total belanja negara. Karena itu, dampaknya terhadap peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah dan penerbitan obligasi baru diperkirakan tidak terlalu besar.

Ini juga menjelaskan mengapa pasar obligasi belum menunjukkan respons yang signifikan terhadap arah kebijakan tersebut.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kebijakan stimulus ini lebih tepat dibaca sebagai bantalan agar konsumsi tidak turun terlalu dalam pada semester kedua, terutama di tengah tekanan inflasi, pelemahan rupiah sebelumnya, dan suku bunga yang lebih tinggi.

Meski begitu, stimulus tersebut tetap berperan sebagai penopang konsumsi rumah tangga pada semester kedua tahun ini. Pasalnya, indikator ekonomi domestik menunjukkan adanya mmoderasi permintaan masyarakat, dengan data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Mei turun ke 120.

IKK di atas 100 mengindikasikan bahwa konsumen masih optimistis memandang perekonomian saat ini hingga enam bulan mendatang. Namun, skor IKK pada Mei menjadi yang terendah dalam delapan bulan terakhir.

Menakar Dampak Stimulus Rp26,34 Triliun Buat Ekonomi RI

Selasa, 23 Juni 2026 13:53 WIB

Dian Sari Pertiwi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112732/menakar-dampak-stimulus-rp26-34-triliun-buat-ekonomi-ri/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menggulirkan paket stimulus senilai Rp26,34 triliun pada semester II-2026 demi menopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.

Langkah kebijakan ini diupayakan pemerintah di tengah kekhawatiran terhadap tekanan eksternal yang masih berlanjut dan bisa berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi domestik.

Selain itu, di tengah pelemahan rupiah menyentuh 6,57% sejak awal tahun, tingginya suku bunga BI Rate, serta kenaikan harga energi global—meski saat ini telah mereda, membuat pemerintah berupaya menjaga konsumsi rumah tangga dan aktivitas industri agar tidak mengalami perlambatan yang lebih dalam.

Jika melihat nominal, nilai stimulus tersebut memang relatif kecil dibandingkan ukuran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2025 yang mencapai Rp23.821,1 triliun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, bisa jadi efektivitasnya terletak pada sasaran kebijakan yang cenderung diarahkan langsung pada konsumsi masyarakat dan industri manufaktur.

Stimulus dan insentif kali ini setidaknya menysasar hampir semua kelompok masyarakat dan sektor yang saat ini sedang terhimpit tekanan eksternal dan inflasi akibat kenaikan harga minyak mentah dunia.

Pertama, insentif dari sisi permintaan, dalam bentuk diskon transportasi, dengan total alokasi anggaran Rp190,5 miliar dan target 3 juta penumpang dalam bentuk:

- Diskon sebesar 30% harga tiket untuk Kereta Api tanggal 20 Juni-5 Juli 2026
- Diskon 30% tarif dasar untuk Kapal Pelnit tanggal 20 Juni - 15 Agustus 2026,
- Gratis tarif jasa kepelabuhan ASDP tanggal 20 Juni - 5 Juli 2026.
- Subsidi penuh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah 100%, untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran Rp472,7 miliar, target 2,3 juta penumpang.

Insentif pertama ini diberikan dalam dua periode: musim liburan sekolah 20 Juni-15 Agustus 2026, dan musim libur akhir tahun sejak 17 Desember 2026-10 Januari 2027. Pada periode musim liburan akhir tahun, pemerintah menganggarkan Rp722 miliar dan menargetkan 3,7 juta penumpang.

Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung konsumsi rumah tangga.

Kedua, insentif untuk sektor industri dalam bentuk bea masuk 0% bagi impor LPG dan bahan baku plastik. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri, khususnya petrokimia.

Pada Maret lalu, Chandra Asri Group, produsen petrokimia terbesar di Indonesia, sempat menyatakan kondisi force majeure akibat gangguan rantai pasok dan kelangkaan bahan baku. Status tersebut kemudian dicabut pada Mei setelah kondisi berangsur membaik.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program Stabilisasi Harga Pasokan Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaku usaha tahu dan tempe di tengah fluktuasi harga kedelai. Pemerintah disebut memberikan subsidi senilai Rp2.000 per kilogram bagi pembelian kedelai dengan kuota sebanyak 250 ribu ton.

Kedua insentif bagi industri dan sektor usaha tersebut berpotensi menjaga margin industri petrokimia, makanan dan minuman, kemasan, serta manufaktur yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.

Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan bisa menciptakan efek multiplier effect atau efek pengganda dalam bentuk menekan harga kemasan, bahan baku, bagi sektor usaha makanan dan minuman, yang pada akhirnya dapat sedikit menekan angka inflasi.

Sebagai catatan, inflasi pada Mei lalu sempat melonjak ke 3,08% secara tahunan. Meski masih berada dalam rentang target Bank Indonesia (BI), inflasi ini didorong oleh kenaikan harga pada kelompok volatile food mencapai 6,24% secara tahunan.

Ketiga, program magang dan vokasi, dengan alokasi anggaran Rp4,14 triliun dan menasar 150 ribu peserta lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi bagi program magang.

Sedangkan anggaran untuk pelatihan vokasi sebesar Rp2,12 triliun yang akan disalurkan untuk membiayai program peningkatan keterampilan dan kompetensi ketenagakerjaan. Program ini menasar 220 ribu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan perlindungan bagi 50 ribu pekerja yang terdampak PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, Program Pemagangan Nasional 2025 menunjukkan hasil positif.

"Kita melakukan improvement pada 2026 ini terkait dengan, yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang," kata Yassierli.

Dia menambahkan, tahun lalu ada 65.245 peserta, dan sekitar 30% peserta tersebut mendapat tawaran kerja langsung dari perusahaan tempat magang.

Dampak Stimulus Bagi Perekonomian

Pertumbuhan Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang selama ini menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia. Karena itu, upaya pemerintah dalam menjaga belanja masyarakat menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi kuartal II tidak turun terlalu dalam setelah efek musiman Ramadan-Idul Fitri berakhir.

Namun demikian, dampak stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 kemungkinan masih terbatas. Sebab, sebagian besar program baru akan efektif berjalan pada akhir Juni. Sementara, kuartal II berakhir pada Agustus. Artinya, kontribusi terbesar stimulus kemungkinan baru akan terlihat pada pertumbuhan kuartal III dan IV.

Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), menilai insentif transportasi selama periode liburan berpotensi meningkatkan mobilitas dan memberi dorongan sesaat terhadap konsumsi rumah tangga, tetap belum cukup untuk menciptakan penguatan permintaan yang berkelanjutan.

Untuk kuartal II-2026, perekonomian masih menghadapi sejumlah tantangan. **Pertama**, adanya kenaikan BI Rate sebesar 75 basis poin dalam satu bulan terakhir, dan 100 bps sejak Mei. Hal ini berpotensi menahan ekspansi kredit dan investasi swasta.

Kedua, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor bahan baku sehingga menekan profitabilitas dunia usaha. Meski volatilitas rupiah sudah relatif mereda di level Rp17.750-Rp17.850/US\$, pada sesi perdagangan Selasa (23/6/2026), tetapi angka ini masih melampaui asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2026, yang dipatok Rp16.500/US\$.

Namun, tarif 0% LPG dan bahan baku plastik berpotensi meredam dampak imported inflation, di tengah volatilitas nilai tukar rupiah tersebut.

Ketiga, ketidakpastian global akibat konflik AS-Iran, perlambatan ekonomi global akibat inflasi yang datang dari kenaikan harga minyak, masih membayangi pertumbuhan ekonomi domestik.

Meski begitu, stimulus ini bisa menjadi bantalan dalam mencegah perlambatan ekonomi yang mungkin bisa terjadi lebih tajam.

Berdasarkan survei Bloomberg pada awal Juni, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5% secara tahunan pada kuartal II-2026. Laju tersebut diperkirakan bertahan pada kuartal III-2026 sebelum melambat menjadi 4,69% pada kuartal IV-2026.

Jika terwujud, maka pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan kuartal I-2026 yang tumbuh 5,61%.

Sementara pertumbuhan ekonomi 2026 versi Bank Indonesia di rentang 4,9% hingga 5,7%. Prospek ini, menurut BI, tertopang oleh kuatnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat.

Dampak Program Magang

Di sisi lain, pemerintah menggulirkan program magang kemungkinan bertujuan mengurangi masalah struktural di pasar tenaga kerja, yang umumnya berbentuk ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch).

Menurut International Labour Organization (ILO), skill mismatch di pasar tenaga kerja terjadi karena kualifikasi pendidikan, keterampilan, dan minat tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada.

Dalam perspektif ekonomi, pengurangan skill mismatch akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Asalkan, alokasi dan penempatan peserta magang sesuai dengan kebutuhan industri.

Esther menilai, program magang memberikan manfaat seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tenaga kerja terampil. Selain itu, insentif ini bersifat jangka panjang.

"Jika insentif program magang ini dihentikan, maka sumber daya manusia bisa tetap punya skill dan punya kesempatan lebih besar mendapatkan pekerjaan yang lebih layak," kata Esther kepada Bloomberg Tehcnoz.

Dia menambahkan, insentif program magang sebaiknya bekerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah dan perusahaan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.

Sebagai catatan, angka pekerja informal di Indonesia cenderung meningkat. Sebab, pekerja RI didominasi oleh penduduk lulusan SD atau tidak tamat SD sebesar 50,07%, lulusan SMP 20,21%, SMA 17,29%, SMK 8,09%, S1 2,42%, Diploma 1,57%, dan S2 0,35%.

Meski belum ada data kalkulasi secara pasti, dampak program magang juga setidaknya dapat bertransmisi kepada pertumbuhan ekonomi dalam bentuk daya beli.

Jika peserta magang memperoleh uang saku atau insentif, program ini juga berkontribusi terhadap konsumsi rumah tangga, meskipun skalanya relatif kecil.

Memang, kontribusinya terhadap konsumsi nasional tidak sebesar bantuan sosial atau subsidi langsung karena cakupan penerima program magang biasanya lebih terbatas. Namun, tambahan pendapatan tersebut dapat membantu menjaga pengeluaran kelompok usia muda dan rumah tangga berpendapatan rendah, terutama di tengah tekanan inflasi dan pelemahan daya beli.

Mei, BI Lapor Uang Beredar Naik Hampir 11% ke Rp10.415,9 Triliun

Selasa, 23 Juni 2026 10:55 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112714/mei-bi-lapor-uang-beredar-naik-hampir-11-ke-rp10-415-9-triliun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengumumkan data uang beredar dalam arti luas atau M2. Pada Mei, M2 tumbuh lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya.

Pada Selasa (23/6/2026), BI melaporkan posisi M2 per akhir Mei ada di Rp 10.415,9 triliun. Tumbuh 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan M2 pada Mei membaik dibandingkan April yang naik 9,2% yoy.

"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 15,3% yoy dan uang kuasi sebesar 6% yoy," demikian laporan BI.

Perkembangan M2 pada Mei terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit tumbuh sebesar 10,8% yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan April sebesar 9,4% yoy.

Kredit di sini adalah hanya dalam bentuk pinjaman (loans), tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan Tagihan Repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor Bank Umum yang berkedudukan di Luar Negeri, dan kredit yang disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan Bukan Penduduk.

Sementara itu, aktiva luar negeri bersih pada Mei tumbuh sebesar 5,2% yoy. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,7% yoy.

55.000 Buruh Terancam Kena PHK Pekan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 15:13 WIB

Penulis: Bambang Ismoyo

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3004872/55000-buruh-terancam-kena-phk-pekan-depan>

Jakarta, Beritasatu.com – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memperingatkan adanya potensi besar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengancam sektor industri manufaktur nasional. Salah satu yang paling terdampak adalah industri keramik yang saat ini berada dalam kondisi kritis akibat persoalan gas industri, yang menjadi komponen utama biaya produksi.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan sejumlah pabrik keramik tengah menghadapi tekanan berat. Bahkan, dua pabrik besar di wilayah Bekasi yang pekerjaannya tergabung dalam serikat buruh dilaporkan terancam tutup.

"Sekarang hari ini kita mengalami kesusahan sangat luar biasa. Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi terancam tutup. Itu karena gas industri. Ini bahaya sekali," ujar Andi Gani dalam acara Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Ia menegaskan, persoalan gas industri ini berpotensi memicu gelombang PHK dalam waktu dekat. Apabila tidak segera ditangani, puluhan ribu pekerja bisa terancam kehilangan pekerjaan.

Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat sektor manufaktur selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. KSPSI pun mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera mencari solusi atas masalah pasokan dan harga gas industri.

KSPSI juga berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan gas industri, sehingga gelombang PHK massal dapat dicegah dan daya saing industri nasional tetap terjaga.

"Dapat dipastikan minggu depan, maksimal 10 hari ke depan, 55.000 orang terancam ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua, karena gas industri," pungkasnya.

Uang Beredar (M2) Menguat per Mei 2026, Ekonom: Belum Jadi Bukti Permintaan Pulih

Selasa, 23 Juni 2026 17:29 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/uang-beredar-m2-menguat-per-mei-2026-ekonom-belum-jadi-bukti-permintaan-pulih>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) yang mencapai 10,8% secara tahunan pada Mei 2026 menjadi sinyal bahwa likuiditas di perekonomian Indonesia masih terjaga kuat. Namun, peningkatan jumlah uang beredar tersebut belum bisa langsung diartikan sebagai akselerasi perputaran ekonomi yang merata.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengatakan, kenaikan M2 menjadi Rp 10.415,9 terutama ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 15,3% dan uang kuasi sebesar 6,0%.

Kondisi ini menunjukkan tambahan likuiditas tidak hanya tersimpan dalam deposito atau simpanan berjangka, tetapi juga berada pada instrumen yang lebih mudah digunakan untuk transaksi sehari-hari seperti uang kartal, giro, dan tabungan.

Josua mengingatkan bahwa tingginya M2 belum otomatis mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi riil. Sebab, indikator tersebut hanya menggambarkan jumlah uang yang tersedia di perekonomian, bukan kecepatan perputaran uang dalam transaksi barang dan jasa.

"Likuiditas yang naik adalah syarat yang baik bagi aktivitas ekonomi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa konsumsi, investasi, dan produksi otomatis melonjak," katanya kepada Kontan, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, perputaran ekonomi baru benar-benar menguat apabila dana tersebut mengalir ke belanja rumah tangga, investasi usaha, pembelian bahan baku, pembayaran upah, serta kredit produktif.

Dari sisi sumber pertumbuhan, Josua bilang, komposisi kenaikan M2 pada Mei tergolong sehat karena ditopang peningkatan penyaluran kredit perbankan. Kredit tumbuh 10,8% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan April yang sebesar 9,4%. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih meningkat 5,2%, naik dari 3,7% pada bulan sebelumnya.

"Kenaikan uang beredar tidak semata berasal dari ekspansi moneter, tetapi juga dari proses intermediasi perbankan yang lebih aktif," ujarnya.

Namun demikian, Josua mengatakan, komposisi pertumbuhan likuiditas tetap perlu dicermati. M1 yang tumbuh tinggi antara lain didorong oleh kenaikan giro rupiah sebesar 23,9% dan uang kartal di luar bank sebesar 16,6%.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa mencerminkan meningkatnya kebutuhan transaksi masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga dapat menunjukkan kecenderungan pelaku ekonomi untuk menahan likuiditas sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian nilai tukar, harga energi, dan suku bunga.

Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 10,8%, terutama ditopang giro yang naik 20,4% dan tabungan 10,2%, sementara simpanan berjangka hanya meningkat 3,5%. Menariknya, pertumbuhan dana korporasi mencapai 18,6%, jauh melampaui dana perorangan yang hanya tumbuh 3,5%.

"Ini memberi sinyal bahwa korporasi masih memegang likuiditas cukup besar, tetapi belum tentu seluruhnya langsung dibelanjakan atau diinvestasikan," kata Josua.

Ia menambahkan, sejumlah indikator domestik juga menunjukkan bahwa permintaan masyarakat belum sepenuhnya pulih kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2026 memang masih berada di level optimistis 120,9, tetapi turun dari 123,0 pada April. Sementara Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini juga melemah menjadi 112,2 dari sebelumnya 116,5.

Gambaran serupa terlihat pada penjualan eceran. Penjualan ritel Mei 2026 diperkirakan membaik secara bulanan, namun masih berkontraksi 3,2% secara tahunan, meski lebih baik dibanding kontraksi 3,7% pada April.

"Mesin likuiditas bergerak, tetapi mesin permintaan riil belum berakselerasi secara merata," jelasnya.

Di sisi lain, Josua menjelaskan, pertumbuhan M2 juga mencerminkan upaya Bank Indonesia menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan kecukupan likuiditas. Meski BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur Juni 2026, bank sentral tetap menjaga pasokan likuiditas melalui berbagai instrumen pasar uang.

Dia menambahkan, pertumbuhan M2 sebesar 10,8% merupakan sinyal positif bagi perekonomian nasional, namun belum dapat dijadikan bukti bahwa aktivitas ekonomi telah menguat secara signifikan.

"Tantangannya adalah memastikan likuiditas tersebut benar-benar mengalir ke sektor produktif, bukan hanya mengendap di giro korporasi, tabungan, atau instrumen keuangan jangka pendek," pungkasnya.

DPK Perbankan Tumbuh 10,8% pada Mei 2026, Simpanan Valas Melonjak

Selasa, 23 Juni 2026 13:44 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/dpk-perbankan-tumbuh-108-pada-mei-2026-simpanan-valas-melonjak>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan mencatat pertumbuhan lebih tinggi pada Mei 2026. Bank Indonesia (BI) melaporkan DPK mencapai Rp 9.698,7 triliun atau tumbuh 10,8% secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan April 2026 yang sebesar 9,5% yoy.

Di balik penguatan penghimpunan dana tersebut, simpanan dalam valuta asing (valas) melesat seiring dengan tren pelemahan rupiah. Simpanan valas tumbuh 17,8% yoy pada Mei 2026, melonjak tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya tumbuh 8,6% yoy.

Sebaliknya, pertumbuhan simpanan dalam mata uang rupiah relatif stagnan di level 9,6% yoy. Kondisi ini menunjukkan peningkatan preferensi sebagian nasabah untuk menempatkan dananya dalam instrumen berbasis valuta asing di tengah dinamika pasar keuangan global dan pelemahan rupiah.

Selain ditopang oleh simpanan valas, pertumbuhan DPK juga didukung oleh akselerasi giro dan tabungan. Data BI menunjukkan giro tumbuh 20,4% yoy pada Mei 2026, meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan 15,9% yoy pada April 2026.

Tabungan juga mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni 10,2% yoy, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,9% yoy.

Sementara itu, simpanan berjangka atau deposito mengalami perlambatan. Pada Mei 2026, deposito tumbuh 3,5% yoy, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,6% yoy pada April 2026.

Dari sisi kelompok nasabah, pertumbuhan DPK terutama berasal dari segmen korporasi. Simpanan korporasi tumbuh 18,6% yoy pada Mei 2026, meningkat dari 16,2% yoy pada bulan sebelumnya.

Di sisi lain, DPK perorangan tumbuh 3,5% yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 3,0% yoy pada April 2026. Adapun kelompok nasabah lainnya mencatat pertumbuhan 3,5% yoy, melambat dari 4,0% yoy pada bulan sebelumnya.

Kenaikan pertumbuhan DPK mencerminkan likuiditas perbankan yang tetap terjaga di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi. Di saat yang sama, lonjakan simpanan valas mengindikasikan adanya peningkatan aliran dana ke instrumen berbasis mata uang asing, seiring perkembangan kondisi pasar keuangan global dan pergerakan nilai tukar.

Meski demikian, pertumbuhan dana murah yang berasal dari giro dan tabungan tetap menjadi penopang utama likuiditas perbankan dan memberikan ruang yang lebih besar bagi industri perbankan untuk melanjutkan ekspansi kredit ke sektor produktif.

Terus Merugi, Prabowo Tutup 240 BUMN

Selasa, 23 Juni 2026 16:26 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/terus-merugi-prabowo-tutup-240-bumn>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai terus merugi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menghemat anggaran negara sekaligus menekan potensi kebocoran keuangan.

“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo dalam Kegiatan Munas NU dipantau melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026).

Prabowo mengaku baru mengetahui jumlah perusahaan negara jauh lebih banyak dibanding perkiraannya setelah menjabat sebagai presiden. Semula ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan, namun ternyata mencapai lebih dari 1.000 entitas.

“Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya seribu lebih,” katanya.

Menurut Prabowo, pemerintah berencana melanjutkan penataan BUMN dengan menutup lebih banyak perusahaan yang dinilai tidak produktif.

“Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah,” ujarnya.

Ia menilai penutupan perusahaan-perusahaan tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran hingga triliunan rupiah. Penghematan berasal dari berkurangnya beban operasional, termasuk pembayaran gaji direksi dan komisaris.

“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar,” kata Prabowo.

Presiden juga menuding perusahaan-perusahaan yang terus merugi tersebut kerap digunakan untuk menutupi praktik korupsi di internal pengelola.

“Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka,” ucapnya.

Meski demikian, Prabowo belum merinci daftar BUMN maupun entitas yang telah ditutup, termasuk besaran pasti penghematan anggaran yang diperoleh pemerintah dari kebijakan tersebut.

Prabowo: Rupiah Melemah Karena Kakayaan Indonesia Bocor ke Luar Negeri

Selasa, 23 Juni 2026 16:37 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-rupiah-melemah-karena-kakayaan-indonesia-bocor-ke-luar-negeri>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menilai pelemahan nilai tukar rupiah tidak terlepas dari besarnya kekayaan nasional yang terus mengalir ke luar negeri selama bertahun-tahun.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan hanya sedikit hasil kekayaan Indonesia yang tersisa dan dinikmati di dalam negeri.

“Pernah ada yang mengatakan rupiah kita lemah. Ya karena kekayaannya keluar. Kalau darah kita tiap hari keluar, ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri,” kata Prabowo dalam Kegiatan Munas NU dipantau melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026).

Prabowo mengatakan, data yang diterimanya menunjukkan arus keluar kekayaan nasional atau net outflow of national wealth telah berlangsung selama puluhan tahun.

Menurut Prabowo, berdasarkan data tersebut Indonesia sebenarnya mencatat keuntungan perdagangan sebesar US\$ 436 miliar selama 22 tahun. Namun, dalam periode yang sama tercatat arus dana keluar mencapai sekitar US\$ 343 miliar sehingga hanya sebagian kecil keuntungan yang bertahan di dalam negeri.

“Keuntungan US\$ 436 miliar, yang keluar US\$ 343 miliar. Yang tinggal sedikit sekali dibandingkan yang keluar,” ujarnya.

Prabowo juga menyinggung praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar.

“Para pengusaha itu bohong. Katanya jual 1.000 ton, yang dilaporkan hanya 500 ton. Artinya negara rugi,” ucapnya.

Ia mengklaim, berdasarkan perhitungan yang mengacu pada data PBB, Indonesia telah kehilangan sekitar US\$ 908 miliar atau setara sekitar Rp15.000 triliun selama 34 tahun akibat praktik tersebut.

Presiden menegaskan pemerintah akan terus berupaya menutup berbagai kebocoran penerimaan negara. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar hasil kekayaan alam Indonesia dapat lebih banyak dinikmati masyarakat dan memperkuat kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.

“Kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya tidak ada, diambil terus. Kebocoran yang kami hitung sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun dan ini sedang saya perbaiki semua,” terang Prabowo.

Pemerintah Tambah Alokasi KUR Perumahan Jadi Rp 50 Triliun

Selasa, 23 Juni 2026 14:04 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tambah-alokasi-kur-perumahan-jadi-rp-50-triliun>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menambah alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan pada 2026 menjadi Rp 50 triliun dari sebelumnya Rp 36 triliun.

Kenaikan plafon tersebut diputuskan setelah penyaluran program baru tersebut menunjukkan kinerja yang melampaui ekspektasi pada semester pertama tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, hingga 20 Juni 2026 realisasi KUR Perumahan telah mencapai Rp 19,2 triliun atau sekitar 54,6% dari target awal tahunan.

Capaian tersebut dinilai mencerminkan tingginya kebutuhan pembiayaan di sektor perumahan.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan program KUR Perumahan yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat respons positif dari masyarakat maupun pelaku usaha di sektor properti.

"Untuk itu dinaikkan dari Rp 36 triliun, hari ini diputuskan menjadi Rp 50 triliun. Jadi artinya program Presiden Prabowo ini sangat berhasil. Kalau enggak, enggak mungkin dinaikkan dari Rp 36 jadi Rp 50 triliun," ujar Ara di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Hingga pertengahan Juni, jumlah debitur program tersebut telah mencapai 226.958 orang.

Menurutnya, tingginya serapan dana menunjukkan kebutuhan pembiayaan perumahan masih sangat besar, baik untuk mendukung pembangunan rumah maupun membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.

KUR Perumahan dirancang untuk memperkuat sisi pasokan dan permintaan dalam sektor perumahan. Dari sisi pasokan, program ini memberikan akses pembiayaan kepada kontraktor, pengembang, dan toko bangunan dengan plafon pinjaman hingga Rp 20 miliar serta subsidi bunga sebesar 5%.

Sementara itu, dari sisi permintaan, masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses pembiayaan dengan bunga ringan. Pemerintah juga memberikan kemudahan berupa pembebasan agunan tambahan untuk pinjaman di bawah Rp 100 juta.

"Karena dari segi supply, teman-teman tau ya bisa sampai Rp 20 miliar bagi kontraktor, developer toko bangunan, dan bunganya disubsidi 5 persen. Bagi dari segi demand, di bawah Rp 100 juta tidak perlu jaminan ya, dan bunganya 0,5 persen per bulan," katanya.

Selain memperbesar plafon KUR Perumahan, pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program bantuan perumahan berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi keluarga penerima manfaat.

Ara menjelaskan, pemerintah ingin masyarakat yang memperoleh bantuan renovasi maupun pembangunan rumah juga mendapatkan dukungan permodalan usaha sehingga kesejahteraan keluarganya meningkat.

Dalam penyaluran KUR Perumahan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) tercatat menjadi penyalur terbesar dengan realisasi Rp 10,18 triliun atau sekitar 52,91% dari total penyaluran nasional. Posisi berikutnya ditempati BTN, BNI, BSI, dan Bank Mandiri.

Di sisi lain, pemerintah memastikan kebijakan rumah subsidi tetap dipertahankan meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia mengalami kenaikan. Ara menegaskan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi masih sebesar 5% dengan uang muka (DP) sebesar 1%.

Pemerintah juga belum berencana menaikkan harga rumah subsidi. Menurut Ara, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang terjangkau.

Investasi Mebel Jepara Tembus Rp 1,17 Triliun, Serap 8.259 Pekerja

Selasa, 23 Juni 2026 06:15 WIB

Penulis: Achmat Ikhsan

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3004719/investasi-mebel-jepara-tembus-rp-117-triliun-serap-8259-pekerja>

Jepara, Beritasatu.com - Industri mebel di Kabupaten Jepara terus menunjukkan pertumbuhan positif dengan nilai investasi yang telah menembus Rp 1,17 triliun hingga 2025. Besarnya investasi tersebut memperkuat posisi Jepara sebagai salah satu pusat industri furnitur dan ukiran kayu terbesar di Indonesia.

Untuk menjaga daya saing sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar pelatihan inovasi produk berbasis ornamen ukir dan pemanfaatan limbah kayu, sekaligus menyerahkan Kartu Mebel Jepara kepada para pekerja industri mebel, Senin (22/6/2026).

Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan pertumbuhan investasi harus diiringi dengan peningkatan kualitas produk, inovasi, dan kesejahteraan tenaga kerja yang menjadi tulang punggung industri mebel daerah.

"Saat ini Jepara dikenal dunia sebagai the world carving center. Namun kita tidak boleh hanya mempertahankan reputasi itu, melainkan harus terus mengembangkannya agar mampu menjawab tantangan pasar global," ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah daerah, sektor furnitur Jepara saat ini didukung oleh 892 perusahaan dengan total investasi lebih dari Rp 1,17 triliun. Industri tersebut juga menyerap sedikitnya 8.259 tenaga kerja dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Kinerja ekspor sektor mebel juga menunjukkan hasil yang kuat. Sepanjang 2025, nilai ekspor furnitur kayu Jepara mencapai sekitar US\$ 197 juta atau setara Rp 3,29 triliun. Produk-produk tersebut dipasarkan ke 114 negara dan berkontribusi sekitar 34,5% terhadap total ekspor Kabupaten Jepara.

Menurut Witiarso, besarnya investasi dan ekspor harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem industri melalui pengembangan produk yang lebih inovatif dan ramah lingkungan.

Karena itu, pelatihan berbasis ornamen ukir dan pemanfaatan limbah kayu dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperluas peluang pasar.

“Pasar saat ini berkembang sangat cepat. Konsumen tidak hanya mencari kualitas, tetapi juga produk yang inovatif, memiliki identitas budaya, dan memperhatikan aspek lingkungan,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap industri mebel, Pemkab Jepara menjalankan sejumlah program unggulan melalui visi Jepara Mulus. Program tersebut mencakup Festival Ukir Internasional, pengembangan Museum Ukir Nusantara, Pasar Mebel Jepara, UMKM Naik Kelas, hingga penerbitan Kartu Mebel Jepara.

Hingga saat ini, sebanyak 850 Kartu Mebel Jepara telah disalurkan dari total 1.500 kartu yang disiapkan pemerintah daerah. Kartu tersebut berfungsi sebagai instrumen pendataan sekaligus perlindungan sosial bagi para pekerja sektor mebel.

“Kartu Mebel Jepara memastikan pekerja mendapatkan akses BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga jaminan hari tua sehingga mereka memperoleh perlindungan yang layak,” jelas Witiarso.

Selain perlindungan sosial, pemegang kartu juga memperoleh prioritas akses terhadap berbagai program bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta program Sekolah Rakyat bagi keluarga yang memenuhi kriteria.

Pemkab Jepara juga memperluas kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, dan UIN Walisongo Semarang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor mebel dan ukir.

“Bagi saya, kemajuan industri mebel tidak hanya diukur dari nilai ekspor, tetapi juga dari kesejahteraan para pekerja yang berada di belakang setiap produk yang dihasilkan,” tegasnya.

Dukung Penguatan Ekonomi, Rumah BUMN Bantu Plangisasi Puluhan UMKM di Rembang

Selasa, 23 Juni 2026

Penulis: Mifta Rembang, Editor: Di/UI, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritad daerah/dukung-penguatan-ekonomi-rumah-bumn-bantu-plangisasi-puluhan-umkm-di-rembang/>

REMBANG – Untuk mendukung penguatan ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM, sebanyak 30 pelaku UMKM di Kabupaten Rembang mendapatkan bantuan program plangisasi dari PT Semen Gresik, melalui Rumah BUMN Rembang.

Koordinator Rumah BUMN Rembang, Achmad Ghufon Nurrosyid menjelaskan, program Plangisasi hadir untuk membantu UMKM mengatasi kendala visibilitas usaha, dan memudahkan masyarakat menemukan lokasi produksi. Menurutnya, banyak UMKM di Rembang memiliki produk berkualitas, namun belum didukung identitas usaha yang memadai.

Disampaikan, setelah melalui proses seleksi dan kurasi, sebanyak 30 UMKM terpilih dari 40 yang mendaftar. Penilaian berdasarkan komitmen dalam program pembinaan, kesiapan rumah produksi, serta legalitas usaha.

“Melalui program ini, kami ingin memperkuat identitas usaha para UMKM binaan agar lebih mudah dikenali masyarakat. Keberadaan plang usaha diharapkan dapat meningkatkan visibilitas, memperluas akses pasar, dan mendukung pertumbuhan usaha,” ujar Ghufron, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/6/2026)

Secara terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Rembang, M Mahfudz mengapresiasi konsistensi PT Semen Gresik melalui Rumah BUMN Rembang, dalam mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Rembang. Tak hanya membantu menjual produknya, tetapi juga konsisten mengembangkan SDM pelaku UMKM itu sendiri.

Terkait program plangisasi ini, menurutnya menjadi bukti inovasi rumah BUMN yang tidak berhenti. Plangisasi juga menjadi salah satu jawaban, tentang sebagian permasalahan yang dihadapi UMKM.

“Program plangisasi ini tidak hanya menjadi penunjuk lokasi usaha, tetapi juga menjadi simbol bahwa UMKM Rembang terus bergerak untuk naik kelas. Kami berharap, program ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM,” tutur Mahfudz.

Perwakilan pelaku UMKM, Bella Ayu Paramitha menyampaikan terima kasih kepada PT Semen Gresik dan Rumah BUMN, yang terus mendukung pengembangan pelaku UMKM. Terkait plangisasi ini sangat membantu, untuk petunjuk calon pelanggan menemukan tempat usaha mereka

“30 teman-teman UMKM merasa terbantu, tahu sendiri kan ya, harga kebutuhan lagi mahal. Ini diberi secara gratis dan ini sudah full satu perangkatnya, terus dianterin juga ke rumah, ” untkapnya.

Inpres Jalan Daerah Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Baru di Jawa Tengah

Selasa, 23 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/inpres-jalan-daerah-jadi-motor-penggerak-pertumbuhan-ekonomi-baru-di-jawa-tengah/>

PATI — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri peresmian bantuan Inpres Jalan Daerah (IJD) secara daring, dari Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (23/6/2026). Peresmian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Sampang, Jawa Timur.

Luthfi mengatakan, bantuan IJD di Jawa Tengah telah membantu menumbuhkan ekonomi desa sampai kota. Pada 2026, usulan IJD di provinsi ini diprioritaskan untuk konektivitas jalur ekonomi, dan penghubung ke destinasi wisata.

“Adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/ kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota,” kata Luthfi.

Ditambahkan, berdasarkan data, bantuan IJD TA 2025 di Jawa Tengah terdapat 30 paket pekerjaan penanganan jalan daerah. Total pekerjaan jalan sepanjang 132,62 kilometer, dengan anggaran sebesar Rp493,284 miliar. Puluhan paket tersebut tersebar di 19 kabupaten/ kota. Kabupaten Blora menjadi daerah di Jawa Tengah dengan alokasi penanganan IJD terbesar, yaitu 20,81 kilometer, dengan total anggaran Rp93,21 miliar.

Gubernur mengatakan, bantuan IJD tersebut sangat membantu dalam pembangunan jalan di provinsi ini. Melihat dampak dari penanganan jalan melalui IJD tersebut, maka pada 2026, Provinsi Jawa Tengah sudah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer, dan penanganan jembatan sepanjang 249,70 meter. Apabila disetujui, pelaksanaan konstruksi direncanakan pada tahun anggaran 2027.

“Besok kami tambah lagi. Tahun 2027 (roadmap pembangunan) kita adalah pariwisata, prioritaskan jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, dan potensi ekonomi baru,” tegasnya.

Luthfi juga sudah menginstruksikan kepada Dinas PUPR untuk terus memantau dan me-review terkait kondisi kemandapan jalan. Pada 2026 ini kondisi kemandapan jalan provinsi di Jawa Tengah harus kembali pada 94%. Sebab, di awal tahun sempat mengalami penurunan karena hujan yang berkepanjangan.

Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, untuk tahun anggaran 2025 lalu Blora memang mendapat bantuan IJD senilai Rp93 miliar. Berkat bantuan itu, jalan-jalan di perbatasan dan antarkecamatan semakin baik.

Manfaat lain adalah dampak ekonomi di daerah yang mendapatkan IJD. Daerah yang dulu terisolasi sekarang sudah terbuka. Di sisi lain, nilai jual objek pajak naik, sehingga pendapatan asli daerah juga naik.

“Ke depan sudah diminta lagi mengusulkan untuk daerah-daerah yang memang basis ketahanan pangan dan pariwisata, kita usulkan agar dapat IJD lagi,” katanya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Inpres Jalan Daerah tahun anggaran 2025 menanganai sepanjang 1.151 kilometer jalan di 37 provinsi se-Indonesia. Jalan-jalan tersebut sangat berguna untuk distribusi hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk lainnya dari desa menuju pasar, pusat distribusi, dan kawasan industri. Sebaliknya, barang dari berbagai daerah juga menuju ke desa-desa.

“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses terbatas. Biaya distribusi juga akan lebih murah, kalau ada konektivitas antara pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” katanya. (Humas Jateng)*ul

Dorong pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan kawasan wisata berbasis aglomerasi terus didukung

Selasa, 23 Juni 2026 19:56 WIB

Pewarta: Rilis, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antarane.ws.com/berita/636136/dorong-pertumbuhan-ekonomi-daerah-pengembangan-kawasan-wisata-berbasis-aglomerasi-terus-didukung>

Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang mulai disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas manfaat sektor pariwisata bagi masyarakat.

Menurut Saleh, konsep aglomerasi wisata menjadi langkah strategis untuk menghubungkan berbagai destinasi unggulan di sejumlah kabupaten dan kota dalam satu paket perjalanan yang terintegrasi.

"Konsep ini sangat baik karena tidak hanya mengembangkan satu destinasi, tetapi juga menghubungkan potensi wisata antardaerah sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,"

ujarnya dalam kegiatan Rembug Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 di Pendopo Kota Tegal, Senin (22/6/2026).

Ia menilai selama ini masih banyak destinasi wisata yang berkembang secara parsial.

Padahal, setiap daerah di Jawa Tengah memiliki potensi wisata yang dapat saling melengkapi dan diperkuat melalui kerja sama lintas wilayah.

Dengan adanya aglomerasi wisata, wisatawan diharapkan memiliki lebih banyak pilihan destinasi dalam satu perjalanan.

Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan sekaligus mendorong peningkatan belanja wisata di daerah.

"Semakin lama wisatawan berada di Jawa Tengah, maka semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha lokal, mulai dari UMKM, sektor kuliner, hingga penyedia jasa akomodasi," katanya.

Saleh juga mendukung pemanfaatan sistem informasi digital yang akan menjadi bagian dari pengembangan aglomerasi wisata.

Menurutnya, kemudahan akses informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

Melalui platform digital yang terintegrasi, wisatawan dapat memperoleh informasi mengenai destinasi wisata, kuliner, ekonomi kreatif, hingga penginapan dalam satu layanan yang mudah diakses.

Selain promosi dan digitalisasi, Saleh mengingatkan pentingnya pembangunan konektivitas antardestinas.

Infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan menuju kawasan wisata, menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berbicara tentang destinasi.

Akan tetapi juga menyangkut kemudahan akses, kenyamanan wisatawan, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam ekosistem pariwisata.

"Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata dan memperkuat daya saing pariwisata Jawa Tengah di tingkat nasional," ujar Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Ia berharap pengembangan wisata berbasis aglomerasi dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Pariwisata memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian."

"Karena itu, pengembangannya perlu dilakukan secara terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak daerah dan masyarakat," tegasnya.

Dana desa di Kudus hingga Juni 2026 capai 100 persen

Selasa, 23 Juni 2026 17:42 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antarane.ws.com/berita/636121/dana-desa-di-kudus-hingga-juni-2026-capai-100-persen>

Kudus (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat penyaluran dana desa (DD) hingga Juni 2026 mencapai 100 persen dari total alokasi dana desa tahun ini sebesar Rp43.583.324.000.

"Seluruh dana desa untuk 123 desa di Kabupaten Kudus telah tersalurkan sebelum semester pertama tahun 2026 berakhir," kata Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus Famny Dwi Arfana di Kudus, Jateng, Selasa.

Ia mengungkapkan penyaluran dana desa lebih cepat tahun ini, sebagai pengalaman tahun sebelumnya masih terdapat dana desa yang belum tersalurkan akibat perubahan kebijakan penyaluran dari pemerintah pusat yang mendekati akhir tahun anggaran.

Untuk realisasi penyaluran dana desa tahap I, kata dia, mencapai Rp22,94 miliar dan dana desa tahap II sebesar Rp20,64 miliar. Dengan demikian, total dana yang telah disalurkan mencapai Rp43,58 miliar atau 100 persen dari pagu yang tersedia.

Menurut dia, percepatan penyaluran dana desa tersebut tidak terlepas dari kesiapan pemerintah desa dalam memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mencegah terulangnya kendala seperti pada tahun sebelumnya, seluruh pemerintah desa diminta melengkapi berbagai persyaratan administrasi sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Semua desa diminta melengkapi semua persyaratannya sebelum batas akhir, sehingga tahun anggaran 2026 pada bulan Juni 2026 sudah selesai tersalurkan 100 persen," ujarnya.

Dana desa yang telah disalurkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, percepatan penanganan stunting, serta mendorong pengelolaan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Pemkab Kudus juga berharap percepatan penyaluran dana desa dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian desa dalam mendukung pembangunan daerah.

Manufaktur AS Mulai Lesu, PHK Tercepat Sejak Pandemi

Rabu, 24 Juni 2026 19:00 WIB

Reporter: Nina Dwiantika, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/manufaktur-as-mulai-lesu-phk-tercepat-sejak-pandemi-1>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kinerja sektor manufaktur Amerika Serikat (AS) mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya tensi geopolitik akibat konflik Iran, perusahaan-perusahaan manufaktur di Negeri Paman Sam ini tercatat memangkas tenaga kerja dengan laju tercepat sejak awal pandemi Covid-19.

Data US Flash Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P Global menunjukkan indeks ketenagakerjaan manufaktur turun dari 51,6 pada Mei menjadi 47 pada Juni. Angka di bawah 50 menandakan kontraksi aktivitas.

Kepala Ekonom Bisnis S&P Global Market Intelligence Chris Williamson mengatakan, penurunan tersebut menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal II-2026 masih terbatas.

Menurutnya, meski output manufaktur masih tumbuh, peningkatan tersebut sebagian besar didorong oleh aksi antisipatif perusahaan terhadap potensi gangguan rantai pasok dan kenaikan harga akibat konflik di Timur Tengah.

Pemangkas tenaga kerja pabrik saat ini berada pada level tertinggi sejak 2009 jika periode pandemi dikecualikan. "Hal ini mencerminkan kekhawatiran pelaku usaha terhadap keberlanjutan permintaan dan meningkatnya biaya bahan baku," ujar Williamson dalam laporan Reuters (24/6).

Ia menambahkan, sekitar 20% perusahaan yang disurvei juga mengaku kesulitan mendapatkan pekerja yang bersedia atau mampu bekerja di sektor manufaktur.

Meski demikian, ada sedikit kabar positif. S&P Global mencatat tekanan biaya mulai mereda pada Juni seiring turunnya harga energi menjelang akhir periode survei.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya menjanjikan kebangkitan industri manufaktur melalui berbagai insentif dan kebijakan perdagangan. Sejak kembali menjabat pada 2025, Trump mengklaim telah menarik komitmen investasi hampir US\$ 1 triliun ke sektor manufaktur.

Namun di luar sektor-sektor yang menikmati lonjakan investasi seperti pusat data kecerdasan buatan (AI), industri pertahanan, dan baja, banyak produsen masih menghadapi tekanan akibat tingginya biaya produksi serta perubahan kebijakan pemerintah yang kerap terjadi.

Data resmi menunjukkan jumlah pekerja manufaktur AS telah berkurang sekitar 77.000 orang sejak awal masa jabatan kedua Trump. Sementara itu, belanja swasta untuk pembangunan fasilitas manufaktur turun menjadi US\$ 15,2 miliar pada April 2026, atau sekitar 16% lebih rendah dibandingkan Januari 2025.

Perkembangan ini juga memicu kritik dari kubu oposisi. Senator Partai Demokrat, Elizabeth Warren dan Mark Kelly, meminta penjelasan pemerintah terkait memburuknya defisit perdagangan barang manufaktur AS.

Keduanya menilai hilangnya lapangan kerja sektor manufaktur tidak lepas dari kebijakan tarif impor yang dinilai agresif dan sering berubah, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Dengan tekanan biaya yang masih tinggi dan pasar tenaga kerja yang melemah, prospek pemulihan manufaktur AS ke depan diperkirakan masih menghadapi tantangan besar meski investasi baru terus mengalir ke sejumlah sektor strategis.

Obligasi Asia Banjir Dana Asing US\$ 5,61 Miliar di Mei: Ini Negara Paling Diincar!

Rabu, 24 Juni 2026 16:05 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/obligasi-asia-banjir-dana-asing-us-561-miliar-di-mei-ini-negara-paling-diincar>

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Pasar obligasi di kawasan Asia mencatat aliran dana asing masuk (capital inflow) di bulan Mei 2026 jadi yang terbesar dalam tiga bulan. Kenaikan capital inflow di pasar obligasi ini karena aktivitas ekonomi regional yang tangguh dan meningkatnya kehati-hatian atas reli pasar saham meningkatkan permintaan akan sekuritas utang yang relatif lebih aman.

Rabu (24/6/2026), investor asing tercatat masuk ke pasar obligasi di Asia sebesar US\$ 5,61 miliar. Di mana, pasar yang paling dilirik adalah Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India.

Ini juga jadi pembelian bersih bulanan terbesar untuk kawasan ini sejak capital inflow di Februari yang capai US\$ 6,54 miliar, menurut data dari regulator lokal dan asosiasi pasar obligasi.

Aktivitas pabrik meningkat di sebagian besar ekonomi Asia pada bulan Mei, dengan PMI Korea Selatan naik menjadi 54,8, level tertinggi sejak Maret 2021. Sementara, Jepang dan Taiwan juga diuntungkan dari lonjakan permintaan yang terkait dengan investasi kecerdasan buatan.

"Obligasi pasar negara berkembang telah diuntungkan dari pertumbuhan PDB global yang tangguh dan kekuatan komoditas - meningkatkan peran mereka sebagai alokasi utama," kata analis di UBS Global Wealth Management dalam sebuah laporan pekan lalu.

"Kami percaya imbal hasil yang tinggi dan bank sentral yang mendukung menopang prospek positif untuk utang pasar negara berkembang, yang kami beri peringkat Menarik," kata laporan UBS.

Investor asing yang masuk ke pasar obligasi Korea Selatan mencapai US\$ 4,9 miliar di bulan Mei 2026, arus masuk bulanan terbesar sejak Februari.

Obligasi Korea Selatan secara bertahap dimasukkan ke dalam indeks obligasi acuan FTSE Russell mulai April 2026, dengan inklusi penuh dijadwalkan pada November 2026.

Sementara itu, pasar obligasi Indonesia dan Thailand juga menarik arus masuk lintas batas, masing-masing sebesar US\$ 1,2 miliar dan US\$ 597 juta, karena investor asing memperpanjang pembelian untuk bulan kedua berturut-turut.

Sementara itu, obligasi Malaysia mencatat arus keluar bersih asing sebesar US\$ 1,08 miliar, karena ketegangan dalam aliansi penguasa negara tersebut meningkat.

Obligasi India juga mencatat arus keluar bersih asing sebesar US\$ 10,07 juta, dengan investor asing memperpanjang penjualan mereka untuk bulan kedua berturut-turut.

Jepang Susun Rencana Pengelolaan Cadangan Devisa yang Lebih Baik untuk Intervensi Yen

Rabu, 24 Juni 2026 11:10 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-susun-rencana-pengelolaan-cadangan-devisa-yang-lebih-baik-untuk-intervensi-yen>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah Jepang berencana untuk memeriksa cara-cara untuk meningkatkan pengelolaan cadangan devisa senilai US\$ 1,3 triliun, cadangan untuk intervensi yen di masa depan.

Menurut draf laporan strategi pertumbuhan yang ditinjau oleh Reuters pada Rabu (24/6/2026), rencana tersebut mencerminkan keinginan pemerintah untuk meningkatkan pengembalian atas cadangan dan membantu memulihkan keuangan yang terpukul, karena Perdana Menteri Sanae Takaichi berjanji untuk melakukan pengeluaran proaktif untuk mendukung ekonomi terbesar keempat di dunia.

"Pemerintah akan meneliti manfaat peningkatan manajemen dan pemanfaatan aset yang dipegang oleh sektor publik secara lebih efektif, termasuk rekening khusus dana valuta asing, dengan mempertimbangkan tujuan penggunaannya," menurut draf strategi tersebut, yang merupakan inti dari agenda kebijakan Takaichi.

Tokyo kembali melakukan intervensi besar-besaran pada akhir April ketika mata uang tersebut merosot melewati 160 per dolar, dengan operasi pembelian yen senilai 73 miliar dolar AS, yang menyebabkan penurunan cadangan devisa sebesar 5,6% pada bulan Mei, yang menyoroti keterbatasan intervensi skala besar yang berkelanjutan.

Draf strategi tersebut tidak menyebutkan perubahan spesifik pada alokasi aset cadangan devisa, yang telah terakumulasi selama intervensi pembelian dolar sebelumnya dan diyakini sebagian besar diinvestasikan dalam obligasi pemerintah AS.

Sebagian besar surplus dari cadangan devisa, termasuk pendapatan dari obligasi pemerintah AS, ditransfer ke rekening umum sebagai sumber pendanaan untuk anggaran negara.

Takaichi pernah mengatakan bahwa cadangan devisa merupakan penerima manfaat utama dari yen yang lemah dan "kinerjanya sangat baik.

Pernyataan tersebut oleh beberapa pejabat pemerintah dilihat sebagai sinyal bahwa ia berharap dapat menggunakan surplus tersebut untuk mendanai rencana kontroversial untuk menanggulangi pajak konsumsi atas makanan.

Namun, para pejabat pemerintah mengatakan bahwa mengubah portofolio cadangan devisa secara drastis akan tidak realistis, mengingat bahwa cadangan devisa terutama disimpan sebagai sumber dana siap pakai untuk intervensi mata uang.

"Akan sulit untuk mengejar keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan cadangan tersebut," kata sebuah sumber yang mengetahui masalah ini dan tidak ingin disebutkan namanya karena laporan tersebut bersifat rahasia.

Inflasi Australia Turun di Mei 2026, Namun Inflasi Inti Lebih Proyeksi Pasar

Rabu, 24 Juni 2026 09:23 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-australia-turun-di-mei-2026-namun-inflasi-inti-lebih-proyeksi-pasar>

KONTAN.CO.ID - Inflasi konsumen Australia tercatat menurun pada Mei 2026 seiring turunnya harga bahan bakar dan biaya perjalanan liburan.

Namun, inflasi inti justru lebih tinggi dari perkiraan, sehingga membuka peluang kenaikan suku bunga lanjutan oleh bank sentral tidak sepenuhnya tertutup.

Data yang dirilis pada Rabu (24/6/2026) menunjukkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan turun 0,7% pada Mei dibandingkan bulan sebelumnya, dipicu penurunan harga bensin, pakaian, serta biaya perjalanan liburan.

Secara tahunan, inflasi melambat menjadi 4,0% dari 4,2%, lebih rendah dari perkiraan ekonom sebesar 4,3%.

Meski demikian, ukuran inflasi inti yang dipangkas (trimmed mean) naik 0,4% secara bulanan, lebih tinggi dari ekspektasi 0,3%. Secara tahunan, inflasi inti meningkat menjadi 3,6%.

Rilis data yang beragam ini tidak banyak mengubah ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter. Dolar Australia bergerak stabil di level US\$0,6917, sementara imbal hasil obligasi pemerintah tenor 3 tahun turun 2 basis poin menjadi 4,399%.

Pasar saat ini memperkirakan peluang sekitar 22% bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) akan kembali menaikkan suku bunga pada Agustus, yang akan menjadi kenaikan keempat tahun ini.

Secara keseluruhan, pasar memperkirakan potensi pengetatan tambahan sekitar 15 basis poin hingga akhir tahun, atau kurang dari satu kali kenaikan 25 basis poin penuh.

Data Biro Statistik Australia menunjukkan, penurunan inflasi dipengaruhi oleh turunnya harga bahan bakar, pakaian, serta biaya perjalanan. Namun, tekanan harga inti yang masih tinggi menunjukkan inflasi belum sepenuhnya terkendali.

RBA sendiri telah menaikkan suku bunga tiga kali tahun ini menjadi 4,35% untuk meredam tekanan inflasi yang sempat dipicu lonjakan harga energi. Bank sentral juga memperkirakan inflasi utama akan mencapai puncak 4,8% pada kuartal II, sementara inflasi inti diproyeksikan naik hingga 3,8%.

Meski harga minyak global turun seiring meredanya ketegangan geopolitik, RBA tetap mewaspadai potensi dampak lanjutan dari biaya energi terhadap harga-harga lainnya di perekonomian.

Dolar AS Sentuh Puncak 13 Bulan Rabu (24/6), Ditopang Spekulasi Suku Bunga The Fed

Rabu, 24 Juni 2026 09:05 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-sentuh-puncak-13-bulan-rabu-246-ditopang-spekulasi-suku-bunga-the-fed>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat dan mencapai level tertinggi dalam 13 bulan terhadap sekeranjang mata uang utama pada Rabu (24/6/2026).

Penguatan dolar didorong meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed serta meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah aksi jual saham teknologi global.

Melansir Reuters, indeks dolar AS (DXY), yang mengukur kekuatan greenback terhadap sejumlah mata uang utama termasuk euro dan yen, naik ke level 101,44. Posisi tersebut merupakan yang tertinggi sejak 13 Mei 2025.

Aksi jual saham teknologi dan semikonduktor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir memicu penurunan bursa saham global.

Investor memanfaatkan reli panjang yang telah berlangsung sebelumnya untuk merealisasikan keuntungan, sehingga mendorong aliran dana ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar AS dan obligasi pemerintah.

Di saat yang sama, pelaku pasar semakin yakin bahwa The Federal Reserve (The Fed) masih berpeluang menaikkan suku bunga tahun ini.

Sejumlah pejabat bank sentral AS belakangan menyampaikan pandangan yang lebih hawkish seiring ketahanan ekonomi AS yang masih kuat.

Berdasarkan data CME FedWatch, pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Juli mencapai 37%, naik tajam dari 8,5% sepekan lalu. Sementara peluang kenaikan suku bunga pada September meningkat menjadi 70% dari sebelumnya 29,1%.

Kepala Strategi Valuta Asing National Australia Bank Ray Attrill mengatakan, dolar AS masih menjadi aset lindung nilai utama ketika sentimen pasar memburuk.

"Dolar AS tetap menjadi safe haven pilihan investor. Momentum saat ini masih mendukung penguatan dolar, meski sebagian besar sentimen positif sudah mulai tercermin di pasar," ujarnya.

Euro dan Pound Sterling Tertekan

Penguatan dolar membuat mata uang utama lainnya tertekan. Euro diperdagangkan di level US\$ 1,1375 atau mendekati titik terendah dalam setahun terakhir.

Sementara itu, pound sterling Inggris melemah ke US\$ 1,3199 setelah anggota Komite Kebijakan Moneter Alan Taylor menyatakan kebijakan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama masih menjadi respons yang tepat terhadap tekanan inflasi.

Dolar Australia relatif stabil di level US\$ 0,6918 menjelang rilis data inflasi terbaru. Adapun dolar Selandia Baru turun tipis menjadi US\$ 0,5665, level terendah dalam tujuh bulan.

Ketidakpastian AS-Iran Topang Permintaan Safe Haven

Permintaan terhadap dolar juga mendapat dukungan dari ketidakpastian implementasi kesepakatan damai antara AS dan Iran.

Kedua negara masih memiliki perbedaan pandangan terkait isu program nuklir Iran dan pengelolaan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan mengenai keberlangsungan kesepakatan yang baru tercapai.

Yen Dekati Level Terlemah Sejak 1986

Di Asia, yen Jepang masih berada di bawah tekanan. Mata uang Negeri Sakura diperdagangkan di level 161,57 per dolar AS setelah sempat menyentuh 161,93 pada awal pekan ini.

Jika menembus level 161,96 per dolar AS, yen akan berada pada posisi terlemah sejak 1986.

Peringatan verbal dari otoritas Jepang sejauh ini belum mampu membendung pelemahan yen. Selisih suku bunga yang lebar antara AS dan Jepang serta keraguan pasar terhadap potensi intervensi pemerintah masih menjadi faktor utama tekanan terhadap yen.

Mantan anggota Dewan Kebijakan Sayuri Shirai bahkan memperkirakan yen dapat melemah hingga 165 per dolar AS apabila The Fed benar-benar menaikkan suku bunga tahun ini.

Inflasi Sektor Jasa Jepang Bertahan 3,3%, Sinyal BoJ Bakal Naikkan Suku Bunga Lagi

Rabu, 24 Juni 2026 08:32 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-sektor-jasa-jepang-bertahan-33-sinyal-boj-bakal-naikkan-suku-bunga-lagi>

KONTAN.CO.ID - Tekanan inflasi di sektor jasa Jepang dilaporkan masih bertahan kuat sepanjang bulan Mei 2026. Data Bank of Japan (BoJ) yang dirilis pada hari Rabu (24/6/2026) menunjukkan bahwa Indeks Harga Produsen Jasa (Services Producer Price Index / SPPI) naik 3,3% secara tahunan (year-on-year / yoy).

Peningkatan tahunan pada indeks yang melacak harga transaksi antar-perusahaan (B2B) untuk sektor jasa ini sama dengan laju pertumbuhan pada bulan April 2026, yang telah direvisi ke angka 3,3%.

Angka pertumbuhan yang stabil di level tinggi ini menjadi sinyal kuat bahwa tekanan inflasi di Jepang kian meluas.

Kondisi tersebut diproyeksikan akan terus menjaga ekspektasi pasar terhadap rencana Bank of Japan untuk menaikkan suku bunga acuan lebih lanjut dalam waktu dekat.

Lonjakan Biaya Logistik Global

Berdasarkan rincian data BoJ, koridor utama yang mendorong kenaikan indeks tersebut adalah sektor transportasi dan logistik internasional.

Biaya angkutan laut (ocean freight transportation) melonjak drastis hingga 61,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, tarif transportasi penumpang udara internasional (international air passenger transportation) juga mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 17,3%.

Para analis menilai, kenaikan tajam pada komponen logistik ini berkaitan erat dengan melonjaknya biaya bahan bakar minyak (BBM) serta disrupsi jalur pelayaran akibat dampak rambatan konflik di Timur Tengah.

Bagi Bank of Japan, meluasnya inflasi dari sektor barang ke sektor jasa merupakan indikator krusial yang menunjukkan bahwa kenaikan harga tidak lagi hanya dipicu oleh faktor eksternal (cost-push), melainkan sudah mulai didorong oleh upah domestik dan permintaan yang sehat (demand-pull).

Hal inilah yang memperkuat landasan bagi BoJ untuk segera mengakhiri era kebijakan moneter longgarnya secara bertahap.

China catat pertumbuhan ekonomi signifikan di daerah-daerah otonom

Rabu, 24 Juni 2026 20:07 WIB

Pewarta: Xinhua, Editor: Indra Arief Pribadi

<https://www.antaraneews.com/berita/5621665/china-catat-pertumbuhan-ekonomi-signifikan-di-daerah-daerah-otonom>

Beijing (ANTARA) - Produk domestik bruto (PDB) gabungan lima daerah otonom setingkat provinsi di China meningkat dari 3,25 triliun yuan (1 yuan = Rp2.632) pada 2012 menjadi 8,66 triliun yuan pada 2025, menurut pejabat senior pada Rabu (24/6).

Data tersebut diumumkan oleh Duan Yijun, wakil kepala Departemen Kerja Front Persatuan Komite Sentral CPC dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Kantor Informasi Dewan Negara China.

Lima daerah otonom tersebut adalah Daerah Otonom Mongolia Dalam, Daerah Otonom Etnis Zhuang Guangxi, Daerah Otonom Xizang, Daerah Otonom Etnis Hui Ningxia, dan Daerah Otonom Uighur Xinjiang.

Indonesia dan AS Perkuat Hubungan Dagang, Nilai Perdagangan Tembus US\$ 43,8 Miliar

Rabu, 24 Juni 2026 16:45 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-dan-as-perkuat-hubungan-dagang-nilai-perdagangan-tembus-us-438-miliar>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral di tengah dinamika perdagangan global yang terus berkembang. Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Ambassador Peter M. Haymond, di Jakarta.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membahas penguatan kerja sama perdagangan kedua negara sekaligus menandai berakhirnya masa tugas Haymond di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Ambassador Haymond memperkenalkan Joy M. Sakurai yang akan melanjutkan tugas sebagai KUAI Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.

Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Haymond selama menjalankan tugasnya di Indonesia. Menurut Airlangga, berbagai inisiatif kerja sama yang terjalin selama masa penugasan Haymond telah memberikan dampak positif terhadap penguatan hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan AS.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kerja sama perdagangan dan memperluas peluang ekonomi antara kedua negara. Airlangga dan Haymond sepakat bahwa hubungan ekonomi Indonesia-AS terus menunjukkan perkembangan yang positif dan saling menguntungkan.

Pada 2025, nilai perdagangan Indonesia dan AS tercatat mencapai US\$ 43,8 miliar atau meningkat hampir 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin eratny hubungan ekonomi kedua negara di tengah dinamika perdagangan global.

Pemerintah Indonesia dan AS juga terus mendorong perluasan akses pasar serta penyelarasan kebijakan perdagangan guna memperkuat integrasi ekonomi kedua negara. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menutup pertemuan, Airlangga menyampaikan harapan agar hubungan kerja sama yang telah terjalin baik selama ini dapat terus diperkuat di masa mendatang.

“Kami berharap hubungan kerja sama yang sudah ada antara Indonesia dengan Amerika Serikat dapat terus berlanjut dan diperkuat,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Rabu (24/6/2026).

Data Uang Primer: Likuiditas Ketat di Tengah Upaya Menjaga Rupiah

Rabu, 24 Juni 2026 06:45 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112792/data-uang-primer-likuiditas-ketat-di-tengah-upaya-menjaga-rupiah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengumumkan uang primer atau base money yang disesuaikan (M0 adjusted) pada Mei 2026 mencapai Rp2.214,6 triliun. Posisi ini berkurang Rp181,9 triliun (-7,6%) dari posisi puncak pelonggaran pada akhir kuartal I-2026, tepatnya Maret 2026 sebesar Rp2.396,5 triliun. Sementara, posisi uang primer April 2026 tercatat mulai turun ke Rp2.232,2 triliun.

Data uang primer kerap menjadi gambaran terkait likuiditas dalam sistem perekonomian. Indikator berkurangnya uang dalam sistem perekonomian selama dua bulan terakhir mencerminkan stabilitas rupiah beberapa waktu terakhir dibayar dengan kondisi likuiditas yang lebih ketat.

Langkah stabilisasi nilai tukar rupiah ini juga sejalan dengan lonjakan instrumen pengendalian moneter Bank Indonesia (BI). Posisi pengendalian moneter meningkat dari Rp541,9 triliun pada Mei 2025, menjadi Rp855,1 triliun pada Mei 2026, naik sebesar 57,8% secara tahunan.

Kenaikan ini menggambarkan BI semakin aktif menyerap kelebihan likuiditas melalui berbagai instrumen, salah satunya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan instrumen operasi moneter lainnya.

Dari sisi stabilitas makro, kebijakan tersebut nampaknya mulai menunjukkan hasil. Meski turun 2,6% secara tahunan, aktiva luar negeri bersih (net foreign assets) masih terjaga di atas Rp2.000 triliun, tepatnya Rp2.038 triliun.

Turunnya aktiva luar negeri bersih ini disebabkan oleh kenaikan kewajiban kepada bukan penduduk yang melonjak 34%, setara Rp204,1 triliun secara tahunan, dari Rp599,5 triliun menjadi Rp803,6 triliun.

Konsekuensi Ekonomi

Keberhasilan bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar memiliki konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi. Hal ini terlihat dari terbatasnya ruang ekspansi likuiditas perbankan dalam data uang primer periode Mei.

Giro bank umum di BI tercatat turun menjadi Rp417,6 triliun, dari posisi Maret Rp417,6 triliun. Ini menggambarkan likuiditas yang tersedia di sistem perbankan tak lagi selonggar beberapa bulan sebelumnya.

Dalam kondisi tersebut, bank cenderung lebih selektif dalam menyalurkan kredit yang dapat berpotensi menahan ekspansi investasi dan aktivitas produksi untuk segmen korporasi atau industri. Sedangkan bagi segmen rumah tangga, dampaknya dapat muncul melalui terbatasnya pertumbuhan kredit konsumsi atau pembiayaan sektor riil.

Namun, secara tahunan, giro bank umum di BI tercatat masih tumbuh 14% dari posisi Mei 2025 yang tercatat Rp366,3 triliun. Begitu juga dengan giro bank umum di BI (adjusted) tumbuh 11,7%, bertambah Rp87,5 triliun dari Rp750,2 triliun pada Mei 2025, menjadi Rp837,6 triliun pada Mei 2026.

Meski begitu, data uang primer edisi Mei tetap memperlihatkan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya mengalami pelemahan. Uang kartal yang diedarkan tumbuh 12,1% menjadi Rp1.323,7 triliun pada Mei, dari periode yang sama tahun lalu.

Meningkatnya peredaran uang tunai di masyarakat ini menunjukkan bahwa aktivitas transaksi dan konsumsi masyarakat masih berlangsung secara positif dan menopang pertumbuhan ekonomi.

Sementara dari sisi fiskal, kewajiban BI kepada pemerintah tercatat turun 33,4% sekitar Rp150 triliun, menjadi Rp300,2 triliun, dibandingkan tahun lalu Rp450,5 triliun.

Hal ini mengindikasikan setidaknya sebagian dana pemerintah yang sebelumnya tersimpan di BI mulai mengalir ke perekonomian melalui belanja negara. Dengan kata lain, fiskal mulai mengambil peran lebih besar untuk menopang pertumbuhan di tengah kondisi moneter yang ketat.

Bukan tanpa sebab, memasuki kuartal II-2026 risiko eksternal semakin tinggi, membuat kebijakan moneter tak punya cukup ruang untuk sepenuhnya mendukung pertumbuhan. Sepanjang kuartal II-2026, rupiah telah melemah 4,76%, padahal pada kuartal I-2026 pelemahan rupiah relatif terbatas, hanya 1,79%. Sehingga, sepanjang tahun ini pelemahan rupiah tercatat sebesar 6,47% dan menjadi mata uang terlemah di kawasan Asia.

Dengan begitu, data uang primer kali ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dengan dukungan konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah, sementara kontribusi kredit dan investasi swasta cenderung terbatas.

Stimulus Ekonomi Bisa Sangga Daya Beli Kelas Menengah-Bawah

Rabu, 24 Juni 2026 14:30 WIB

Lisa Listiani

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112860/stimulus-ekonomi-bisa-sangga-daya-beli-kelas-menengah-bawah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah baru saja mengumumkan stimulus ekonomi yang akan dikucurkan oleh pemerintah pada semester II-2026 mendatang dengan total dana sebesar Rp26,34 triliun yang terdiri dari bantuan pangan, insentif transportasi dan juga anggaran magang dan vokasi.

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menyebut bahwa stimulus-stimulus ini dapat mendongkrak daya beli masyarakat menengah dan masyarakat bawah terutama dalam jangka pendek.

Bantuan pangan misalnya, menurutnya akan mendongkrak daya beli masyarakat kelas bawah dalam jangka pendek, apalagi kelompok bawah memiliki porsi belanja pangan yang besar dalam pengeluaran rumah tangga, sehingga bantuan beras dan stabilisasi harga pangan langsung terasa pada ruang belanja harian.

Apalagi pemerintah menyebut bantuan pangan dilanjutkan untuk Juli, Agustus, dan September dengan 33,24 juta penerima dan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,54 triliun, ditambah stabilisasi harga pangan seperti subsidi kedelai Rp2.000 per kg untuk kuota 250.000 ton.

“Jadi, dari sisi perlindungan sosial, kebijakan ini tepat sasaran secara fungsi karena menahan beban biaya hidup saat harga pangan dan energi masih berisiko naik,” kata Josua kepada Bloomberg Technoz, dikutip Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Josua menilai bahwa efektivitas bantuan pangan ini masih terbatas lantaran bantuan pangan adalah penyangga daya beli, bukan mesin pencipta pendapatan baru.

Josua menyebut bahwa dampaknya baru akan kuat jika penyalurannya tepat sasaran, tepat waktu, dan diiringi pengendalian pasokan pangan.

“Kalau tidak, bantuan ini hanya memindahkan tekanan sementara dari rumah tangga ke APBN tanpa menyelesaikan akar masalah, yaitu harga pangan yang mudah bergejolak, distribusi yang belum efisien, dan pendapatan kelompok bawah yang belum naik secara berkelanjutan,” kata Josua.

Karena itu, menurutnya bantuan pangan perlu dibaca sebagai kebijakan darurat yang berguna, tetapi harus dilengkapi dengan perbaikan data penerima, penguatan stok beras, pengendalian harga di daerah, serta dukungan produksi pangan agar harga tidak kembali melonjak setelah bantuan selesai.

Insentif Bagi Kelas Menengah

Sementara itu, Josua menyebut bahwa insentif untuk masyarakat kelas menengah seperti insentif transportasi dan program magang bisa membantu, tetapi derajat efektivitasnya berbeda.

Ia menyebut bahwa diskon transportasi lebih berfungsi menjaga mobilitas dan konsumsi selama masa liburan, bukan menciptakan pekerjaan berkualitas secara langsung.

Pemerintah Umumkan Stimulus Semester II-2026, Kucurkan Rp26,34 T (Bloomberg Technoz/Asfahan)

“Kebijakan ini bisa membantu kelas menengah menekan biaya perjalanan, mendorong sektor pariwisata, dan menjaga belanja masyarakat, tetapi manfaatnya cenderung sementara dan lebih banyak dirasakan oleh kelompok yang memang sudah memiliki kemampuan untuk bepergian,” kata Josua.

Pemerintah menyiapkan total anggaran insentif transportasi sekitar Rp1,54 triliun untuk dua periode besar, yaitu libur sekolah dan Natal Tahun Baru, dengan sasaran jutaan penumpang.

Sementara itu, Josua menilai bahwa program magang dan vokasi lebih relevan untuk pasar kerja, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada keterhubungan dengan kebutuhan perusahaan.

Pemerintah menyebut anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dengan fokus antara lain lulusan SMA dan SMK sebanyak 220.000 orang serta 50.000 orang terdampak PHK.

Sementara evaluasi program sebelumnya menunjukkan 65.245 peserta mengikuti magang di 8.048 perusahaan atau instansi, sekitar 84% peserta merasa puas, sekitar 67% merasa program sangat membantu kondisi ekonomi, dan sekitar 30% peserta mendapat tawaran kerja langsung.

Menurut Josua angka ini menunjukkan bahwa program magang belum cukup kuat dipandang sebagai insentif karena masih ada sekitar 37,6% peserta yang belum mendapat tawaran kerja sampai program selesai.

“Bagi lulusan S1, program ini akan efektif jika tidak hanya menjadi tempat menunggu pekerjaan, melainkan menjadi jembatan menuju pekerjaan tetap,” tambahnya

Artinya, program magang harus diarahkan ke sektor yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja terampil, seperti manufaktur, jasa keuangan, perdagangan, teknologi, logistik, energi, kesehatan, pangan, dan ekonomi kreatif.

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede saat POV Talks Bloomberg Technoz di Jakarta, Senin (18/5/2026). (Bloomberg Technoz/ Andean Kristianto)

Menurut Josua perlu ada ukuran keberhasilan yang jelas, seperti berapa persen peserta direkrut setelah tiga sampai enam bulan, berapa kenaikan pendapatan setelah mengikuti program, dan apakah pekerjaan yang diperoleh sesuai bidang keahlian.

“Tanpa ukuran seperti itu, program magang hanya akan menjadi bantuan uang saku sementara yang memperbaiki sentimen, tetapi belum memperbaiki kualitas pasar kerja,” kata Josua.

Daya Beli Tak Jatuh

Josua juga mengingatkan konteks pemerintah dalam mengucurkan inisiatif ini yakni data konsumen yang menunjukkan keyakinan masyarakat masih optimistis, dengan Indeks Keyakinan Konsumen Mei 2026 sebesar 120,9, tetapi lebih rendah dari 123,0 pada bulan sebelumnya.

“Indeks kondisi ekonomi saat ini juga turun dari 116,5 menjadi 112,2. Ini menandakan daya beli tidak jatuh, tetapi mulai lebih berhati-hati,” katanya.

Sementara itu, penjualan eceran Mei 2026 diperkirakan masih berkontraksi 3,2% secara tahunan, meskipun membaik dibanding April yang berkontraksi 3,7%.

“Jadi, stimulus Rp26 triliun ini tepat waktu untuk menahan perlambatan konsumsi, tetapi tidak cukup besar untuk mengubah arah ekonomi secara struktural bila tidak disertai penciptaan pekerjaan dan kenaikan pendapatan,” katanya.

Menurut Josua, bantuan pangan cukup efektif untuk kelompok bawah sebagai peredam tekanan biaya hidup, sementara insentif transportasi lebih bersifat penopang konsumsi jangka pendek.

Sementara itu, program magang dapat lebih berdampak bagi masyarakat menengah dan lulusan S1 jika dirancang sebagai jalur masuk ke pekerjaan tetap, bukan sekadar program sementara.

“Rekomendasi saya, pemerintah perlu mengubah ukuran keberhasilan stimulus dari sekadar jumlah anggaran dan jumlah penerima menjadi dampak nyata terhadap daya beli, penyerapan kerja, dan kualitas pekerjaan,” katanya.

Menurutnya, APBN memang perlu hadir sebagai penyangga ekonomi, tetapi tetap harus terarah, terukur, dan menjaga disiplin fiskal agar tidak hanya menghasilkan dorongan sesaat, melainkan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ekonom: Kebijakan BI Belum Sasar Akar Masalah Rupiah

Rabu, 24 Juni 2026 15:35 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112894/ekonom-kebijakan-bi-belum-sasar-akar-masalah-rupiah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin (bps) dalam sebulan terakhir belum cukup menysasar akar masalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, BI menaikkan BI Rate sebesar 50 bps pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode bulanan, 20 Mei 2026. Kemudian, bank sentral kembali mengerek suku bunga acuan 25 bps pada RDG mingguan atau biasa dikenal dengan istilah RDG insidental, 9 Juni 2026. Terakhir, BI terus menjalankan kebijakan moneter ketat dengan meningkatkan BI Rate 25 bps pada 18 Juni lalu.

"Kenaikan BI Rate hingga 100 bps sejak 20 Mei 2026 tidak sepenuhnya keliru, tetapi kebijakan itu belum cukup menysasar akar masalah rupiah. BI harus menaikkan bunga karena rupiah melemah, forward bergerak ke atas, dan pasar membutuhkan jangkar ekspektasi," ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan, jika BI tidak merespons, pelemahan rupiah bisa lebih tajam dan inflasi impor dapat naik lebih cepat.

Persoalannya, akar tekanan rupiah tidak hanya berada pada selisih suku bunga. Menurut dia, pelaku pasar juga membaca risiko fiskal, risiko pembiayaan kembali atau refinancing utang valas, likuiditas Surat Berharga Negara (SBN), beban pembayaran obligasi dolar 2026–2036, dan risiko reputasi dari Patriot Bond serta Merah Putih Bond.

Kenaikan bunga dapat membuat aset rupiah lebih menarik, tetapi ia juga menaikkan biaya kredit, menahan investasi, menekan valuasi saham, dan memperbesar beban pembiayaan sektor riil.

"Karena itu, kebijakan BI tepat sebagai pertahanan jangka pendek, tetapi tidak cukup sebagai solusi utama," tegas Syafruddin.

Di sisi lain, pemerintah harus mengambil bagian lebih besar untuk menurunkan premi risiko. Beberapa kebijakan yang bisa dilakukan ialah menjaga disiplin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan membatasi potensi crowding out dari instrumen khusus. Selain itu, memastikan aturan pelaksana Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tidak membuka moral hazard, memperkuat cadangan devisa, dan memperluas local currency transaction (LCT) secara nyata.

"Tanpa perbaikan di sisi fiskal, tata kelola, dan pasokan devisa, kenaikan BI Rate hanya akan membeli waktu dengan biaya ekonomi yang semakin mahal," tuturnya.

Menurut dia, rupiah masih melemah karena tekanan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi moneter. BI memang sudah menaikkan BI Rate, memperkuat operasi pasar, menjaga likuiditas valas, dan menahan ekspektasi melalui instrumen pasar uang. Akan tetapi, tekanan rupiah berasal dari kombinasi faktor yang lebih luas.

Faktor penyebab rupiah melemah antara lain dolar AS yang masih kuat, imbal hasil atau yield obligasi global tetap tinggi, arus modal ke emerging market selektif, kebutuhan valas domestik besar, dan pasar masih meminta premi risiko tinggi terhadap aset Indonesia.

Data terakhir menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak ke sekitar Rp17.955/US\$, forward 3 bulan berada di sekitar 18.065, yield SBN 10 tahun naik ke sekitar 7,263%, CDS 5 tahun mendekati 90 bps, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun ke sekitar 6.002.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa pasar tidak hanya menguji kebijakan BI, tetapi juga menguji kredibilitas fiskal, kualitas pembiayaan pemerintah, tata kelola Danantara, risiko Pasal 50A dalam UU No. 4 Tahun 2026, serta kemampuan Indonesia memperkuat devisa riil.

"Karena itu, rupiah tetap melemah walau BI sudah bertindak agresif. Suku bunga dapat menahan tekanan, tetapi tidak bisa sendirian memperbaiki neraca valas, menurunkan premi risiko fiskal, dan memulihkan kepercayaan investor," paparnya.

Dia menambahkan rupiah akan lebih stabil jika BI memperoleh dukungan nyata dari APBN yang kredibel, penerbitan utang yang hati-hati, transparansi instrumen khusus, ekspor bernilai tambah, efisiensi impor energi, dan pasar lindung nilai yang lebih dalam.

Rupiah Ditutup Rp17.943/US\$

Rabu, 24 Juni 2026 16:24 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112897/rupiah-ditutup-rp17-943-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah melemah 0,55% pada sesi perdagangan Rabu (24/6/2026) ke Rp17.943/US\$, bersama hampir semua mata uang Asia.

Pelemahan rupiah dipicu oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang cukup persisten dalam beberapa hari terakhir, seiring makin tingginya ekspektasi pasar bahwa bank sentral AS akan kembali mengambil langkah hawkish untuk mengembalikan inflasi ke target 2%.

Indeks dolar AS yang berada di level 101,58, tertinggi sejak Mei 2025, membawa sebagian besar mata uang kawasan hari ini berada di zona merah.

Baht Thailand melemah paling tajam 0,78%, disusul won Korea Selatan, rupiah, dolar AS, peso Filipina, yuan offshore, yuan China, yen Jepang, dan dolar Singapura. Sebaliknya, hanya ringgit Malaysia menguat terbatas bersama rupee India dan dolar Hong Kong.

Dari dalam negeri, sentimen MSCI membayangi pergerakan rupiah di tengah kerentanan eksternal. Meski Indonesia berhasil mempertahankan status emerging markets, MSCI masih menyoroti sejumlah isu struktural terkait transparansi kepemilikan saham atau penentuan free float.

Setelah reformasi digulirkan oleh otoritas, MSCI menilai efektivitasnya masih perlu dipantau, dan akan kembali ditinjau pada November mendatang.

Jika melihat mata uang kawasan yang kompak berada di zona merah, maka terlihat bahwa tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal. Pelaku pasar mulai mengantisipasi sikap

yang lebih agresif dari bank sentral AS, setelah sejumlah indikator ekonomi menunjukkan inflasi masih bertahan di atas 2%.

Saat ini, pelaku pasar memperkirakan The Fed berpotensi menaikkan Federal Funds Rate (FFR) secara bertahap hingga total 50 basis poin (bps) dalam dua pertemuan mendatang, yakni Oktober dan Desember.

Ekspektasi ini lantas mendorong investor global kembali memburu aset berbasis dolar AS yang menawarkan imbal hasil tinggi dengan risiko relatif rendah.

Arus modal tersebut terlihat dari naiknya permintaan terhadap US Treasury yang mengalami penurunan imbal di semua tenor. Tenor 2 tahun (-2,9 bps) 4,19%, tenor 3 tahun (-2,8 bps) 4,21%, tenor 5 tahun (-2,1 bps) 4,26%, tenor 10 tahun (-1,4 bps) 4,49%.

Sedangkan, pergerakan yield surat utang RI berdenominasi dolar AS (INDON) cukup beragam. Yield tenor 2 tahun masih mencatat penurunan 0,2 bps ke 4,24%, 5 tahun naik 0,3 bps ke 4,84%. Namun tenor acuan 10 tahun, turun 1,5 bps jadi 5,43%.

Naiknya permintaan terhadap US Treasury membuat kebutuhan terhadap dolar AS semakin tinggi, hal ini yang menopang penguatan greenback terhadap hampir seluruh mata uang utama dan negara berkembang.

Ke depan, perhatian pasar akan kembali tertuju pada arah kebijakan Bank Indonesia. Pelaku pasar memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga, setidaknya dua kali lagi tahun ini sebesar 50 bps pada pertemuan berikutnya secara bertahap, hingga menjadi 6,25%.

Daya Saing RI Turun ke Peringkat 48 Dunia 2026, Ini Tantangannya

Rabu, 24 Juni 2026 17:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112926/daya-saing-ri-turun-ke-peringkat-48-dunia-2026-ini-tantangannya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Daya saing Indonesia dalam pemeringkat global IMD World Competitiveness 2026 merosot delapan peringkat menjadi posisi 48 dari total 70 negara yang dinilai. Pada 2025, Indonesia berada di peringkat 40.

Padahal dua tahun sebelumnya Indonesia sempat mencatatkan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaannya dalam pemeringkatan tersebut dengan menempati posisi ke-27 pada 2024.

Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia menghadapi lima tantangan utama di tahun ini. Tantangan itu di antaranya meningkatnya konfrontasi ekonomi global yang mengancam ketahanan energi nasional.

"Konfrontasi ekonomi global mengancam keamanan energi nasional," dikutip dari laporan IMD World Competitiveness Booklet 2026, Rabu (24/6/2026).

Tak hanya itu, IMD juga menilai pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan, penyesuaian alokasi anggaran pemerintah, keterbatasan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta terbatasnya sumber pembiayaan juga menjadi tantangan pada 2026.

Data IMD menunjukkan perjalanan daya saing Indonesia dalam lima tahun terakhir bergerak cukup fluktuatif.

Indonesia berada di posisi ke-44 pada 2022, naik menjadi peringkat ke-34 pada 2023, lalu mencapai posisi tertinggi di peringkat ke-27 pada 2024. Namun, setelah itu Indonesia turun ke posisi ke-40 pada 2025 dan kembali merosot ke peringkat ke-48 pada 2026.

Turun di Asia Pasifik

Dalam laporan tersebut, posisi Indonesia juga melemah di kawasan Asia Pasifik yang terdiri atas 15 negara. Peringkat RI juga merosot tiga peringkat dari sebelumnya 14 menjadi posisi 11.

Sementara di kelompok negara dengan jumlah penduduk lebih dari 20 juta jiwa, posisi Indonesia turun dari urutan ke-16 menjadi ke-21.

IMD juga mencatat sejumlah indikator dasar ekonomi Indonesia. Pada 2025, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 284,44 juta jiwa dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar US\$1,45 triliun.

Pertumbuhan ekonomi riil tercatat 5,1%, tingkat inflasi 1,91%, dan tingkat pengangguran sebesar 4,85%. Sementara jumlah angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang.

Dari sisi eksternal, neraca transaksi berjalan Indonesia tercatat minus 0,10% terhadap PDB. Adapun stok investasi asing langsung (FDI inward stock) mencapai US\$305,7 miliar pada 2024, sedangkan aliran investasi asing langsung tercatat sebesar 1,74% terhadap PDB.

Kinerja Ekonomi Jadi Kekuatan

IMD menilai daya saing suatu negara berdasarkan empat faktor utama, yakni economic performance atau kinerja ekonomi, government efficiency atau efisiensi pemerintah, business efficiency atau efisiensi bisnis, dan infrastructure atau infrastruktur.

Keempat faktor tersebut kemudian dipecah lagi menjadi 20 subfaktor dan ratusan indikator statistik serta survei persepsi pelaku usaha.

Pada 2026, faktor yang relatif paling baik bagi Indonesia adalah kinerja ekonomi atau economic performance yang berada di posisi ke-24 dunia. Namun, tiga faktor lainnya masih tertinggal.

RI berada di peringkat ke-50 untuk efisiensi pemerintah, peringkat ke-53 untuk efisiensi bisnis, dan posisi ke-42 untuk infrastruktur. Secara terperinci, pada faktor kinerja ekonomi, Indonesia memperoleh peringkat ke-24 untuk ekonomi domestik, posisi ke-50 untuk perdagangan internasional, peringkat ke-37 untuk investasi internasional, urutan ke-28 untuk ketenagakerjaan, dan posisi ke-10 untuk indikator harga.

Sementara pada faktor efisiensi pemerintah, Indonesia menempati peringkat ke-25 untuk keuangan publik, posisi ke-12 untuk kebijakan pajak, peringkat ke-50 untuk kerangka institusi, posisi ke-43 untuk regulasi bisnis, dan peringkat ke-54 untuk kerangka sosial.

Pada efisiensi bisnis, Indonesia berada di peringkat ke-53 untuk produktivitas dan efisiensi, posisi ke-21 untuk pasar tenaga kerja, peringkat ke-51 untuk sektor keuangan, posisi ke-55 untuk praktik manajemen, serta urutan ke-53 untuk sikap dan nilai yang mendukung dunia usaha.

Pada aspek infrastruktur, RI menempati posisi ke-42 untuk infrastruktur dasar, peringkat ke-47 untuk infrastruktur teknologi, posisi ke-48 untuk infrastruktur sains, peringkat ke-65 untuk kesehatan dan lingkungan, serta posisi ke-63 untuk pendidikan.

Harga cabai rawit Rp71.600/kg, telur ayam Rp29.800/kg di Rabu pagi

Rabu, 24 Juni 2026 09:19 WIB

Pewarta: Muhammad Harianto, Editor: Evi Ratnawati

<https://www.antaranews.com/berita/5620515/harga-cabai-rawit-rp71600-kg-telur-ayam-rp29800-kg-di-rabu-pagi>

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp71.600 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp29.800 per kg di Rabu pagi.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, pukul 08.53 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp52.250 per kg, bawang putih Rp44.150 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.650 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.500 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.300 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.100 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.600 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.050 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp54.950 per kg, cabai merah keriting Rp54.150 per kg, dan cabai rawit hijau Rp52.300 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp36.950 per kg, daging sapi kualitas I Rp149.850 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp140.950 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.300 per kg, gula pasir lokal Rp19.200 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.700 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp24.300 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp23.550 per liter.

BPS Solo Pastikan Sensus Ekonomi 2026 Tak Berkaitan dengan Pajak, Warga Diminta Tak Khawatir

Rabu, 24 Juni 2026 20:10 WIB

Labib Zamani, Aloysius Gonsaga AE

<https://regional.kompas.com/read/2026/06/24/201044978/bps-solo-pastikan-sensus-ekonomi-2026-tak-berkaitan-dengan-pajak-warga>

SOLO, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solo, Jawa Tengah meminta masyarakat atau pelaku usaha tidak khawatir ketika didatangi oleh petugas sensus ekonomi (SE) 2026.

Pernyataan itu disampaikan Kepala BPS Kota Solo, Ratna Setyowati, menanggapi adanya petugas sensus ekonomi di beberapa daerah mendapat penolakan warga saat melakukan sensus ekonomi.

Retna menjelaskan bahwa SE 2026 yang dilakukan petugas lapangan secara door to door tidak ada kaitannya dengan perpajakan.

"Jadi sama sekali dari BPS itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Kami sudah meyakinkan itu bahwa data kami yang kami kumpulkan ini rahasia dijamin undang-undang," kata Ratna di Solo, Jawa Tengah, Rabu (24/6/2026).

Ratna menambahkan, pihaknya tidak bisa memungkiri pertanyaan yang disampaikan petugas sensus ekonomi membuat masyarakat takut.

"Mungkin kekhawatiran dari masyarakat karena pertanyaan kami mungkin akan menjadikan efek ke hal-hal yang lain, di antaranya pajak," ungkapnya.

Petugas tak akan tanya data mikro masyarakat

Ratna menegaskan, petugas sensus ekonomi yang diterjunkan ke lapangan tidak akan menanyakan data mikro masyarakat. Semua yang ditanyakan petugas data makro.

"Menjadi kode etik kami untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Artinya di sini kami diminta lebih menguatkan koordinasi dengan wilayah," katanya.

Menurut Ratna, Pemkot Solo sudah mengeluarkan surat edaran Wali Kota terkait dukungan program sensus ekonomi 2026.

Surat edaran tersebut sudah diteruskan ke pemangku wilayah meliputi kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW.

"Surat edaran dari beliau (Wali Kota) harapannya akan sangat membantu saat teman-teman di wilayah," ujar dia.

Dikatakan Ratna, selama 10 hari pendataan sensus ekonomi tepatnya mulai 15 Juni, baru 9,9 persen atau 22.750 pelaku usaha yang terdata dari total sekitar 230.000 pelaku usaha.

"Targetnya 100 persen dari 230.000 pelaku usaha," imbuhnya.

Sekda Jateng Dorong Semarang Business Matching 2026 Perkuat Industri Pariwisata Daerah

Rabu, 24 Jun 2026 15:09 WIB

<https://kabarjateng.id/ekonomi-dan-bisnis/sekda-jateng-dorong-semarang-business-matching-2026-perkuat-industri-pariwisata-daerah/>

SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut positif penyelenggaraan Semarang Business Matching 2026 yang berlangsung di Hotel MG Setos Semarang, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah pertemuan antara pelaku usaha pariwisata, mulai dari penyedia layanan wisata hingga calon mitra bisnis dari berbagai daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat membuka acara menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Karena itu, kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli jasa wisata dinilai sangat strategis dalam mendorong kemajuan industri pariwisata di Jawa Tengah.

Menurutnya, sektor konsumsi masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Oleh sebab itu, peningkatan kunjungan wisatawan dari luar daerah perlu terus didorong agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

“Ketika wisatawan datang ke Jawa Tengah, mereka akan menggunakan jasa penginapan, membeli makanan, hingga berbelanja. Aktivitas tersebut tentu akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” jelas Sumarno.

Ia mencontohkan sejumlah negara yang berhasil mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Dubai, yang dahulu dikenal sebagai wilayah gurun, kini berkembang menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Sementara Seychelles, negara kepulauan kecil di Afrika, mampu menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung perekonomiannya.

Untuk itu, Sumarno menilai penguatan jejaring antar pelaku usaha serta pengembangan paket wisata yang beragam menjadi pekerjaan penting ke depan.

Ia optimistis Jawa Tengah memiliki potensi besar karena didukung berbagai destinasi wisata alam, budaya, sejarah, hingga wisata buatan yang tersebar di berbagai daerah.

“Melalui forum ini, kami berharap terjalin kerja sama yang semakin kuat sehingga dapat mempercepat pengembangan sektor pariwisata Jawa Tengah,” katanya.

Sementara itu, Project Director Semarang Business Matching 2026, Sri Astuti, menjelaskan bahwa Semarang menjadi kota keempat penyelenggaraan kegiatan tersebut pada tahun ini.

Sebelumnya acara serupa telah digelar di Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Setelah Semarang, agenda akan berlanjut ke Bali, Makassar, Bangkok, dan Jakarta.

Ia mengungkapkan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah berjalan sejak 2024 dengan nama Info Wisata Table Talk.

Tahun ini, peserta yang hadir berasal dari 18 kota di Indonesia, terdiri atas perwakilan hotel, event organizer, konsultan pariwisata, hingga pengelola destinasi wisata.

Adapun peserta buyer berasal dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk kawasan Pantura Timur, Pantura Barat, serta Semarang dan sekitarnya.

Sri Astuti berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun kemitraan dan memperluas jaringan bisnis di sektor pariwisata.

“Mengusung semangat Happy Selling, Happy Dealing, Happy Travelling, kami ingin seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan suasana yang menyenangkan sekaligus menghasilkan kerja sama yang bermanfaat,” tuturnya. (dkp)

Produksi Padi Jateng Tembus 6,69 Juta Ton, Ahmad Luthfi Siapkan Strategi Hadapi Kemarau

Rabu, 24 Jun 2026 13:35 WIB

Adityo Dwi Riyantoto

https://radarsemarang.jawapos.com/berita/2606240045/produksi-padi-jateng-tembus-669-juta-ton-ahmad-luthfi-siapkan-strategi-hadapi-kemarau#google_vignette

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot produksi padi untuk memenuhi target nasional sebesar 10,5 juta ton pada 2026. Hingga periode Januari–Juli 2026, produksi padi Jawa Tengah diproyeksikan mencapai 6,69 juta ton gabah kering giling (GKG) atau sekitar 63,43 persen dari target produksi tahun 2026.

Capaian itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat Panen Raya Padi bersama para petani di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Rabu, 24 Juni 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Luthfi melakukan panen menggunakan combine harvester, meninjau pengolahan lahan pascapanen, serta berdialog dengan petani dan pemangku kepentingan sektor pertanian.

Luthfi mengatakan, panen raya tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas capaian produksi pertanian di wilayahnya. Namun demikian, Ia berharap kepada berbagai pihak agar mulai menyusun langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.

“Ke depan tantangannya adalah perubahan musim. Perkiraan musim kemarau akan panjang. Karena itu seluruh bupati dan wali kota harus melakukan mapping (pemetaan) wilayah yang terdampak kekeringan agar target swasembada pangan dapat terpenuhi,” ujarnya.

Berbagai langkah antisipasi akan dilakukan melalui pipanisasi, sumurisasi, pemanfaatan sumber air baku, hingga distribusi bantuan pompa sesuai kebutuhan di lapangan.

Dalam dialog bersama petani, sejumlah petani menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari kebutuhan air untuk musim tanam ketiga (MT III), jaringan listrik untuk sumur pertanian, bantuan combine harvester, alat pengolah tanah, hingga perbaikan jalan usaha tani dan saluran irigasi.

Menanggapi hal itu, Luthfi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengoptimalkan dukungan sarana dan prasarana pertanian. Untuk kebutuhan alat panen, Pemprov akan mengatur penggunaan combine harvester milik provinsi secara bergilir sekaligus mengusulkan tambahan bantuan alsintan kepada Kementerian Pertanian.

Selain itu, Jawa Tengah juga telah menerima sekitar 17 ribu unit pompa yang akan didistribusikan sesuai kebutuhan daerah, guna membantu pengairan lahan pertanian selama musim kemarau.

“Yang penting air sampai ke sawah dan kebutuhan petani terpenuhi,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Pelaksanaan Sungai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Rizhali Triutomi Sahan memastikan, pasokan air irigasi untuk wilayah Bendosari dan sekitarnya masih mencukupi hingga Oktober 2026.

“Tidak ada rencana penutupan aliran irigasi, sehingga kebutuhan air untuk musim tanam ketiga tetap dapat terjaga,” tegasnya.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, para petani telah berperan besar menjaga ketahanan pangan, termasuk saat masa pandemi Covid-19 ketika sektor pertanian tetap berjalan di tengah berbagai pembatasan aktivitas masyarakat.

“Kami terus berupaya mendukung petani melalui bantuan alsintan, pembangunan irigasi, sumur dalam, dan jalan usaha tani. Namun kami juga berharap dukungan dari pemerintah provinsi agar kebutuhan petani bisa terpenuhi secara optimal,” kata Etik. (*)

Pemprov Jateng: Semarang Business Matching 2026 genjot sektor pariwisata

Rabu, 24 Juni 2026 19:36 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Heru Suyitno

<https://jateng.antarane.ws.com/berita/636269/pemprov-jateng-semarang-business-matching-2026-genjot-sektor-pariwisata>

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa penyelenggaraan "Semarang Business Matching 2026" mampu menggenjot pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah Jateng Sumarno di Semarang, Minggu, mengatakan bahwa kegiatan tersebut mampu mempertemukan penjual (seller) dan pembeli (buyer) yang bergerak di sektor pariwisata di Indonesia.

Menurut dia, pariwisata menjadi sektor strategis untuk mendorong perekonomian, sebab pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut banyak ditopang dari sektor konsumsi.

"Upaya untuk meningkatkan konsumsi salah satunya adalah mendatangkan orang ke Jawa Tengah. Mereka akan menginap, makan dan belanja," katanya.

Ia menjelaskan banyak negara yang bertumpu pada sektor pariwisata, seperti Dubai yang pada zaman dahulu banyak yang tidak menyangka apabila negara yang gersang itu, kini menjadi salah satu pusat wisata internasional.

"Ada lagi negara Seychelles. Ini negara terkecil di Afrika. 70 persen sektor perekonomiannya ditopang dari pariwisata," katanya.

Oleh karena itu, pekerjaan rumah yang penting diperhatikan adalah membangun jaringan dan menciptakan paket wisata dengan beragam jenis, apalagi wisata di Jateng banyak sekali macamnya.

"Kami berharap forum ini menjadi bagian untuk menjadi pengembangan pariwisata di Jawa Tengah," pungkasnya.

Sementara itu, Project Director Semarang Business Matching 2026 Sri Astuti mengatakan Kota Semarang adalah tempat keempat diselenggarakan kegiatan tersebut.

Sebelumnya, kegiatan serupa diselenggarakan di Yogyakarta, Bandung dan Surabaya. Setelah itu, dilanjutkan di Bali, Makassar, Bangkok dan Jakarta.

"Semarang ini adalah kota keempat di tahun ini dan jadwal kita di tahun ini itu ada delapan kota," katanya.

Ia menambahkan kegiatan tersebut sebenarnya sudah diselenggarakan sejak tahun 2024 dengan nama "Info Wisata Table Talk".

Pada tahun ini, pembeli yang hadir berasal dari 18 kota di Indonesia, baik hotel, event organizer, konsultan, maupun pelaku wisata.

Adapun pembelinya, berasal dari area Jawa Tengah, mulai Pantura Timur, Pantura Barat, Semarang dan sekitarnya dan Yogyakarta.

Panen Raya Bareng Gubernur, Petani Jawa Tengah Bungah Diperhatikan dan Hasil Melimpah

Rabu, 24 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/panen-raya-bareng-gubernur-petani-jawa-tengah-bungah-diperhatikan-dan-hasil-melimpah/>

SUKOHARJO – Suasana syukur dan semangat menyelimuti hamparan sawah di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Rabu (24/6/2026). Ratusan petani yang tergabung dalam Gapoktan Sari Tani mengikuti panen raya bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, didampingi jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor pertanian.

Di tengah deru mesin combine harvester yang memanen padi, para petani merasa kehadiran pemerintah bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang menyampaikan kebutuhan secara langsung. Apalagi, dalam kegiatan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi membuka ruang dialog dengan para petani.

Ketua Gapoktan Desa Gentan, Joko Mursito mengatakan, wilayah pertanian yang dikelola kelompoknya memiliki hamparan sekitar 264 hektare, dengan jumlah petani lebih dari 100 orang.

“Alhamdulillah, hari ini panen bersama Bapak Gubernur Jawa Tengah serta Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota Solo Raya. Untuk musim tanam kedua hasilnya lebih dari enam ton per hektare, karena masih dipengaruhi musim hujan, tetapi tetap cukup baik,” ujarnya.

Melihat hasil kali ini, para petani tetap optimistis menghadapi musim tanam berikutnya, yang direncanakan dimulai pada 10 Juli mendatang. Dia berharap, panen pada Oktober nanti bisa lebih tinggi, karena berlangsung saat musim kemarau.

“Kalau cuaca mendukung seperti tahun 2025, kami berharap hasil bisa kembali di atas satu kilogram per meter persegi,” katanya.

Tak hanya panen, momentum tersebut juga dimanfaatkan petani untuk berdialog langsung dengan gubernur. Sejumlah usulan disampaikan, mulai kebutuhan sumber air untuk MT III, listrik untuk sumur pertanian, tambahan combine harvester, hingga perbaikan jalan usaha tani. Respons pemerintah dinilai memberi rasa tenang bagi petani.

“Alhamdulillah petani Desa Gentan senang, karena aspirasi kami langsung ditangkap Pak Gubernur. Kami merasa diperhatikan dan nyaman,” tambah Joko.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menjelaskan panen raya di Sukoharjo menerapkan pola percepatan tanam melalui sistem terintegrasi.

Setelah panen menggunakan combine harvester, lahan langsung diolah dengan rotavator atau traktor, kemudian dilakukan penyemprotan dekomposer menggunakan drone agar kondisi tanah cepat pulih dan siap ditanami kembali.

“Jadi tidak perlu menunggu lama. Habis panen langsung olah tanah dan dilanjutkan tanam lagi. Dengan pola ini indeks pertanaman bisa meningkat,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, sektor pertanian menjadi salah satu prioritas, untuk mengejar target produksi nasional sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling pada 2026.

Menurutnya, hingga pertengahan tahun capaian produksi Jawa Tengah menunjukkan tren positif, namun tantangan musim kemarau tetap harus diantisipasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan berbagai langkah antisipasi melalui pipanisasi, sumurisasi, distribusi pompa air, hingga dukungan alat dan mesin pertanian.

“Perkiraan musim kemarau akan panjang. Karena itu seluruh daerah harus mulai memetakan wilayah yang berpotensi kekeringan, agar target swasembada pangan tercapai,” pungkasnya. (Wk/UI, Diskomdigi Jateng)

Inflasi Favorit The Fed Tembus 4,1% pada Mei 2026, Pengeluaran Konsumen AS Tetap Kuat

Kamis, 25 Juni 2026 21:20 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-favorit-the-fed-tembus-41-pada-mei-2026-pengeluaran-konsumen-as-tetap-kuat>

KONTAN.CO.ID - Inflasi Amerika Serikat (AS) kembali meningkat pada Mei 2026 dan menembus level 4% untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir.

Kenaikan ini memperkuat spekulasi bahwa bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) dapat kembali menaikkan suku bunga acuannya tahun ini.

Data Bureau of Economic Analysis (BEA) yang dirilis Kamis (25/6/2026) menunjukkan, Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index, indikator inflasi yang menjadi acuan utama The Fed, naik 4,1% secara tahunan (year on year/YoY) pada Mei.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan 3,8% pada April dan menjadi pertama kalinya inflasi PCE berada di atas 4% sejak April 2023. Hasil tersebut juga sesuai dengan perkiraan ekonom yang disurvei Reuters.

Secara bulanan, indeks PCE meningkat 0,4% pada Mei, sama seperti kenaikan yang tercatat pada April.

Kenaikan inflasi dipicu oleh lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah, khususnya perang yang melibatkan AS dan Iran. Ketegangan geopolitik sempat mendorong harga minyak dunia dan bensin naik tajam.

Meski harga minyak telah mulai turun dalam beberapa pekan terakhir setelah tercapainya gencatan senjata sementara dan kesepakatan awal perdamaian antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, para ekonom menilai tekanan inflasi masih akan bertahan dalam jangka pendek.

Selain faktor energi, konsumen AS juga masih menghadapi kenaikan harga akibat kebijakan tarif impor yang diterapkan pemerintahan Trump.

Inflasi Inti Juga Meningkat

Jika komponen makanan dan energi yang bergejolak dikeluarkan, inflasi inti (core PCE) tercatat naik 3,4% YoY pada Mei, lebih tinggi dibandingkan 3,3% pada April.

Secara bulanan, inflasi inti meningkat 0,3%, sama seperti bulan sebelumnya.

The Fed menggunakan indikator PCE dan core PCE sebagai acuan utama dalam mengejar target inflasi jangka panjang sebesar 2%.

Pekan lalu, The Fed mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,50%-3,75%. Namun, dalam proyeksi terbaru, para pejabat bank sentral mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga masih terbuka karena kekhawatiran terhadap tekanan inflasi yang kembali meningkat.

Saat ini, pasar keuangan memperkirakan kenaikan suku bunga bisa terjadi paling cepat pada September 2026, dengan peluang kenaikan lanjutan hingga akhir tahun.

Konsumsi Rumah Tangga Tetap Tangguh

Di tengah inflasi yang tinggi, belanja konsumen AS masih menunjukkan ketahanan.

Data menunjukkan pengeluaran konsumen yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS naik 0,7% pada Mei, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 0,4% pada April.

Peningkatan konsumsi didukung oleh pengembalian pajak yang lebih besar tahun ini serta penguatan pasar saham yang membantu menopang daya beli masyarakat.

Selain itu, rumah tangga AS juga mulai menggunakan tabungan mereka dan menurunkan tingkat simpanan untuk mempertahankan konsumsi.

Kuatnya konsumsi tersebut menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal II-2026.

Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS dapat mencapai 3,0% secara tahunan (annualized) pada periode April-Juni 2026.

Meski demikian, para ekonom mengingatkan bahwa tekanan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan upah, berakhirnya musim pengembalian pajak, serta menipisnya tabungan rumah tangga berpotensi membuat konsumsi masyarakat melambat pada kuartal III mendatang.

Dengan inflasi yang masih tinggi dan ekonomi yang relatif kuat, perhatian investor kini tertuju pada langkah The Fed berikutnya dalam menentukan arah kebijakan suku bunga hingga akhir tahun.

Impor Emas China Turun 38%, Tapi Cadangan Emas Terus Bertambah

Kamis, 25 Juni 2026 19:05 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/impor-emas-china-turun-38-tapi-cadangan-emas-terus-bertambah>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Impor emas bersih China melalui Hong Kong turun sekitar 38% pada Mei dibandingkan bulan sebelumnya, menurut data Departemen Sensus dan Statistik Hong Kong yang dirilis Kamis.

Data menunjukkan impor emas bersih China melalui Hong Kong mencapai 53,674 ton metrik pada Mei, turun dari 86,715 ton pada April.

Sebagai konsumen emas terbesar di dunia, perubahan pola pembelian China memiliki pengaruh besar terhadap pasar emas global. Namun, data Hong Kong tidak sepenuhnya mencerminkan seluruh impor emas China karena logam mulia tersebut juga masuk melalui Shanghai dan Beijing.

Secara keseluruhan, impor emas China melalui Hong Kong pada Mei tercatat sebesar 65,562 ton, turun sekitar 34% dibandingkan 99,327 ton pada April.

Analisis UBS, Giovanni Staunovo, mengatakan penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh tingginya impor langsung ke China dalam beberapa bulan terakhir.

“Karena impor langsung ke China sudah sangat kuat dalam beberapa bulan terakhir, kebutuhan untuk mengimpor melalui Hong Kong menjadi lebih rendah,” ujarnya.

Di tengah penurunan impor melalui Hong Kong, Bank Sentral China alias People’s Bank of China (PBOC) tetap melanjutkan akumulasi cadangan emasnya.

Data yang dirilis awal bulan ini menunjukkan PBOC menambah cadangan emas untuk bulan ke-19 berturut-turut pada Mei. Total cadangan emas China meningkat menjadi 74,96 juta troy ounce pada akhir Mei, dibandingkan 74,64 juta troy ounce pada April.

Langkah tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan China untuk memperkuat cadangan asetnya di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Sementara itu, Bursa Berjangka Hong Kong alias Hong Kong Futures Exchange mengumumkan pada akhir bulan lalu bahwa mereka akan menerapkan diskon biaya transaksi dan program insentif untuk kontrak berjangka emas.

Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan likuiditas pasar serta menghidupkan kembali aktivitas perdagangan kontrak emas di bursa tersebut.

Di pasar global, harga emas spot pada Rabu turun di bawah level psikologis penting US\$ 4.000 per ounce untuk pertama kalinya sejak November 2025.

Penurunan harga dipicu oleh menguatnya dolar Amerika Serikat serta meningkatnya ekspektasi bahwa suku bunga AS akan kembali dinaikkan, yang mengurangi daya tarik emas sebagai aset investasi.

Dorong Ekonomi, Pemerintah Jepang Siapkan Investasi Lebih dari ¥ 370 Triliun

Kamis, 25 Juni 2026 17:32 WIB

Sumber: Reuters, Bloomberg, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/dorong-ekonomi-pemerintah-jepang-siapkan-investasi-lbih-dari-370-triliun>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah Jepang mengumumkan cetak biru ekonomi Jepang terbaru. Cetak biru tersebut menyiratkan pemerintah negeri sakura ini akan membelanjakan uang besar-besaran dalam periode 14 tahun ke depan.

Dalam cetak biru tersebut, pemerintah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut akan melakukan investasi senilai lebih dari ¥ 370 triliun, sekitar Rp 41.026,90 triliun, dalam periode 14 tahun yang berakhir pada Maret 2041.

Peta jalan investasi ini menandai langkah kunci dalam upaya Takaichi menanamkan pengaruhnya pada strategi pertumbuhan Jepang, seiring perubahan teknologi dan ketegangan geopolitik yang membentuk kembali prioritas ekonomi.

Takaichi berupaya menyalurkan investasi ke sektor-sektor yang dapat memperkuat keamanan ekonomi, mulai dari ketahanan rantai pasokan hingga teknologi kritis, sambil meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang negara melalui dukungan untuk industri-industri baru.

Bloomberg melaporkan, sekitar ¥ 101,6 triliun, setara Rp 11.265,76 triliun, dialokasikan untuk belanja akal imitasi (AI) dan cip saja. Ini pertama kalinya pemerintah Jepang membuat cetak biru dengan jangka waktu sangat panjang.

“Seingat saya, ini adalah pertama kalinya peta jalan untuk pertumbuhan yang mencakup periode yang begitu panjang dipresentasikan, dan saya belum pernah mendengar rencana negara lain seperti ini,” kata Harumi Taguchi, Kepala Ekonom S&P Global Market Intelligence, dikutip Bloomberg, Kamis (25/6/2026).

Pemerintah Takaichi mendorong kombinasi investasi publik dan swasta untuk mencapai target, tetapi tidak memberikan rincian sinergi antara kedua sektor tersebut.

Dalam proyeksi pertumbuhan yang paling optimistis, pemerintah diperkirakan akan berkontribusi sebesar ¥10 triliun per tahun. Dengan demikian, kontribusi publik bisa mencapai sedikit kurang dari setengahnya.

Para ekonom menilai sulit menghitung seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan strategi ini. Sebabnya, perusahaan swasta sudah menginvestasikan ratusan miliar dolar dalam pabrik dan peralatan setiap tahunnya.

“Dengan jangka waktu yang begitu panjang, mustahil memprediksi bagaimana kondisi ekonomi akan berkembang, sehingga akurasi rencana tersebut pasti sangat rendah, menimbulkan pertanyaan tentang keandalannya,” kata Taguchi.

Rencana belanja tersebut juga tidak menjelaskan bagaimana tepatnya pemerintah akan membiayai belanja, tanpa memperburuk keuangan yang sarat utang.

Pemerintah juga merilis proyeksi ekonomi dan fiskal jangka panjang, yang menggabungkan strategi pertumbuhan Takaichi dalam tiga skenario.

Dalam skenario paling optimistis, di mana strategi tersebut berjalan sesuai rencana, tingkat pertumbuhan potensial diproyeksikan meningkat menjadi 1,8% dari 0,4%. Rasio utang terhadap PDB diperkirakan akan menurun secara stabil.

Dalam dua skenario lainnya, di mana ketidakpastian teknologi dan pasar membatasi dampak strategi tersebut, atau di mana tren saat ini berlanjut, rasio tersebut diproyeksikan akan mulai meningkat lagi pada tahun 2030-an. Ketiga skenario tersebut mengasumsikan inflasi stabil di sekitar 2%.

Dalam cetak biru tersebut, pemerintah Jepang juga menyiapkan kebijakan moneter yang mendukung permintaan swasta. Reuters melaporkan, rancangan tersebut mendesak Bank of Japan (BOJ) menyelaraskan keputusannya dengan upaya Perdana Menteri Sanae Takaichi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan yang tegas dalam cetak biru tersebut menegaskan kekhawatiran pemerintah Takaichi terhadap potensi peningkatan suku bunga lebih lanjut, setelah BOJ tidak lagi menerapkan kebijakan moneter yang sangat longgar.

Rancangan tersebut juga menjanjikan pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang gesit dan memadamkan untuk mencegah kembalinya deflasi, sambil meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.

"Seiring pemerintah berupaya mencapai pertumbuhan yang kuat di bawah kebijakan ekonomi dan fiskalnya, kebijakan moneter tepat yang mendukung permintaan swasta melalui kenaikan harga yang stabil sangat penting," menurut draf yang ditinjau Reuters.

Sekadar info, pemerintah Jepang memang selalu memasukkan paragraf tentang kebijakan moneter dalam cetak biru. Tapi biasanya pemerintah Jepang hanya menggunakan kalimat samar, dan hanya mendesak BOJ memandu kebijakan secara tepat guna untuk mencapai stabilitas harga.

Sudah lama menjadi kebiasaan bagi pemerintah untuk memasukkan paragraf tentang kebijakan moneter dalam cetak biru, meskipun sebagian besar sengaja menjaga bahasanya tetap samar, biasanya hanya mendesak BOJ untuk memandu kebijakan secara tepat guna mencapai stabilitas harga.

Rancangan cetak biru Takaichi menyimpang dari praktik tersebut. Rancangan Takaichi secara eksplisit menyerukan kebijakan untuk mendukung permintaan swasta dan mengacu pada persyaratan hukum bagi BOJ untuk selaras dengan kebijakan pemerintah.

"Meskipun susunan kalimatnya tidak langsung, bahasa tersebut tampaknya menolak kenaikan suku bunga dan menggarisbawahi kehati-hatian pemerintah terhadap risiko penurunan ekonomi yang terkait dengan kenaikan suku bunga prematur," kata Takahide Kiuchi, mantan anggota dewan BOJ.

Ekonomi Australia: Lowongan Kerja Turun, Tapi Pengeluaran Rumah Tangga Melonjak

Kamis, 25 Juni 2026 10:51 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-australia-lowongan-kerja-turun-tapi-pengeluaran-rumah-tangga-melonjak>

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Kondisi makroekonomi Australia masih goyang. Ini antara lain terlihat di pasar tenaga kerja. Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di Australia turun di kuartal yang berakhir Mei.

Australian Bureau of Statistics (ABS) mengumumkan, Kamis (25/6/2026), lowongan pekerjaan turun 2,1% dalam kuartal yang berakhir Mei. Ini merupakan penurunan pertama sejak pertengahan 2025. Penurunan terbesar terjadi di sektor keuangan, akomodasi, dan makanan.

Buat perbandingan, di kuartal sebelumnya, lowongan pekerjaan tercatat naik 2,4%. Ini adalah angka revisi. Secara tahunan, data terbaru menunjukkan jumlah lowongan pekerjaan turun 2,1% menjadi 329.500.

Lowongan pekerjaan di sektor swasta turun 1,4%. Sementara lowongan di sektor publik turun 7,9%. Sebagian besar sektor yang disurvei mengalami kerugian.

Penurunan terbesar sebesar 21,4% terjadi di industri jasa keuangan dan asuransi. Sementara di industri akomodasi dan jasa makanan terjadi penurunan 16,1%.

Di sisi lain, pengeluaran rumah tangga Australia pulih di periode Mei. Penyebabnya, perjalanan kembali normal setelah terjadi penurunan akibat perang pada April. Ini menunjukkan permintaan konsumen tetap stabil di tengah biaya pinjaman dan harga bahan bakar yang lebih tinggi.

ABS mencatat indikator pengeluaran rumah tangga bulanan melonjak 1,3% pada bulan Mei menjadi A\$ 80,64 miliar, sekitar Rp 997,12 triliun. Konsensus proyeksi analis memperkirakan kenaikan hanya sebesar 0,5%, setelah penurunan tajam sebesar 1,1% pada April.

Transportasi merupakan kontributor terbesar terhadap peningkatan pengeluaran pada bulan Mei. Selain itu, rumah tangga juga menghabiskan lebih banyak uang untuk pakaian dan makan di luar.

Pengangguran Australia Turun ke 4,4%, Harapan Pemangkasan Suku Bunga Kian Menipis

Kamis, 25 Juni 2026 09:27 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/pengangguran-australia-turun-ke-44-harapan-pemangkasan-suku-bunga-kian-menipis>

KONTAN.CO.ID - Pasar tenaga kerja Australia menunjukkan ketahanan pada Mei 2026. Jumlah pekerja kembali meningkat setelah sempat turun pada bulan sebelumnya, sementara tingkat pengangguran turun dari level tertinggi dalam empat setengah tahun terakhir.

Data yang dirilis Australian Bureau of Statistics pada Kamis (25/6/2026) menunjukkan jumlah tenaga kerja bertambah 40.300 orang pada Mei.

Angka ini membalikkan penurunan 40.600 pekerjaan pada April yang telah direvisi dan lebih tinggi dari perkiraan pasar yang memperkirakan kenaikan sekitar 30.000 pekerjaan.

Tingkat pengangguran Australia turun menjadi 4,4% pada Mei dari 4,5% pada April, sesuai ekspektasi ekonom. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja naik tipis menjadi 66,7%.

Data terpisah juga menunjukkan pengeluaran rumah tangga meningkat pada Mei setelah aktivitas perjalanan kembali normal pasca-penurunan yang dipicu konflik Iran pada April.

Kondisi tersebut mengindikasikan permintaan konsumen masih cukup kuat meski suku bunga dan harga bahan bakar berada pada level tinggi.

Kepala Investasi VanEck Russel Chesler menilai, data tersebut menunjukkan ekonomi Australia masih cukup tangguh.

"Ini bukan sinyal perlambatan ekonomi yang diharapkan pasar. Untuk ekonomi yang disebut sedang kehilangan momentum, warga Australia masih bekerja dan masih berbelanja," ujar Chesler.

Menurutnya, jika tekanan inflasi tetap tinggi, masih ada peluang bagi bank sentral untuk kembali menaikkan suku bunga.

"Kami tetap bergantung pada data, tetapi kami melihat masih ada kemungkinan satu kali kenaikan suku bunga lagi dalam siklus ini," tambahnya.

Meski demikian, sejumlah indikator menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Total jam kerja turun cukup tajam sebesar 1,1% pada Mei, sementara jumlah lowongan pekerjaan menyusut 2,1% dalam tiga bulan hingga Mei. Penurunan tersebut menjadi yang pertama sejak akhir tahun lalu.

Data terbaru tidak banyak mengubah ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter. Peluang kenaikan suku bunga pada Agustus masih diperkirakan sekitar 20%, sementara pasar hanya memperhitungkan pengetatan tambahan sekitar 12 basis poin hingga akhir tahun.

Reserve Bank of Australia (RBA) telah menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali sepanjang tahun ini hingga mencapai 4,35% dalam upaya menekan inflasi.

Langkah tersebut sekaligus menghapus seluruh pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan sepanjang 2025.

Inflasi utama Australia tercatat sebesar 4,0% pada Mei. Sementara itu, inflasi inti yang diukur melalui trimmed mean meningkat menjadi 3,6%, masih berada di atas target RBA sebesar 2%-3%.

RBA juga menilai pasar tenaga kerja masih relatif ketat. Dalam proyeksi terbarunya, bank sentral memperkirakan tingkat pengangguran baru akan meningkat ke 4,7% pada pertengahan 2028.

Ketahanan pasar kerja dan konsumsi rumah tangga tersebut menjadi faktor yang dapat memberikan ruang bagi RBA untuk mempertahankan sikap hawkish apabila tekanan inflasi belum mereda dalam beberapa bulan ke depan.

Rupiah Dekati Rp 18.000 Kamis (25/6), Peso Filipina Pimpin Pelemahan Mata Uang Asia

Kamis, 25 Juni 2026 09:37 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/rupiah-dekati-rp-18000-kamis-256-peso-filipina-pimpin-pelemahan-mata-uang-asia>

KONTAN.CO.ID - Mayoritas mata uang Asia melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (25/6/2026), seiring penguatan greenback yang didorong ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Berdasarkan data Reuters hingga pukul 02.05 GMT, peso Filipina menjadi mata uang dengan pelemahan terbesar di kawasan Asia, turun 0,69% ke level 61,298 per dolar AS.

Di posisi berikutnya, won Korea Selatan melemah 0,39% menjadi 1.548,70 per dolar AS, sementara dolar Taiwan turun 0,28% ke level 31,840 per dolar AS.

Rupiah Indonesia juga berada di zona merah dengan pelemahan 0,14% ke posisi Rp17.950 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.925 per dolar AS.

Sementara itu, ringgit Malaysia menjadi salah satu mata uang yang mencatat penguatan terbesar di kawasan. Ringgit naik 0,53% menjadi 4,113 per dolar AS.

Adapun yen Jepang menguat tipis 0,04% ke level 161,71 per dolar AS, sedangkan baht Thailand relatif stabil di posisi 33,41 per dolar AS. Rupee India juga tidak mengalami perubahan dan bertahan di level 94,665 per dolar AS.

Kinerja sejak awal tahun

Jika dihitung sejak awal 2026, sebagian besar mata uang Asia masih mencatat depresiasi terhadap dolar AS.

Rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan, merosot 7,13% dari posisi akhir 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS menjadi Rp17.950 per dolar AS.

Won Korea Selatan menyusul dengan penurunan 7,05%, sementara baht Thailand melemah 5,87% dan rupee India turun 5,07%.

Peso Filipina tercatat melemah 4,08% sejak awal tahun, sedangkan yen Jepang turun 3,13%.

Di sisi lain, yuan China menjadi satu-satunya mata uang utama Asia yang masih menguat terhadap dolar AS sepanjang tahun ini.

Yuan terapresiasi sekitar 2,58% ke level 6,812 per dolar AS dibandingkan posisi akhir 2025 di 6,9879 per dolar AS.

Penguatan dolar AS dalam beberapa hari terakhir didorong meningkatnya ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve masih berpeluang menaikkan suku bunga acuan tahun ini.

Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap mayoritas mata uang negara berkembang, termasuk di kawasan Asia.

OJK Wanti-wanti Bank Soal Risiko Kredit Macet Pembiayaan Kopdes

Mis Fransiska Dewi

Kamis, 25 Juni 2026 18:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/113062/ojk-wanti-wanti-bank-soal-risiko-kredit-macet-pembiayaan-kopdes/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan agar tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola risiko dalam menyalurkan kredit kepada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) guna mengantisipasi potensi lonjakan terhadap kredit macet.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan program KDMP yang diinisiasi oleh pemerintah bertujuan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan perekonomian masyarakat desa, dalam rangka penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Program ini dan perekonomian desa yang meningkat dinilai akan membawa peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh bank, sehingga perekonomian dapat berputar lebih cepat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan,” kata Dian dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, di balik potensi tersebut, risiko pembiayaan bermasalah atau potensi kredit macet tetap perlu diantisipasi. OJK meminta bank senantiasa menerapkan dan menjaga kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam seluruh kegiatan bisnisnya, termasuk yang dilakukan dalam rangka mendukung kredit/pembiayaan kepada program KDMP.

“Ini yang tentunya juga dilakukan dengan mempertimbangkan risk appetite dan expertise bank,” ujar Dian.

Dian menambahkan di tengah berbagai dinamika perekonomian yang ada saat ini, OJK meningkatkan penguatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta melakukan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset perbankan yang senantiasa tetap terjaga baik di berbagai skenario ekonomi.

Selain itu, OJK juga meminta perbankan untuk memperhatikan serta menjaga pembentukan pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengantisipasi potensi kerugian akibat risiko kredit, serta senantiasa menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga baik.

“OJK akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sekadar catatan, pemerintah telah memangkas target pembangunan KDMP tahun ini menjadi hanya 40.000 dari semula yang sekitar 80.000 unit. Artinya pemerintah memangkas 50% target awal pembangunan koperasi desa. Keputusan tersebut dilakukan seiring dengan proses monitoring Kementerian Koperasi dari progres pembangunan fisik hingga saat ini yang masih terus berjalan.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi, saat ini sebanyak 12.533 lokasi KDMP telah selesai dibangun. Sebanyak 83.000 titik lokasi dan lembaga pengelola juga sudah terbentuk. Sementara, lahan yang terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Kemudian, sebanyak 1.061 Kopdes sudah memulai operasionalnya dan sebanyak 22.737 unit masih dalam tahap pembangunan.

LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan 25 Basis Poin

Kamis, 25 Juni 2026 17:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/113046/lps-naikkan-tingkat-bunga-penjaminan-simpanan-25-basis-poin/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan untuk simpanan rupiah di Bank Umum dan BPR masing-masing sebesar 25 basis poin atau BPS serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing (valas) di Bank Umum.

Sehingga saat ini, suku bunga penjaminan untuk Bank Umum, rupiah menjadi 3,75 dan untuk valas berada di angka tetap yaitu 2%. Sementara itu, untuk BPR untuk rupiah 6,25 TPP tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026

“Penyesuaian Tingkat Bunga Penjaminan tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan,” kata Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisiner LPS.

Anggito bilang Tingkat Bunga Penjaminan simpanan tersebut, nantinya akan dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi perekonomian pasar keuangan dan perbankan yang signifikan

“Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” sebut Anggito.

LPS membeberkan sejumlah pertimbangan yang mendasari keputusan menaikkan tingkat suku bunga penjaminan simpanan.

Pertama, suku bunga simpanan rupiah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren kenaikan di seluruh kelompok bank sebagai respons terhadap peningkatan suku bunga kebijakan serta dinamika pasar keuangan, baik global maupun domestik.

Kedua, LPS menilai pertumbuhan simpanan rupiah masih relatif tinggi, namun berpotensi mengalami perlambatan ke depan. Di sisi lain, pertumbuhan simpanan dalam valas diperkirakan akan meningkat seiring perkembangan kondisi pasar.

Ketiga, LPS mencermati kondisi likuiditas perbankan yang hingga kini tetap terjaga di seluruh kelompok bank. Meski demikian, lembaga tersebut melihat adanya indikasi peningkatan kompetisi suku bunga simpanan di antara perbankan, yang perlu diantisipasi.

Selain itu, LPS juga terus menjaga tingkat cakupan penjaminan simpanan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan. Hingga saat ini, cakupan penjaminan masih berada di atas batas minimum 90% sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Namun, seiring perkembangan kondisi terkini, LPS mulai mencermati adanya kecenderungan penurunan pada tingkat cakupan tersebut. Karena itu, lembaga tersebut akan mengambil langkah antisipatif agar tren penurunan tidak berlanjut dan cakupan penjaminan tetap berada pada level yang memadai.

OJK: Likuiditas Perbankan Solid Namun Risiko di Q2 2026 Masih Ada

Kamis, 25 Juni 2026 11:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112987/ojk-likuiditas-perbankan-solid-namun-risiko-di-q2-2026-masih-ada/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi likuiditas perbankan nasional hingga kuartal II-2026 masih memadai, meski industri keuangan menghadapi volatilitas seperti nilai tukar rupiah hingga ketidakpastian arah kebijakan suku bunga global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan industri perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk menopang penyaluran kredit ke depan.

“Kami memandang bahwa kinerja perbankan secara umum tetap solid, didukung oleh kondisi likuiditas yang memadai dan struktur permodalan yang kuat,” kata Dian dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan data OJK per April 2026, loan to deposit ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88% serta alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 111,13% dan 25,39%.

Posisi tersebut berada jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Selanjutnya, capital adequacy ratio (CAR) masih cukup tinggi untuk menjadi buffer dalam menyerap risiko yang dihadapi yang mencapai 23,97%.

Dian memaparkan kualitas kredit industri perbankan juga masih terjaga. Hal itu tecermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,17% dan loan at risk (LaR) sebesar 8,82%.

“Jika dilihat per sektor, tidak terdapat tren peningkatan NPL yang signifikan pada sektor produktif tertentu, utamanya pada sektor-sektor utama penopang kredit perbankan,” tutur Dian.

Meskipun demikian, OJK mengingatkan bank perlu mewaspadaai penurunan daya beli masyarakat dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih lanjut serta risiko inflasi ke depan sebagai dampak volatilitas ekonomi global dan domestik.

Kondisi tersebut, kata Dian, dapat berdampak pada peningkatan risiko kredit pada segmen UMKM dan konsumsi yang memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dalam kondisi tersebut, bank juga cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sehingga dapat mempengaruhi dinamika pertumbuhan kredit ke depannya.

“Kami menyadari bahwa dinamika perkembangan situasi global dan domestik diperkirakan akan tetap mewarnai kinerja perbankan Indonesia,” ucap Dian.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, OJK dan perbankan secara rutin melakukan stress test menggunakan skenario terkait situasi perekonomian, pasar keuangan, dan politik global maupun domestik.

Hasil stress test OJK maupun perbankan menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia.

Bukan Tanda Cadangan Devisa Minipis, Ini Tujuan Pengembalian SAL ke BI

Kamis, 25 Juni 2026 22:30 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/bukan-tanda-cadangan-devisa-minipis-ini-tujuan-pengembalian-sal-ke-bi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp 300 triliun secara bertahap dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan penempatannya kembali di Bank Indonesia (BI) dinilai bukan sinyal bahwa bank sentral kehabisan amunisi untuk menjaga stabilitas rupiah. Namun sebagai upaya penguatan koordinasi fiskal dan moneter.

Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, menilai langkah tersebut lebih tepat diartikan sebagai upaya penguatan koordinasi fiskal dan moneter di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ketidakpastian pasar keuangan global.

"Menurut saya, penarikan dana SAL dari Himbara dan penempatan ke Bank Indonesia jangan langsung dibaca sebagai tanda bahwa BI kehabisan cadangan devisa atau sudah tidak punya ruang intervensi. Ini lebih tepat dibaca sebagai penataan ulang kas pemerintah dan penguatan koordinasi fiskal-moneter di tengah tekanan rupiah," ujar Josua kepada Kontan, Kamis (25/6/2026).

Ia menegaskan, posisi cadangan devisa Indonesia masih berada pada level yang memadai. Per akhir Mei 2026, cadangan devisa tercatat sebesar US\$ 144,9 miliar atau setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor maupun 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Angka tersebut masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang umumnya berada di kisaran tiga bulan impor.

"Jadi narasi bahwa BI sudah kehabisan cadangan devisa tidak tepat. Yang lebih tepat adalah BI ingin mengurangi beban intervensi langsung dengan memperkuat bauran kebijakan," kata Josua.

Menurutnya, upaya BI untuk mengurangi ketergantungan pada intervensi langsung di pasar valas dengan memperkuat bauran kebijakan dilakukan melalui penyesuaian suku bunga acuan, menjaga daya tarik instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), intervensi pasar valuta asing, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah.

Meski demikian, Josua mengakui pengembalian dana SAL ke BI tetap dapat dilihat sebagai langkah memperkuat amunisi kebijakan dalam arti yang lebih luas, bukan amunisi cadangan devisa secara langsung.

"Dana SAL adalah rupiah, bukan dolar AS. Karena itu, pemindahan dana SAL dari Himbara ke rekening pemerintah di BI tidak otomatis menambah cadangan devisa," ujarnya.

Menurut Josua, dampak utama kebijakan tersebut lebih terasa pada pengelolaan likuiditas rupiah di pasar domestik. Penempatan dana pemerintah di BI dapat membantu bank sentral mengatur jumlah uang beredar, meredam spekulasi di pasar keuangan, sekaligus memperkuat keyakinan investor bahwa pemerintah dan BI bergerak dalam satu arah menjaga stabilitas ekonomi.

Nilai dana SAL yang ditarik juga tidak kecil, mencapai sekitar Rp 300 triliun. Jika dikonversi menggunakan kurs sekitar Rp 18.000 per dolar AS, nilainya setara dengan sekitar US\$ 16 miliar hingga US\$ 17 miliar.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa angka tersebut tidak dapat disamakan dengan tambahan cadangan devisa karena seluruhnya berbentuk rupiah.

"Dampaknya lebih banyak melalui pengelolaan likuiditas rupiah, sinyal koordinasi pemerintah dan BI, serta pengurangan tekanan permintaan valuta asing yang bisa muncul dari likuiditas rupiah yang terlalu longgar," katanya.

Josua menjelaskan, jumlah Rp 300 triliun tersebut setara hampir sepertiga posisi SRBI yang mencapai Rp 1.021 triliun per 15 Juni 2026. Nilainya juga cukup besar dibandingkan insentif likuiditas makroprudensial BI yang mencapai Rp 418,1 triliun pada awal Juni 2026.

Karena itu, dampak terhadap likuiditas perbankan akan sangat bergantung pada kecepatan penarikan dana. Jika dilakukan secara bertahap dan diimbangi dengan fasilitas likuiditas dari BI, tekanan terhadap perbankan dinilai masih dapat dikelola.

Secara historis, penempatan SAL di perbankan sejak 2025 memang ditujukan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung penyaluran kredit.

Pemerintah saat itu memindahkan dana SAL sebesar Rp276 triliun ke bank umum dalam dua tahap, dengan tahap pertama senilai Rp200 triliun ditempatkan di bank-bank Himbara pada September 2025.

"Dari awal dana ini memang bukan dana permanen bank, melainkan dana pemerintah yang ditempatkan sementara untuk membantu likuiditas dan mendorong intermediasi," jelasnya.

Meski kondisi likuiditas perbankan secara agregat masih kuat, Josua mengingatkan adanya potensi tekanan pada bank-bank tertentu apabila penarikan dana berlangsung terlalu cepat.

Bank yang telah menyalurkan dana tersebut menjadi kredit perlu mencari sumber pendanaan pengganti, baik melalui penghimpunan dana pihak ketiga, pasar uang antarbank, maupun fasilitas likuiditas yang disediakan BI.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya dana perbankan dan membuat bank lebih selektif dalam menyalurkan kredit.

"Risiko terbesar ada pada bank yang pertumbuhan kreditnya tinggi dan selama ini cukup mengandalkan dana SAL sebagai sumber pendanaan sementara," katanya.

Meski demikian, Josua menilai kondisi sistem perbankan nasional masih relatif solid. Kredit per Mei 2026 tumbuh 11,51% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan April yang sebesar 9,98%.

Sementara itu, dana pihak ketiga tumbuh 13,47%, rasio alat likuid terhadap DPK mencapai 24,74%, dan fasilitas pinjaman yang belum digunakan masih sekitar Rp 2.576 triliun.

Menurutnya, dampak terhadap sektor riil dapat muncul melalui kenaikan suku bunga kredit baru, perlambatan ekspansi kredit, hingga pengetatan persyaratan pembiayaan pada sektor-sektor seperti perumahan, konstruksi, UMKM, dan modal kerja.

Namun risiko tersebut dapat diminimalkan apabila penarikan SAL dilakukan secara bertahap, pemerintah tetap menjaga belanja produktif, dan BI terus menyediakan likuiditas pendukung melalui berbagai instrumen pasar uang.

"Pengembalian SAL ke BI bukan tanda BI kehabisan cadangan devisa, tetapi sinyal bahwa pemerintah dan BI sedang mengonsolidasikan kas dan likuiditas untuk menjaga rupiah serta kepercayaan pasar," pungkas Josua.

Purbaya Suntik Dana Rp 1,96 Triliun ke Tiga Bank Pembangunan Internasional

Kamis, 25 Juni 2026 15:31 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/purbaya-suntik-dana-rp-196-triliun-ke-tiga-bank-pembangunan-internasional>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menambah investasi negara senilai sekitar Rp 1,96 triliun pada tiga lembaga keuangan internasional pada tahun anggaran 2026.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42 Tahun 2026 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2026.

Dalam aturan tersebut, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk melakukan penambahan investasi pemerintah kepada tiga lembaga keuangan internasional, yakni Islamic Development Bank (IsDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan International Development Association (IDA).

Dana investasi tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

"Penambahan investasi pemerintah sebagaimana dimaksud bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026," bunyi Pasal 3 ayat (5).

Nilai investasi terbesar dialokasikan kepada Islamic Development Bank sebesar Rp 1,69 triliun atau setara dengan 75,865 juta Islamic Dinar.

Dana tersebut digunakan untuk pembayaran kenaikan saham umum keempat, kenaikan saham umum keenam, serta kenaikan saham khusus Indonesia di lembaga tersebut.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan investasi sebesar Rp 49,5 miliar atau setara US\$ 3 juta kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Dana tersebut digunakan untuk penambahan saham ke-13 Indonesia pada lembaga yang berfokus pada pembangunan sektor pertanian di negara berkembang tersebut.

Sementara itu, investasi kepada International Development Association (IDA), yang merupakan bagian dari World Bank Group, ditetapkan sebesar Rp 220,275 miliar atau setara US\$ 13,35 juta.

Dana tersebut dialokasikan untuk pembayaran penambahan saham ke-19, ke-20, dan ke-21 Indonesia di IDA.

Dalam PMK dijelaskan, penambahan investasi pemerintah bertujuan menjadi dasar pelaksanaan investasi negara pada lembaga keuangan internasional selama tahun anggaran 2026.

Pelaksanaan penambahan investasi dilakukan oleh Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Investasi Pemerintah.

PMK juga mengatur bahwa nilai investasi dapat melebihi besaran yang ditetapkan apabila terjadi selisih kurs mata uang.

Adapun nilai definitif penambahan investasi nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan setelah seluruh proses pembayaran investasi selesai dilaksanakan.

OJK: Pelemahan Rupiah Belum Berdampak Signifikan ke Perbankan

Kamis, 25 Juni 2026 11:55 WIB

Reporter: Selvi Mayasari, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-pelemahan-rupiah-belum-berdampak-signifikan-ke-perbankan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan mendekati level Rp 18.000 per dolar AS belum memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, ketahanan sektor perbankan masih terjaga di tengah gejolak global yang dipicu ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga minyak, serta penguatan indeks dolar AS.

"OJK terus mencermati perkembangan perekonomian global yang saat ini masih dibayangi gejolak geopolitik dan harga minyak yang berdampak pada meningkatnya volatilitas pasar keuangan global serta penguatan US Dollar Index yang memicu fluktuasi nilai tukar di negara-negara emerging market," ujar Dian dalam jawaban tertulis, dikutip Kamis (25/6/2026).

Menurut Dian, pelemahan rupiah memang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan inflasi akibat naiknya harga barang impor. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Meski demikian, hingga saat ini dampak langsung terhadap industri perbankan masih relatif terbatas. Salah satu faktor penopangnya adalah rendahnya eksposur valuta asing perbankan yang tercermin dari Posisi Devisa Neto (PDN).

Per April 2026, PDN industri perbankan tercatat sebesar 1,63% dan masih berada jauh di bawah batas maksimum regulator sebesar 20%.

Selain itu, kualitas kredit juga masih terjaga. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tercatat sebesar 2,17%, sedangkan likuiditas perbankan tetap kuat dengan rasio Alat Likuid terhadap

Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) dan Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) yang berada di atas ketentuan minimum.

"LDR berada di level 86,88%, masih dalam rentang yang sehat. Sementara Liquidity Coverage Ratio (LCR) mencapai 192,37%, jauh di atas threshold sehingga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek perbankan," jelasnya.

Meski kondisi industri masih solid, Dian mengingatkan pelemahan rupiah yang berkepanjangan tetap berpotensi meningkatkan risiko kredit. Terutama bagi debitur yang memiliki kewajiban atau aktivitas usaha yang terkait dengan valuta asing.

"Pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut dapat berdampak pada debitur yang memiliki eksposur rentan terhadap pergerakan valuta asing. Kondisi tersebut dapat menekan kemampuan bayar debitur dan pada akhirnya meningkatkan risiko kredit perbankan," katanya.

Karena itu, OJK meminta perbankan memastikan kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) serta menjaga ketahanan permodalan. Hingga April 2026, rasio CKPN terhadap NPL tercatat sebesar 165,35%, sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 23,97%.

Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, OJK terus memperkuat pengawasan individual bank dan secara berkala melakukan stress test dengan memasukkan skenario pelemahan nilai tukar rupiah.

"Hasil stress test menunjukkan sektor perbankan masih mampu menghadapi potensi tekanan yang timbul akibat pelemahan nilai tukar rupiah," ujar Dian.

Dampak ke BPR Lebih Terbatas

Dian menjelaskan dampak langsung pelemahan rupiah terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) relatif lebih kecil dibandingkan bank umum. Hal ini karena model bisnis BPR pada umumnya berfokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam mata uang rupiah serta tidak melakukan transaksi valas.

"Dibandingkan bank umum, dampak langsung pelemahan nilai tukar terhadap BPR relatif lebih terbatas karena BPR tidak memiliki eksposur langsung terhadap risiko nilai tukar," katanya.

Namun demikian, BPR tetap menghadapi risiko tidak langsung. Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi pelaku usaha kecil yang bergantung pada bahan baku impor, menekan arus kas debitur, hingga mengurangi daya beli masyarakat akibat kenaikan inflasi.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan bayar debitur UMKM yang menjadi segmen utama pembiayaan BPR.

Untuk itu, OJK meminta BPR meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang sensitif terhadap pergerakan nilai tukar, khususnya pelaku usaha yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan impor atau rantai pasok global.

Selain itu, BPR juga didorong memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi lebih cepat debitur yang mulai mengalami tekanan keuangan.

"BPR perlu mengidentifikasi lebih dini debitur yang mulai mengalami tekanan arus kas sehingga langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan sebelum kualitas kredit memburuk," ujar Dian.

Menurutnya, permodalan yang kuat dan pembentukan CKPN yang memadai akan menjadi bantalan utama bagi BPR dalam menghadapi potensi peningkatan risiko di tengah volatilitas ekonomi global.

Di sisi lain, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

"Kami terus memperkuat koordinasi kebijakan dan strategi komunikasi publik bersama anggota KSSK untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global maupun domestik," tutup Dian.

Rupiah Bertahan di Kisaran Rp 17.900, BI Rate Belum Jadi Penopang

Kamis, 25 Juni 2026 16:21 WIB

Reporter: Alya Fathinah, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://investasi.kontan.co.id/news/rupee-bertahan-di-kisaran-rp-17900-bi-rate-belum-jadi-penopang>.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,75% dinilai belum mampu menjadi penopang kuat bagi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Meski sempat menguat tipis pada perdagangan terakhir, mata uang Garuda masih bertahan di kisaran Rp17.900 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup menguat 0,05% ke level Rp 17.943 per dolar AS pada Kamis (25/6), dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di Rp 17.952 per dolar AS. Namun, penguatan tersebut dinilai belum mencerminkan perbaikan fundamental yang cukup kuat untuk mengangkat kinerja rupiah secara berkelanjutan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai tekanan yang dihadapi rupiah saat ini jauh lebih besar dibandingkan dampak positif yang dihasilkan dari kenaikan suku bunga acuan.

"Persoalannya bukan pada kebijakan BI, melainkan pada besarnya tekanan yang sedang dihadapi. Kenaikan suku bunga pada dasarnya hanya bekerja melalui satu jalur, yaitu meningkatkan daya tarik aset rupiah dibandingkan aset lain," ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (25/6/2026).

Menurut Yusuf, ekspektasi pasar bahwa bank sentral AS masih berpotensi mempertahankan kebijakan moneter ketat membuat dolar AS tetap kuat dan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) tetap tinggi. Kondisi tersebut mendorong investor global bertahan pada aset-aset berbasis dolar AS yang dinilai lebih aman.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik di Timur Tengah turut meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven dan mengurangi minat investor terhadap aset negara berkembang, termasuk Indonesia.

Karena itu, Yusuf menilai kenaikan BI Rate saat ini lebih berfungsi untuk menahan laju pelemahan rupiah dibandingkan membalikkan arah pergerakan nilai tukar secara signifikan. Tanpa langkah tersebut, tekanan terhadap rupiah berpotensi lebih besar.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap rupiah berasal dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, penguatan dolar AS, sikap hawkish The Fed serta meningkatnya premi risiko akibat konflik geopolitik menjadi faktor utama yang membebani mata uang negara berkembang.

Sementara dari dalam negeri, permintaan dolar AS meningkat untuk pembayaran dividen perusahaan asing, kewajiban utang luar negeri, hingga kebutuhan musiman seperti penyelenggaraan ibadah haji.

Selain itu, pasar juga mencermati sejumlah isu struktural, mulai dari surplus perdagangan yang menyusut, penurunan cadangan devisa, hingga kekhawatiran terhadap daya tarik pasar keuangan Indonesia setelah MSCI memperpanjang evaluasi aksesibilitas pasar domestik.

"Faktor-faktor tersebut membuat tekanan terhadap rupiah menjadi lebih persisten dan tidak sekadar bersifat jangka pendek," kata Yusuf.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Yusuf menilai langkah yang lebih efektif saat ini bukan hanya melalui kenaikan suku bunga. Menurutnya, BI telah mengandalkan instrumen yang lebih terarah seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang mampu menarik aliran dana asing tanpa meningkatkan biaya kredit secara luas di dalam perekonomian.

Selain itu, BI juga memperkuat stabilisasi melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan swap valas. Kebijakan yang mendorong devisa hasil ekspor (DHE) tetap berada di dalam negeri juga dinilai penting untuk memperkuat pasokan dolar AS di pasar domestik.

Meski demikian, Yusuf menekankan bahwa sumber pasokan devisa yang paling berkelanjutan tetap berasal dari investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

"Arus modal portofolio dapat keluar masuk dengan cepat, sementara investasi langsung menciptakan pasokan devisa yang lebih stabil dan berjangka panjang," ujarnya.

Yusuf mengingatkan, apabila rupiah bertahan di kisaran Rp17.900 per dolar AS dalam waktu lama, risiko utama yang muncul adalah meningkatnya tekanan inflasi impor. Harga energi, pangan, dan barang modal berpotensi naik karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor.

Selain itu, beban pembayaran utang valas pemerintah maupun korporasi akan meningkat dan berpotensi menekan ruang ekspansi usaha.

Adapun sektor yang paling rentan terhadap pelemahan rupiah antara lain industri otomotif, elektronik, farmasi, dan tekstil yang masih bergantung pada bahan baku impor. Perusahaan yang memiliki utang dolar AS tanpa lindung nilai (hedging) juga berisiko menghadapi tekanan arus kas yang lebih besar.

Untuk semester II-2026, Yusuf memperkirakan peluang penguatan rupiah masih terbuka, meskipun relatif terbatas. Menurutnya, tekanan musiman diperkirakan mulai mereda pada paruh kedua tahun ini dan kondisi geopolitik global diharapkan lebih stabil.

Namun, arah pergerakan rupiah masih akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan The Fed, harga minyak dunia serta persepsi investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

"Saya cenderung menggunakan skenario moderat dengan kisaran Rp17.300 hingga Rp18.200 per dolar AS untuk semester II," kata Yusuf.

Menurut Yusuf, rupiah masih berpeluang menguat dari level saat ini. Namun, selama dolar AS tetap kuat dan ketidakpastian global masih tinggi, penguatan yang terjadi kemungkinan lebih mencerminkan proses stabilisasi dibandingkan awal dari tren apresiasi yang signifikan.

Dilirik Investor Cilacap, Rawa Pening Siap Disulap Jadi Destinasi Wisata Air Unggulan Jateng

Kamis, 25 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/dilirik-investor-cilacap-rawa-pening-siap-disulap-jadi-destinasi-wisata-air-unggulan-jateng/>

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendukung penuh rencana pengembangan wisata air di kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memperkuat kawasan aglomerasi pariwisata Borobudur–Kopeng–Rawa Pening.

Hal itu disampaikan Luthfi saat menerima audiensi Bupati Semarang Ngesti Nugraha dan Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (25/6/2026).

Dalam audiensi tersebut, Bupati Semarang turut memperkenalkan calon investor dalam negeri, PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir asal Cilacap, yang siap mengembangkan destinasi wisata tersebut.

Luthfi menyambut baik minat investasi untuk pengembangan destinasi wisata itu. Namun, dia mewanti-wanti agar tetap memperhatikan fungsi konservasi. Pengembangannya juga perlu dilakukan koordinasi lintas sektor.

“Borobudur, Kopeng, Rawapening ini menjadi satu aglomerasi yang akan kita kembangkan. Namun memang harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak, karena Rawapening juga kawasan konservasi,” kata Luthfi.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan, calon investor yang diajak tersebut berencana mengembangkan destinasi wisata di kawasan Rawa Pening. Investasi yang akan ditanamkan mulai dari rumah makan apung, vila, keramba, hingga permainan air.

“Harapannya, Rawa Pening menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah,” kata Ngesti.

Direktur PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir, Miskun mengatakan, perusahaannya melihat potensi besar Rawa Pening untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis perairan. Menurutnya, gubernur meminta agar proses pengembangan dapat segera direalisasikan.

“Beliau tadi menyampaikan supaya secepatnya disegerakan, jangan terlalu lama,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan, pengembangan Rawa Pening sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Borobudur–Kopeng–Rawa Pening (Bokor) harus dilakukan secara hati-hati, karena kawasan tersebut juga berfungsi sebagai kawasan konservasi.

Menurutnya, Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk menentukan zonasi kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, maupun yang harus dipertahankan sebagai kawasan konservasi.

Selain itu, Rawa Pening juga akan masuk investasi terkait sistem pengelolaan air dari Shiga, Jepang. Dengan demikian, aspek pariwisata, konservasi, dan water management, dapat berjalan beriringan.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa kita lihat site plan-nya. Karena Rawa Pening ini kewenangan Kementerian PU, tapi tetap kita bisa masuk,” bebernya. (Humas Jateng)*ul

Investor India Lirik Jateng, Siap Garap Produk Pertanian dan Energi Surya

Kamis, 25 Juni 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/investor-india-lirik-jateng-siap-garap-produk-pertanian-dan-energi-surya/>

SEMARANG — Investor asal India, JK Enterprises, menjajaki perluasan investasi di Jawa Tengah, dengan membidik sektor produk pertanian dan energi surya.

Rencana tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Chairman JK Enterprises Anant Singhania, di Semarang, Kamis (25/6/2026).

Anant mengatakan, JK Enterprises telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Perusahaan yang bergerak di bidang cutting tools, hand tools, files, dan drills (alat potong, perkakas tangan, kikir, dan mata bor) itu kini melihat peluang untuk memperluas lini produksi di Jawa Tengah.

“Kami sedang melihat peluang pada produk-produk pertanian karena permintaannya besar, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kami juga mempelajari produk lain, seperti solar pumps dan solar products (pompa tenaga surya dan produk energi surya),” kata Anant.

Saat ditanya mengenai nilai investasi yang akan dikucurkan, Anant belum menyebutkan angka pasti. Dia mengatakan, besaran investasi akan bergantung pada respons pasar dan perkembangan bisnis ke depan.

Anant mengaku optimistis rencana pengembangan investasi tersebut dapat berjalan. Dia menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan respons cepat terhadap setiap persoalan yang dihadapi investor.

“Mereka sangat proaktif memberikan arahan dan pendampingan. Kami benar-benar merasakan dukungan dari Gubernur,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi memastikan siap memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan investasi, melalui koordinasi dengan kementerian terkait maupun pendampingan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala DPMPTSP Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menjelaskan, pihaknya akan mendampingi penyelesaian kendala teknis yang dihadapi perusahaan, termasuk persoalan pada sistem OSS dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

“Ketika ada KBLI 2025 yang hilang saat sistem kementerian di-rollback, pelaku usaha bisa datang ke kami untuk kami lakukan pendampingan. Kami juga akan kontak ke kementerian,” terang Sakina. (Humas Jateng)*ul

Ekonomi Jateng Tumbuh 5,84 Persen, BI Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas dan Pacu UMKM Naik Kelas

Kamis, 25 Juni 2026

Penulis : Alif Nazzala Rizqi, Editor : Jaka Nuswantara

<https://www.jatengnews.id/2026/06/25/ekonomi-jateng-tumbuh-584-persen-bi-perkuat-sinergi-jaga-stabilitas-dan-pacu-umkm-naik-kelas/>

SEMARANG, Jatengnews.id – Perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja yang resilien.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M Noor Nugroho menyampaikan, ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,84 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen (yoy).

Menurutnya, pertumbuhan tersebut didukung oleh tetap kuatnya konsumsi rumah tangga serta meningkatnya investasi di Jawa Tengah.

“Di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih berlanjut, perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja yang resilien. Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan peningkatan investasi,” ujar M Noor Nugroho, Kamis (25/06/2026).

Selain pertumbuhan ekonomi, kondisi inflasi Jawa Tengah juga tetap terkendali. Pada Mei 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 2,85 persen (yoy), masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1$ persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,08 persen (yoy).

Capaian tersebut tidak lepas dari sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaku usaha, perbankan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam upaya pengendalian inflasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bersama TPID terus memperkuat strategi melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Berbagai program dilakukan, mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 35 kabupaten/kota, GPM Mandiri di 32 kabupaten/kota, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), optimalisasi Jateng Agro Berdikari (JTAB) sebagai offtaker, hingga pengembangan outlet pangan.

Dari sisi produksi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi biosaline dan biochar, pengembangan kelompok unggulan komoditas pangan strategis, serta dukungan terhadap program swasembada bawang putih di Kabupaten Magelang.

Sementara itu, penguatan sektor UMKM juga menjadi perhatian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. BI Jawa Tengah terus meningkatkan kapasitas usaha, kelembagaan, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku UMKM.

Hingga Juni 2026, KPwBI Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi berbagai kegiatan Business Matching pembiayaan melalui sejumlah agenda seperti sosialisasi BISAID, CJFACE, dan kegiatan lainnya. Dari upaya tersebut, pembiayaan yang berhasil disalurkan mencapai Rp9,47 miliar.

Selain itu, fasilitasi UMKM dalam berbagai pameran nasional maupun internasional seperti UMKM Grande, JIF-BW, PADI, IFEX, dan CJFACE menghasilkan potensi transaksi sebesar Rp23,4 miliar.

“Upaya ini diharapkan semakin memperkuat daya saing UMKM Jawa Tengah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah,” kata M Noor Nugroho.

Di sektor sistem pembayaran, digitalisasi transaksi juga terus berkembang. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS di Jawa Tengah mencapai 8,72 juta pengguna dengan jumlah merchant sebanyak 4,65 juta.

Sejalan dengan perkembangan digitalisasi tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat perlindungan konsumen melalui edukasi, pengawasan, serta koordinasi bersama OJK, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan anggota SATGAS PASTI untuk mencegah aktivitas keuangan ilegal.

Edukasi perlindungan konsumen juga dilakukan melalui Klinik Pelindungan Konsumen yang menyasar masyarakat, mahasiswa, hingga pelaku UMKM. Selain itu, BI memastikan ketersediaan uang Rupiah layak edar, termasuk melalui layanan kas di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti Karimunjawa.

Bank Indonesia juga memperluas literasi kebanksentralan melalui program BI Mengajar, kuliah umum di perguruan tinggi, kunjungan sekolah, serta berbagai kanal komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi Bank Indonesia.

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, mempercepat transformasi ekonomi daerah, memperluas digitalisasi sistem pembayaran, memperkuat UMKM, serta meningkatkan literasi ekonomi masyarakat.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah agar tetap inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Masuk Penilaian Tahap II PPD 2026, Kinerja Pembangunan Jateng Tuai Apresiasi

Kamis, 25 Juni 2026 09:00 WIB

https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=11379

SEMARANG — Sejumlah kebijakan dan program yang digulirkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menuai apresiasi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun akademisi.

Hal itu tersampaikan dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi tahun 2026, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 25 Juni 2026.

Perencana Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Taufik Hanafi, mengakui capaian-capaian luar biasa Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Jateng.

Salah satu program yang diapresiasi adalah program Dokter Spesialis Keliling (Speling). Program ini memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi warga di desa-desa dengan melibatkan para dokter spesialis. Selain itu, ia juga mengapresiasi program-program pendidikan, sekolah vokasi, Balai Latihan Kerja (BLK), dan lainnya di Jateng.

"Strategi keberlanjutan ini perlu dibagikan agar bisa direplikasi di daerah lain," katanya.

Ia menjelaskan, Menteri PPN/Bappenas selalu menekankan terkait trisula pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta sumber daya manusia (SDM) terkait tenaga kerja.

"Kalau kami lihat apa yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah dalam kerja-kerjanya, sudah mencakup ketiganya itu secara terintegrasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Kelola Kementerian PPN/Bappenas, Ahmad Dading Gunadi, mengapresiasi Jawa Tengah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab, angkanya sudah di atas rata-rata nasional. Maka dari itu, penting untuk dijaga keberlanjutannya.

Ia juga mengapresiasi program Speling yang sudah menjangkau banyak masyarakat di desa-desa. Tak hanya itu, capaian sasaran pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jateng juga menjadi yang tertinggi se-Indonesia.

"Speling ini sangat bagus dengan jangkauan capaian angka yang luar biasa. Program ini baru di pemerintahan Gubernur Ahmad Luthfi," ujarnya.

Akademisi Fakultas Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Ridwan Sutriadi, menyoroti strategi Provinsi Jawa Tengah dalam kinerja pembangunan daerah, di antaranya terkait pengembangan wilayah, mitigasi perubahan iklim, serta perencanaan tata ruang wilayah. Ia juga mengapresiasi Jateng yang terus mendukung program strategis dan program prioritas nasional.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menjelaskan beberapa capaian kinerja pembangunan di wilayahnya. Beberapa di antaranya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 telah mencapai angka 5,89% atau lebih tinggi dari rata-rata nasional (5,61%). Kemudian, angka kemiskinan per September 2025 mengalami penurunan dari 9,58% menjadi 9,39%.

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 sebesar 74,77 atau tumbuh 1,20 poin dibanding tahun sebelumnya (73,87). Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 4,24% atau turun 0,09% dibanding Februari 2025.

Selain itu, realisasi investasi di Jateng pada 2025 sebesar Rp110,02 triliun, meliputi Penanaman Modal Asing (PMA) Rp50,86 triliun, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp37,64 triliun, serta Rp21,52 triliun untuk UMK. Adapun dari jumlah tersebut terdapat 105.078 proyek serta mampu menyerap 418.138 tenaga kerja.

"Investasi untuk triwulan I-2026 ini sudah terealisasi Rp23,02 triliun, dan mampu menyerap 92.000 tenaga kerja," ucap Gubernur.

Di samping itu, pencapaian program strategis nasional di Jawa Tengah, meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan realisasi penerima manfaat lebih dari 9 juta orang. Kemudian, realisasi program 3 Juta Rumah, meliputi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 20.253 unit pada tahun 2025 dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026 sebanyak 3.844 unit.

Selanjutnya, ada program Sekolah Rakyat yang sudah terealisasi di 14 titik dengan jumlah 1.275 siswa, sedangkan program Sekolah Garuda ada 6 titik. Sementara untuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sudah menjangkau 9,5 juta orang atau tertinggi secara nasional. Berikutnya, ada 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah terbentuk. Dari jumlah itu, sebanyak 6.271 unit telah operasional.

"Speling ini kami kolaborasi dengan kabupaten/kota serta seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah daerah maupun swasta. Antusias masyarakat luar biasa. Program ini juga kami gandengkan dengan Gerakan Pangan Murah," ucap Gubernur.